

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN SERANG
Studi Multi Kasus di SMAN 1 Ciruas dan
SMAN 1 Cikande Kabupaten Serang**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Administrasi Publik pada Pascasarjana
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**



Oleh :

**NURUL MUSTIQO
7775150031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2017**

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN SERANG**
(Studi Multi Kasus di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande Kabupaten Serang)

"Tesis ini telah dipertahankan dihadapan penguji"

Tanggal, 0 - 9 - 2017.....

Tanggal, 0 - 9 - 2017.....

Pembimbing 1

Pembimbing 2

DR. Agus Sjafari, M.Si
NIP 197108242005011002

Riswanda, Ph.D
NIP 198101122008121001

Diketahui

Tanggal, 0 - 9 - 2017.....

Tanggal, 0 - 9 - 2017.....

Direktur Pascasarjana

Ketua Prodi MAP



DR. H. Suherman, M.Pd
NIP 195902141985031003

Abdul Hamid, Ph.D
NIP 198104102006041023

Nama : Nurul Mustiqo
NIM : 7775150031
Tanggal Lulus : 08 Agustus 2017

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengemukakan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

LEMBAR PERBAIKAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN SERANG
(Studi Multi Kasus di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande Kabupaten Serang)

Dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Tesis Pascasarjana
Universitas Sultan Agung Tirtayasa

Dewan Penguji :

1. Abdul Hamid, Ph.D
2. DR. Rd. Nia Kania K, M.Si
3. DR. Agus Sjafari, M.Si
4. Dr. Ipah Ema Jumiaty, M.Si
5. Yearry Panji, Ph.D

Tanda Tangan



Tanggal

5/9/2017
5/9/2017
6/9/2017
12/9/2017
6/9/2017

Diketahui

Tanggal, 19-9-2017

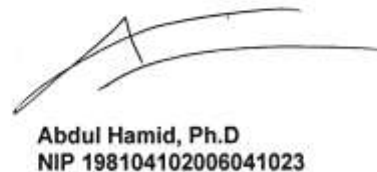
Direktur Pascasarjana



DR. H. Suherman, M.Pd
NIP 195902141985031003

Tanggal, 5/9/2017

Ketua Prodi MAP



Abdul Hamid, Ph.D
NIP 198104102006041023

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengemukakan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PERNYATAAN ORISININALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Mustiqo
NIM : 7775150031
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 di Kabupaten Serang Studi Multi Kasus di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana, Magister dan Doktor baik di Universitas Sultan Agung Tirtayasa maupun perguruan tinggi lainnya)
2. Tesis ini murni, gagasan, rumusan dan penelitian dari saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara jelas dicantumkan di daftar pustaka.

Apabila pernyataan ini tidak sesuai, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan enuh tanggungjawab dan segala konsekuensinya

Serang, 01 Agustus 2017



Nurul Mustiqo

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengemukakan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ABSTRACT

Nurul Mustiqo (7775150031). Policy Implementation Curriculum 2013 High School in Serang District. Thesis, Master Program of Postgraduate Public Administration of Sultan Ageng Tirtayasa University. 2017.

This thesis discusses the implementation of policy Curriculum 2013 High School in Serang regency, aims to discuss issues of policy implementation of high school curriculum in Serang regency. This research uses a critical paradigm, since the main purpose of this research is to reveal the process related to curriculum policy implementation 2013, to understand the existing phenomenon in the organization that is targeted research, which is still not optimal implementation of curriculum policy High School in Serang District. Method used in the research is qualitative with interviews, expected to be found explanations and facts of the object or subject to be studied. The results of this study indicate that there are 4 factors that are very big influence on the implementation of curriculum policy 2013 Serang Senior High School is: (1) attitude factors, professionalism characteristics and competence pela Policy ksana is not fully optimal to support the implementation of curriculum 2013 in schools (2) Communications factors are not running effectively and intensively, ranging from initial socialization to supervision and monitoring. (3) Factors of curriculum policy content 2013, in some aspects of curriculum document 2013 in SMA Negeri 1 Ciruas and SMA Negeri 1 Cikande still need to be developed and improved, so that in the end can be in accordance with the provisions. (4) influences outside Policies such as school committees, lack of concrete involvement and support for implementation of curriculum policy 2013 in SMA Negeri 1 Ciruas and SMA Negeri 1 Cikande.

Keywords: *implementation, curriculum 2013, senior high school*

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ABSTRAK

Nurul Mustiqo (7775150031). Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Serang. Tesis, Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2017

Tesis ini membahas tentang Implementasi kebijakan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Serang, bertujuan untuk membahas permasalahan Implementasi kebijakan Kurikulum Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan paradigma *critical*, mengingat tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengungkap proses yang terkait dengan implementasi kebijakan kurikulum 2013, memahami fenomena yang ada di organisasi yang dijadikan sasaran penelitian, yakni masih belum optimalnya penerapan kebijakan Kurikulum Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan wawancara, diharapkan akan ditemukan penjelasan dan fakta dari obyek atau subyek yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap Implementasi kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang yaitu : (1) Faktor sikap, karakteristik profesionalisme dan kompetensi pelaksana kebijakan belum sepenuhnya optimal untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah (2) Faktor komunikasi tidak berjalan secara efektif dan intensif, mulai dari sosialisasi tahap awal hingga supervisi dan monitoring. (3) Faktor isi kebijakan kurikulum 2013, dalam beberapa aspek dokumen kurikulum 2013 di sekolah masih perlu dikembangkan dan diperbaiki, sehingga pada akhirnya bisa sesuai dengan ketentuan. (4) pengaruh diluar Kebijakan seperti komite sekolah, dijumpai kurangnya keterlibatan dan dukungan konkret terhadap pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande.

Kata kunci : implementasi, kurikulum 2013, sekolah menengah atas

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Serang (Studi Multi Kasus di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande Kabupaten Serang).

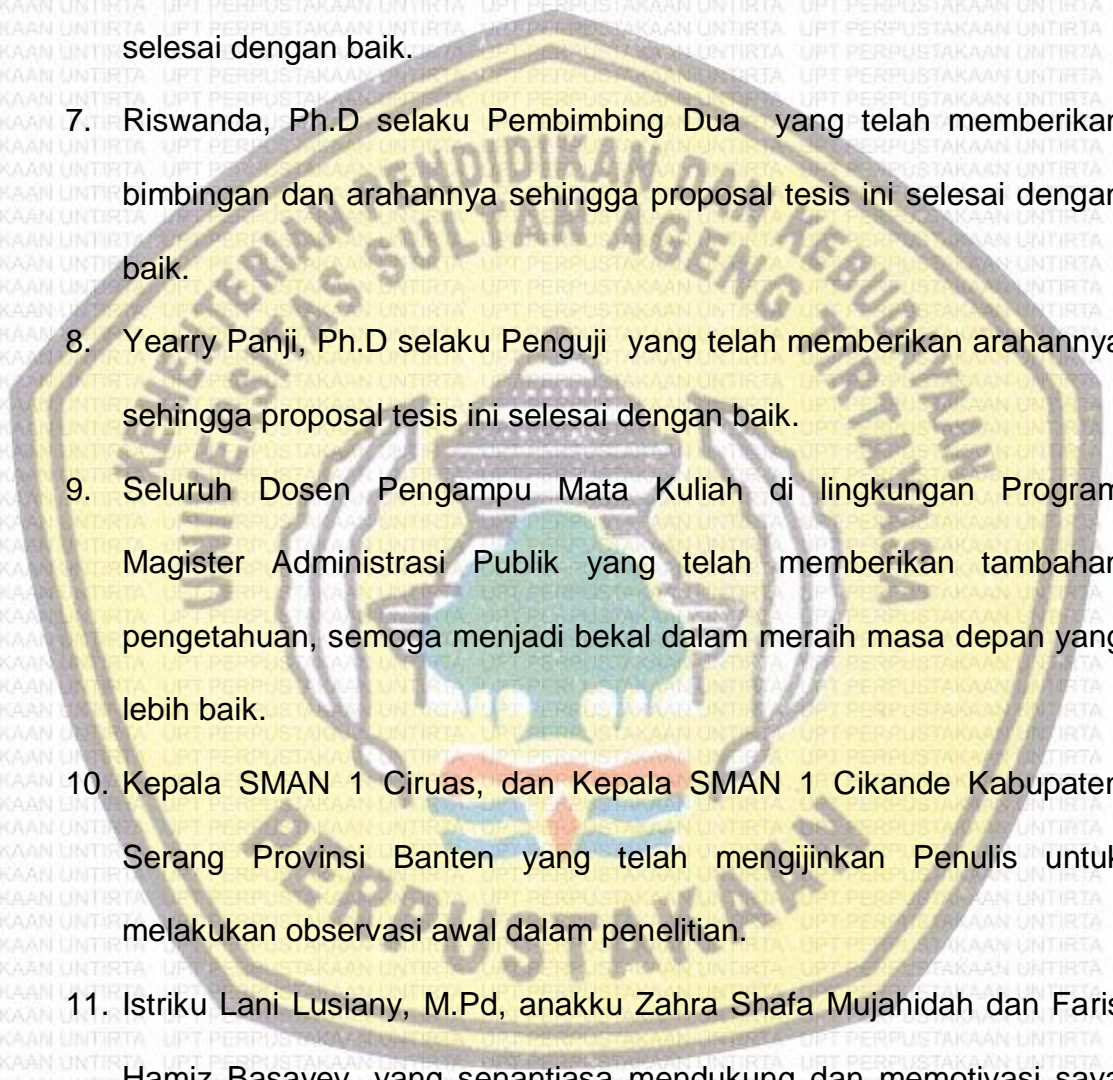
Penulis berharap bahwa tesis ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi perbaikan kebijakan program - program pendidikan terutama yang berkaitan dengan kurikulum.

Penulis mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik ketika masa perkuliahan, saat penelitian lapangan, sampai pada penyusunan tesis ini, tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh diri sendiri. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. H. Suherman, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Dr. H Masrupi, M.Pd, selaku Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Abdul Hamid, Ph.D selaku Ketua Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini tanpa digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
5. Dr. Rd. Nia Kania K, M.Si selaku Sekretaris Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga proposal tesis ini selesai dengan baik.
7. Riswanda, Ph.D selaku Pembimbing Dua yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga proposal tesis ini selesai dengan baik.
8. Yearry Panji, Ph.D selaku Penguji yang telah memberikan arahnya sehingga proposal tesis ini selesai dengan baik.
9. Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah di lingkungan Program Magister Administrasi Publik yang telah memberikan tambahan pengetahuan, semoga menjadi bekal dalam meraih masa depan yang lebih baik.
10. Kepala SMAN 1 Ciruas, dan Kepala SMAN 1 Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan observasi awal dalam penelitian.
11. Istriku Lani Lusiany, M.Pd, anaku Zahra Shafa Mujahidah dan Faris Hamiz Basayev, yang senantiasa mendukung dan memotivasi saya untuk menyelesaikan studi S2 ini.
12. Keluarga Besar H. Didi Hendariyadi dan Hj. Siti Mantukoh
13. Keluarga Besar SMAN 1 Kragilan
14. Keluarga Besar SMAN 1 Ciruas
15. Keluarga Besar SMAN 1 Cikande

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis menyelesaikan tesis ini.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, selanjutnya dengan hormat tesis ini penulis sajikan dan berharap agar dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi penulis sendiri.

Serang, Agustus 2017

Penulis,

Nurul Mustiqo



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	
HALAMAN LEMBAR PERBAIKAN	
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	31
1.3 Pembatasan Masalah.....	31
1.4 Rumusan Masalah.....	31
1.5 Tujuan Penelitian.....	32
1.6 Manfaat Penelitian.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Kebijakan.....	34
2.2 Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Sebagai Produk Kebijakan Publik.....	38
2.3 Proses Kebijakan Publik.....	42
2.4 Implementasi Kebijakan Publik.....	46
2.5 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	49
2.6 Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas.....	57
2.7 Hasil Penelitian Terdahulu.....	69
2.8 Kerangka Berpikir.....	71
2.9 Model Analisis Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier....	74
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Paradigma Penelitian.....	76
3.2 Jenis Pendekatan dan Model Penelitian.....	79
3.3 Sumber Data.....	82
3.4 Teknik Pengumpulan informan.....	83
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	83
3.6 Tempat dan Waktu Penelitian.....	87
3.7 Validasi.....	88
3.8 Teknik Analisis Data.....	88
3.9 Prosedur Penelitian.....	90
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	91
4.1.1 Deskripsi Kabupaten Serang.....	91
4.1.1.1 Visi Misi Kabupaten Serang.....	92
4.1.1.2 Motto Kabupaten Serang.....	93
4.1.2 Deskripsi SMA Negeri 1 Ciruas.....	93

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.1.2.1	Visi Misi SMA Negeri 1 Ciruas.....	95
4.1.3	Deskripsi SMA Negeri 1 Cikande.....	98
4.1.3.1	Visi Misi SMA Negeri 1 Cikande.....	99
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Kabupaten Serang.....	102
4.2.1	Informan.....	102
4.2.2.	Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentang Implementasi Kurikulum 2013.....	103
4.2.3	Deskripsi Penelitian.....	106
4.2.4	Karakteristik Masalah.....	124
4.2.4.1	Sikap Pelaksana Kebijakan Kurikulum 2013.....	124
4.2.4.2	Karakteristik Profesionalisme Pelaksana Kebijakan Kurikulum 2013	131
4.2.4.2.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan.....	132
4.2.3.2.2	Kepala Sekolah.....	137
4.2.3.2.2.1	Kualifikasi Kepala Sekolah.....	137
4.2.4.2.2.2	Kepemimpinan Kepala Sekolah	139
4.2.3.2.3	Guru.....	140
4.2.3.2.3.1.	Rasio Guru.....	140
4.2.3.2.3.2.	Kualifikasi pendidikan guru SMA	141
4.2.3.2.3.3.	Guru yang sudah bersertifikat Pendidik.....	142
4.2.3.2.3.4.	Pengalaman guru dalam kegiatan pengembangan kurikulum.....	143
4.2.3.2.3.5.	Pengalaman guru dalam sosialisasi kurikulum 2013.....	145
4.2.3.2.3.6	Tingkat Penguasaan Guru Terhadap Kurikulum 2013.....	146
4.2.3.2.3.7	Tingkat Penguasaan Guru dalam Pengembangan Silabus Kurikulum 2013.....	146
4.2.3.2.3.8	Tingkat Penguasaan Guru dalam Program Pembelajaran Kurikulum 2013.....	149
4.2.3.2.4	Tim pengembang Kurikulum 2013 di sekolah... ..	151
4.2.4	Daya Dukung Kebijakan	157
4.2.4.1	Kejelasan Komunikasi dan Tujuan	157
4.2.4.1.1.	Media Komunikasi	158
4.2.4.1.2.	Pelaku komunikasi.....	159
4.2.4.1.3	Metode komunikasi.....	163
4.2.4.1.4	Intensitas Komunikasi.....	165
4.2.4.1.5	Audiens / Peserta komunikasi.....	167
4.2.4.1.6	Materi dalam Komunikasi.....	169
4.2.4.1.7.	Kegiatan Monitoring dan Supervisi.....	172
4.2.4.2	Isi Kebijakan Kurikulum 2013.....	178
4.2.4.2.1	Relevansi Kurikulum 2013	179
4.2.4.2.2	Kelengkapan Dokumen Kurikulum 2013	182
4.2.4.2.3	Pengesahan dan Perubahan Dokumen Kurikulum 2013.....	184

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.2.4.3.	Pembiayaan dan Sarana Prasarana Pendukung Kurikulum 2013	187
4.2.4.4	Standar Operational Procedur Kurikulum 2013	198
4.2.5	Faktor yang Berpengaruh diluar Kebijakan.....	200
4.3.	Pembahasan Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Kabupaten Serang.....	208
4.3.1	Karakteristik Masalah.....	208
4.3.2	Daya Dukung Kebijakan.....	212
4.3.3	Faktor yang Berpengaruh diluar Kebijakan.....	215
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	223
5.2	Saran.....	225
DAFTAR PUSTAKA		



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR GAMBAR

1.1	Skor PISA Indonesia telah sedikit meningkat tetapi tetap dalam desil terendah dari negara-negara yang dinilai.....	3
1.2	Proporsi belanja pendidikan untuk gaji dan tunjangan guru meningkat.....	4
1.3	Tema Pembangunan Pendidikan 2005-2025.....	9
2.1	Proses Kebijakan.....	35
2.2	Pemecahan Masalah Pendidikan Melalui Kebijakan pendidikan.....	39
2.3	Rangkaian Kegiatan Kebijakan Publik.....	46
2.4	Model Implementasi Kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian.....	55
2.5	Model Analisis Penelitian.....	76
3.1	Model Interaktif Komponen Analisis Data.....	91
4.1	Alur Implementasi Kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang.....	106
4.2	Surat Tugas Bimbingan Teknis Kurikulum 2013.....	134
4.3	Bimbingan Teknis kurikulum 2013.....	135
4.4	SOP Pemberian Bantuan Implementasi Kurikulum 2013.....	199
4.5	SOP Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendampingan Kurikulum Sekolah Menengah Atas Berbasis Sekolah 2016.....	200

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR TABEL

1.1	Posisi Capaian Indonesia dalam PISA.....	6
1.2	Perbedaan Essensial Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013.....	16
1.3	Data Lulusan SMAN 1 Ciruas.....	25
1.4	Data Lulusan SMAN 1 Cikande.....	27
2.1	Struktur Kurikulum 2013.....	64
2.2	Struktur Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan	66
3.1	Perbedaan Paradigma Positivistik, Interpretif, <i>Critical</i>	78
3.2	Informan dan Data.....	84
3.3	Kisi - Kisi Wawancara Pejabat Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.....	86
3.4	Kisi - Kisi Wawancara Kepala Sekolah.....	87
3.5	Kisi - Kisi Wawancara Guru	87
3.6	Kisi - Kisi Wawancara Komite Sekolah.....	88
3.7	Kisi - Kisi Wawancara Akdemisi Pendidikan.....	88
4.1	Data Sekolah sasaran implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2017 Kabupaten Serang.....	134
4.2	Data Kepala Sekolah	136
4.3	Rasio Jumlah Guru dan Siswa.....	140
4.4	Kualifikasi Pendidikan Guru.....	140
4.5	Guru Bersertifikasi.....	141
4.6	Data Sarana SMA Negeri 1 Ciruas.....	186
4.7	Data Sarana SMA Negeri 1 Cikande	188
4.8	Persamaan dan Pebedaan Essensial Implementasi Kebijakan Kurikulum Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande.....	216

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pendidikan menjadi bagian penentu kemajuan dan ketahanan suatu bangsa di masa depan.

Pendidikan merupakan salah satu alternatif strategis dalam mencerdaskan bangsa dan modal utama pembangunan suatu bangsa. Pendidikan dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat mengakibatkan kemajuan, kesejahteraan dan pembangunan bangsa tercapai, jika sumber daya manusianya berkualitas. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas tergantung pada mutu pendidikan.

Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat secara efektif menanggapi permintaan akan pekerja yang memiliki keterampilan berpikir secara kompleks lebih dari pekerja yang memiliki keahlian dasar. Hal ini membutuhkan reformasi di bidang pendidikan, yang berpusat pada perubahan cara belajar siswa. Untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, guru harus berkembang dari seorang penyampai pengetahuan menjadi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

fasilitator pengetahuan. Pemanfaatan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dianggap sebagai inti dari perubahan ini.

Pendekatan ini mengharuskan para guru untuk menggunakan metode pengajaran yang lebih non-tradisional, yang didasarkan pada pembelajaran interaktif, dengan dilandasi oleh praktek mengajar investigatif dan praktis yang sesuai dengan konteks dunia nyata. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dimasukkan ke dalam kebijakan pendidikan di Indonesia lebih dari tiga puluh tahun yang lalu; namun demikian, secara aktual adopsi dari pendekatan ini lambat dilakukan oleh guru. Dorongan terhadap pembelajaran yang berpusat pada siswa ini belum lama ini diperkuat dengan program reformasi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas guru melalui pemberlakuan Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005.

Persyaratan utama berdasarkan undang-undang ini adalah bahwa semua guru harus memiliki gelar setingkat strata 1 (empat tahun) dan menjalani proses sertifikasi, sebagai standar minimum.¹ Meskipun undang-undang ini diundangkan dengan maksud baik, baru-baru ini suatu evaluasi uji coba terkontrol yang dilakukan secara acak dari program sertifikasi tersebut tidak menemukan bukti adanya dampak positif pada upaya guru atau hasil belajar siswa,² sementara studi observasional lainnya menemukan bahwa proses sertifikasi guru dipengaruhi oleh politik.³

¹ Dharma, Satria . 2009

² Bank Dunia, 2016

³ Jan Pierskalla dan Audrey Sacks, 2016

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

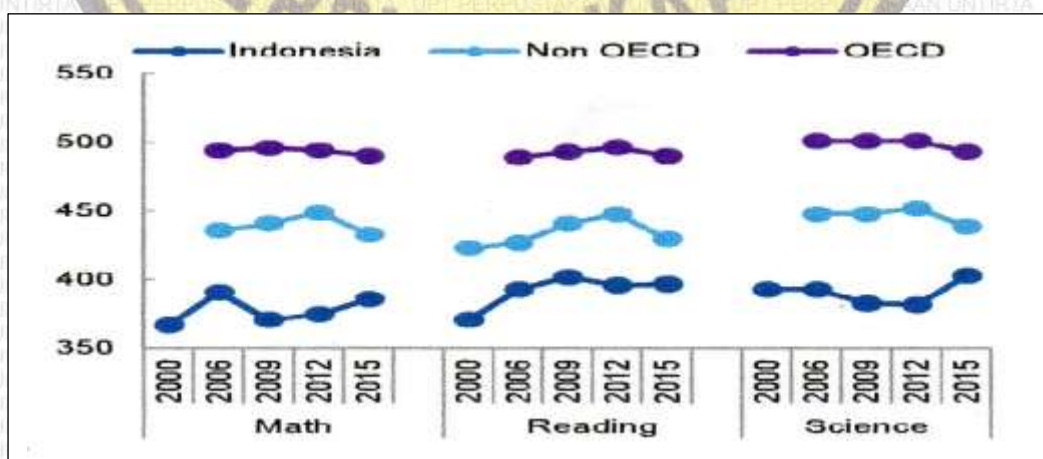
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Praktek pengajaran yang berbeda mendorong pengembangan keterampilan kognitif yang berbeda pada siswa. Pendekatan yang lebih “tradisional”, yang berpusat pada guru, cenderung mendorong pemahaman mengenai pengetahuan faktual dan keterampilan pemecahan soal, sedangkan praktek pengajaran yang berpusat pada siswa mendorong keterampilan penalaran. Ketika pembelajaran di suatu kelas dilakukan dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, siswa dan guru berbagi fokus.

Belanja pemerintah di sektor pendidikan telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, naik dari 11 menjadi 19 persen dari total pengeluaran pemerintah sepanjang tahun 2001-2014.⁴ Selama periode tersebut, hasil pembelajaran yang diukur dengan nilai/skor dari Program Penilaian Siswa Internasional (*Program for International Student Assessment - PISA*).

Gambar 1.3
Skor PISA Indonesia telah sedikit meningkat tetapi tetap dalam desil terendah dari dari negara-negara yang dinilai



Sumber : PISA

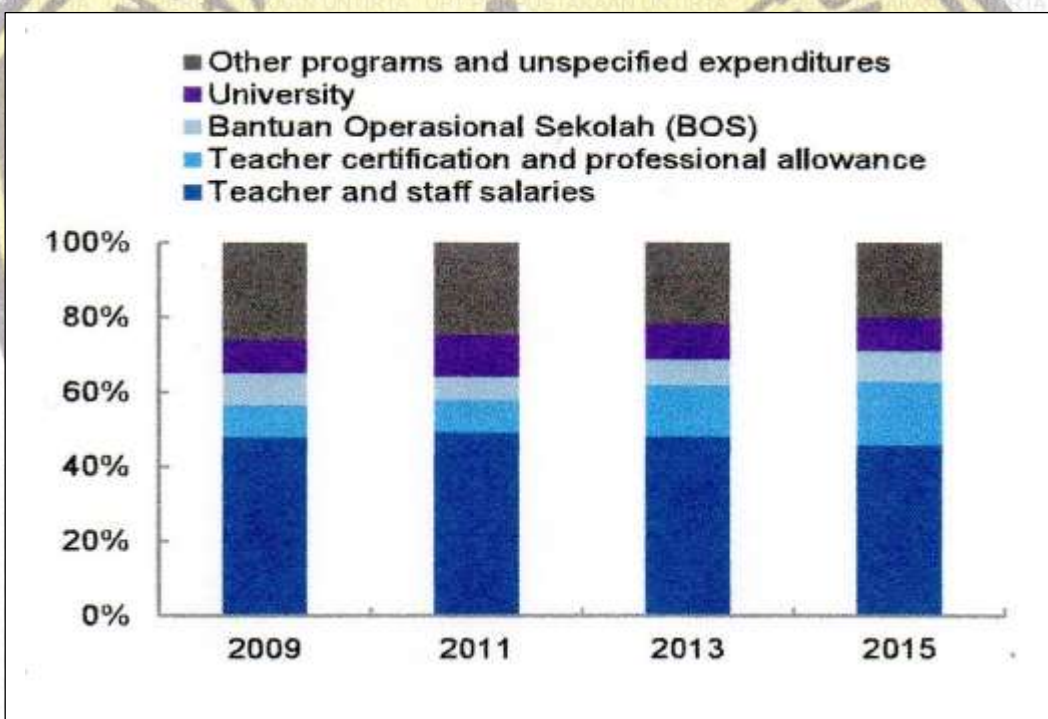
⁴ Bank Dunia, 2016

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Peningkatan belanja pendidikan dimanfaatkan terutama untuk menggaji guru, biaya sertifikasi guru, dan merubah status guru kontrak untuk menjadi PNS. Akibatnya, gaji dan tunjangan guru meningkat menjadi lebih dari 60 persen dari total belanja pendidikan di tahun 2015 (Gambar 1.2). Meskipun ini bukan bagian yang sangat tinggi menurut standar internasional, peningkatan belanja untuk guru belum dimanfaatkan secara efektif.

Gambar 1.2
Proporsi belanja pendidikan untuk gaji dan tunjangan guru meningkat



Sumber : Kemenkeu, LKPP, Perhitungan Bank Dunia

Untuk memulainya, peningkatan jumlah guru menurunkan rasio siswa terhadap guru (RSG) atau *Student to Teacher Ratio (STR)* sehingga Indonesia sekarang ini merupakan salah satu negara yang memiliki rata-rata RSG terendah di dunia.⁵ Namun demikian, penelitian di dalam negeri

⁵ Bank Dunia, 2016

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dan internasional telah mendapati bahwa terdapat sedikit besar.⁶ Selanjutnya, undang - undang tentang guru dan dosen tahun 2005 memperbolehkan guru bersertifikat untuk menerima tunjangan sertifikasi sebesar gaji pokok mereka.

Untuk mengetahui kemajuan pendidikan yang telah dilaksanakan, terkadang diperlukan survey sudah seberapa jauh kemajuan pendidikan kita saat ini. Survey yang dilakukan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) tentang peringkat pendidikan dunia tahun 2015 menyatakan lima peringkat teratas dipegang oleh negara-negara asia. OECD merupakan organisasi internasional yang menganut ekonomi pasar bebas. Analisis yang digunakan oleh OECD berdasarkan standar global yang lebih luas menggunakan tes PISA (*Programme For International Study Assessment*). Tes PISA merupakan studi internasional tentang prestasi membaca, matematika dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun. Indonesia sendiri telah ikut tes ini sejak tahun 2000. Hasil survey yang OECD lakukan ini berdasarkan pada hasil tes di 76 negara dalam hal hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang ikut berpartisipasi dalam tes PISA tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-69.⁷

⁶ Renstra Kemendikbud 2015-2019

⁷ Poluakan, 2016, p 68

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tabel 1.1
Posisi Capaian Indonesia dalam PISA

TAHUN	MATEMATIKA	SAINS	MEMBACA
	Skor Capaian (Rangking)	Skor Capaian (Rangking)	Skor Capaian (Rangking)
2000 (41 Negara)	367 (39)	393 (38)	371 (39)
2003 (40 Negara)	360 (38)	395 (38)	382 (39)
2006 (57 Negara)	391 (50)	393 (50)	393 (48)
2009 (65 Negara)	371 (61)	383 (60)	402 (57)
2012 (65 Negara)	375 (64)	382 (64)	396 (64)

Sumber : PISA 2012

Di dunia internasional, mutu pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di semua dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO *Education For All Global Monitoring Report 2012*. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan (*Education Development Index*, EDI), Indonesia berada kepada peringkat ke-69 dari 127 negara.⁸

Menurut Worlbank permasalahan pendidikan di Indonesia, walaupun Indonesia telah pulih dari krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an, negara ini masih tertinggal dari negara - negara tetangga sehubungan dengan akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu. Fokus upaya tersebut saat ini adalah pada kualitas lembaga dan pengeluaran publik. Tantangan utama mencakup:

⁸. Pendidikan indonesia.com.2015.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Pendaftaran sekolah menengah. Indonesia memiliki pendaftaran sekolah dasar yang hampir universal, tapi di tingkat menengah pertama, peningkatan berjalan lambat. Hanya 55 persen anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah terdaftar di sekolah menengah pertama.

2. Prestasi pembelajaran siswa. Indonesia terus mendapat prestasi yang rendah dalam uji berstandar internasional atas prestasi siswa, bahkan setelah memperhitungkan kondisi sosial ekonomi. Di tahun 2003, Indonesia mendapat posisi ke-33 dari 45 negara dalam Third International Mathematics Science Study (TIMSS). Di tahun 2006, Program for International Student Assessment (PISA), yang menilai seberapa baik kesiapan siswa berumur 15 tahun dalam menghadapi kehidupan, Indonesia mendapat peringkat 50 dari 57 negara dalam bidang ilmu pengetahuan, membaca dan matematika.

3. Alokasi belanja. Walaupun belakangan ini terjadi peningkatan dalam belanja pendidikan secara keseluruhan, investasi Indonesia untuk pendidikan menengah, terutama menengah pertama, masih kurang. Pada saat yang sama, anggaran operasional telah ditekan karena peningkatan substansial dalam pengeluaran untuk gaji.⁹

Untuk saat ini, Nilai rerata Ujian Nasional (UN) 2016 tingkat SMA/SMK sederajat mengalami penurunan yang signifikan. Hasil rerata UN SMA/SMK secara keseluruhan pada tahun 2016 ini adalah 55,03

⁹. Worlbank, 2016

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dibandingkan tahun 2015 lalu yakni 61,93. Penurunan nilai rerata UN SMA/SMK 2016 tersebut merupakan kondisi nyata capaian nilai siswa di lapangan. Hal ini tidak dibantah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan karena penurunan nilai rerata UN SMA/SMK tersebut, berbanding terbalik dengan Indeks Integritas UN (IIUN) yang mengalami peningkatan. "Ada perubahan yang terlihat pada UN kali ini yakni angka nilai UN ada penurunan. Sementara IIUN mengalami peningkatan.

Fakta ini menunjukkan bahwa penurunan ini terjadi karena selama bertahun-tahun lalu terjadi ketidakjujuran yang masif di sekolah-sekolah kita," ujarnya dalam konferensi pers hasil ujian nasional tingkat SMA/SMK 2016 di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin, 9 Mei 2016. Berdasarkan data Kemendikbud, nilai IIUN mengalami peningkatan 2,06 angka. Yakni dari 61,98 pada tahun 2015 lalu, menjadi 64,04 di tahun 2016 ini.¹⁰

Kesadaran pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan kurikulum, perbaikan kurikulum, sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Pemerintah dengan kebijakannya akan selalu bertanggung jawab dalam upaya peningkatan dan pengembangan pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan belum mencapai mutu atau kualitas yang kompetitif. Kebijakan seperti halnya otonomi daerah

¹⁰ Pikiran rakyat.com. 2016

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

telah menghasilkan pergeseran dalam mengelola persoalan-persoalan pendidikan. Pergeseran yang dimaksud adalah bahwa sistem manajemen pendidikan yang semula sentralistik menjadi desentralistik.

Sejalan dengan strategi keunggulan kompetitif Untuk menghadapi era globalisasi, maka dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, kementerian pendidikan dan kebudayaan telah menetapkan empat tema pokok kebijakan pendidikan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditunjukkan pada gambar 1.3.

Gambar 1.3
Tema Pembangunan Pendidikan 2005-2025



Sumber : Renstra Kemendikbud 2015- 2019

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan beberapa paradigma. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Perincian paradigma itu adalah sebagai berikut.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Pendidikan untuk Semua

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

5. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.

6. Sekolah yang Menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

7. Pendidikan Membangun Kebudayaan

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau prose budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Pendidikan semakin dituntut untuk tampil sebagai faktor kunci dalam pembangunan sumber daya manusia. Sejalan dengan makin pentingnya peranan pendidikan dalam dunia kerja, orientasi kepada kemampuan nyata yang dapat dilakukan oleh para lulusan sekolah semakin kuat sekolah dituntut untuk lebih realistis dan pragmatis seiring dengan tuntutan dunia kerja yang lebih melihat kompetensi nyata dari pada pengetahuan banyak tapi verbalistik. Disini pendidikan dipandang sebagai instrumen bagi pembangunan, sebab pendidikan secara akumulatif memberikan kontribusi cukup besar terhadap keberhasilan pembangunan.

Dalam rencana strategis pendidikan nasional, sedikitnya terdapat lima permasalahan utama yang pemecahannya harus diprioritaskan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, pemerataan layanan pendidikan, dan pendidikan berkarakter. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka diperlukan adanya perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan nasional, perubahan mendasar tersebut berkaitan dengan kurikulum.

Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia sudah beberapa kali diadakan perubahan dan perbaikan kurikulum yang semua itu tujuannya tidak lain adalah untuk menyesuaikannya dengan perkembangan dan kemajuan zaman, guna mencapai hasil yang maksimal. Perubahan kurikulum dibutuhkan proses yang cukup panjang dan pemikiran matang. Salah satu penyebab terjadinya perubahan kurikulum di Indonesia dewasa ini adalah karena ilmu pengetahuan itu sendiri yang senantiasa berubah - berubah.

Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang selalu berubah yang dipengaruhi dari luar, seperti ekonomi, politik dan kebudayaan, sehingga dengan adanya perubahan kurikulum tersebut pada gilirannya berdampak pada kemajuan bangsa dan negara.

Sejak tahun 2004 kurikulum pendidikan di Indonesia adalah kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1994. Perubahan kurikulum tersebut merupakan respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya Undang-Undang No 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Kurikulum ini menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditentukan. Tahun 2006, pemerintah mengeluarkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai pengganti kurikulum berbasis kompetensi yang dipandang belum

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

membawa perubahan yang signifikan. kurikulum 2013 diluncurkan agar lebih familier dengan guru dan kepala sekolah, karena mereka adalah figur yang diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum demi mewujudkan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah.

Kurikulum pendidikan harus berubah tetapi harus diiringi dengan kesiapan untuk berubah dari seluruh masyarakat pendidikan di Indonesia, karena kurikulum itu bersifat dinamis bukan statis, kalau kurikulum bersifat statis maka itulah yang merupakan kurikulum yang tidak baik. Hanya saja sering kali perubahan kurikulum juga tidak begitu saja berjalan dengan mulus ada banyak permasalahan yang dihadapi dalam mencari alternatif jawaban ataupun solusi yang bisa dipecahkan bersama sehingga dapat terwujud pemahaman mengenai perubahan kurikulum.

Kurikulum akan secara terus menerus mengalami perubahan atau penyempurnaan. Tentu hal ini akan perlu didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak akan pernah terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, budaya dan perubahan secara terus menerus ini harus diimbangi dengan perbaikan sistem pendidikan nasional, termasuk didalamnya penyempurnaan kurikulum guna mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan dengan perubahan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Upaya penyempurnaan kurikulum ini demi mewujudkan sistem pendidikan nasional yang kompetitif dan selalu relevan dengan perkembangan zaman yang senantiasa menjadi tuntutan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena ini kurikulum harus selalu disusun dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan memenuhi dua dimensi tersebut.¹¹

¹¹. Permendikbud Nomor 60 Tahun 2013: 1

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Adapun perbedaan esensial kurikulum SMA dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Perbedaan Esensial Kurikulum SMA

Kurikulum 2006	Kurikulum 2013
Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu	Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi
Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendirian	Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain
Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan	Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi
Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda	Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba , menalar
SMA ada penjurusan sejak kelas XI	Tidak ada penjurusan di SMA. Ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat.
SMA tanpa kesamaan kompetensi	SMA memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar-dasar pengetahuan , keterampilan, dan sikap.

Sumber : Mulyasa 2013

Sejalan dengan perkembangan zaman pendidikan akan semakin banyak menghadapi tantangan. Lebih - lebih menghadapi pasar bebas atau era globalisasi (*Mellenium Development Goals*). Dimana dalam era globalisasi dan pasar bebas dihadapkan pada perubahan-perubahan yang tidak menentu dan menuntut kita untuk selalu peka dan tanggap terhadap setiap perubahan dan yang perlu dipahami dalam perubahan kurikulum dari masa ke masa menyangkut perubahan struktural dan perubahan konsepsional dan kini juga kita dikenalkan dengan kurikulum baru yang diluncurkan pemerintah yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini tanpa digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

sebagai upaya mempersiapkan generasi Indonesia 2045 yaitu tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka.¹²

Sedikitnya ada 3 (tiga) alasan mendasar mengapa kurikulum perlu dikembangkan, yaitu :

1. *Demographic dividend* atau bonus demografi. BPS tahun 2011 menyebutkan, struktur penduduk Indonesia tahun 2010 usia 0-9 th sebesar 45,93 juta, sementara usia 9-14 tahun sebesar 43,55 juta. Apabila diproyeksikan 35-40 tahun ke depan, yakni memasuki 100 tahun, usia emas kemerdekaan kita (tahun 2045) mereka akan memasuki usia produktif. Negara maju di Eropa juga Amerika pada sekitar tahun tersebut dengan harapan hidup (*life expectancy*) yang tinggi, akan lebih banyak dibebani untuk menangani *elder people* (usia 70-an tahun ke atas yang *notabene* kurang produktif). Indonesia diuntungkan dengan jumlah usia produktif yang lebih banyak dan inilah sumber daya manusia yang tentunya harus disiapkan dan digarap secara matang menghadapi tantangan global.
2. *Global competitiveness* atau persaingan global. Berkaca dari hasil TIMSS ataupun PISA sebagai parameter prestasi siswa pada skala internasional, kita perlu mengkaji kembali bagaimana praktik pembelajaran yang sebenarnya terjadi. Prestasi siswa kita masih

¹². Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas 2045, Titik tekan pengembangan Kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Oleh karena itu, implementasi Kurikulum 2013 diyakini sebagai langkah strategis dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. *Paparan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan . Semarang, 21 September 2013

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

cukup memprihatinkan. yakni pada peringkat 39 (TIMSS th. 2011) dan peringkat 42 (PISA th. 2010) menuntut kita untuk “mengintip” praktik pembelajaran di negara-negara yang berhasil dalam menerapkan *scientific approach* (yakni: mengamati, menanya, menalar, dan menyusun jejaering/menyimpulkan) dalam membelajarkan siswanya.

Paradigma konstruktivisme, *collaborative learning*, serta *authentics assessment* menjadi pilar-pilar pendidikan dalam mencerdaskan anak bangsanya.

3. Pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan yang berbasis sumber daya (alam) mengarah pada pembangunan berbasis peradaban. Sumber daya alam bukan lagi sebagai modal pembangunan, akan tetapi peradabanlah yang akan menjadi modal pembangunan. Sumber daya manusia bukan lagi beban pembangunan, akan tetapi SDM beradablah yang menjadi modal pembangunan. Transformasi ini hanya bisa dilakukan dengan pendidikan. SDM beradab adalah SDM yang berpendidikan (berpengetahuan dan berketerampilan) dan berbudaya (berkarakter). Fenomena negatif yang mengemuka: perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian adalah bentuk lemahnya penguatan aspek afektif pendidikan yang bermuara pada dekadensi peradaban manusia.¹³

¹³. Kemendikbud, 2012

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Berkaitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter (*competency and character based curriculum*), yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman dan tuntutan teknologi. Oleh karena itu merupakan langkah yang positif ketika pemerintah merevitalisasi pendidikan karakter dalam seluruh jenis dan jenjang pendidikan, termasuk dalam pengembangan kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya. Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan berbasis kompetensi, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, dan masyarakatnya memiliki nilai tambah (added value), dan nilai jual yang bisa ditawarkan kepada orang lain dan bangsa lain di dunia, sehingga kita bisa bersaing, bersanding, bahkan bertanding dengan bangsa - bangsa lain dalam percaturan global.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendorong Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) memasukkan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam pelatihan kurikulum 2013. Muhadjir menjelaskan penerapan kurikulum 2013 implementasinya perlu didisinkronkan dengan kebijakan pemerintah, khususnya dalam penerapan penguatan pendidikan karakter. "Program PPK dapat menyatu dalam penerapan kurikulum pendidikan yang dijalankan," ujarnya dalam acara Sosialisasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemberian

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Bantuan Bimtek kurikulum 2013 bagi Guru SMA dan SMK, di LPMP, Jawa Tengah, Jumat (21/4).¹⁴

Implementasi kurikulum 2013 secara benar dipercaya dapat mengatasi permasalahan sumber daya manusia di negara kita. Implementasi kurikulum 2013 menjanjikan lahirnya generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif dan berkarakter. Dengan kreativitas, anak-anak bangsa mampu berinovasi secara produktif untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kurikulum 2013 dalam menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif, serta dalam meralisasikan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sangat ditentukan oleh berbagai faktor (kunci sukses). Kunci sukses tersebut antara lain berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, kreativitas guru, aktivitas peserta didik, sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan akademik yang kondusif, dan partisipasi warga sekolah.

Lingkungan yang kondusif dapat dikembangkan dengan berbagai cara, di antaranya memberikan pilihan bagi peserta didik yang cepat dan lambat untuk melakukan tugas pembelajaran, memberi pembelajaran perbaikan / remedi bagi peserta didik yang kurang berprestasi dan pengayaan bagi peserta didik yang berprestasi, maupun menciptakan kerjasama saling mengharagai antar teman sejawat. Dengan menciptakan suasana pembelajaran yang demikian diharapkan peserta didik dapat

¹⁴. Republika.co.id, 2017

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

termotivasi belajar sehingga dapat mengembangkan dirinya secara optimal.

Dalam implementasi kurikulum 2013, guru dan kepala sekolah merupakan dua elemen penting dalam kesuksesan implementasi kurikulum 2013, yang harus memperhatikan tiga hal penting dalam pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi, yaitu: (1) penetapan kompetensi yang akan dicapai; (2) pengembangan strategi untuk mencapai kompetensi; dan (3) evaluasi.

Kompetensi yang ingin dicapai merupakan pernyataan tujuan (goal statement) yang hendak diperoleh peserta didik dan menggambarkan hasil belajar (*learning outcomes*) pada aspek pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Strategi mencapai kompetensi adalah upaya untuk membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditetapkan, misalnya: membaca, menulis, mendengarkan, berkreasi dan mengobservasi, sampai terbentuk suatu kompetensi. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap pencapaian kompetensi bagi peserta didik.¹⁵

Kurikulum 2013 diterapkan dengan menelaah Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD) secara benar. Jadi guru perlu memetakan setiap KD terhadap KI dan SKL yang bersesuaian. Ketika hendak mengajar, perlu diperhatikan apa yang harus dicapai oleh siswa. Kegiatan belajar harus diarahkan untuk membentuk siswa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai tujuan Pendidikan Nasional (pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

¹⁵. Mulyasa, E., 2013 p 69-70

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

tentang Sistem Pendidikan Nasional). Jadi, ketika mengajarkan tentang sesuatu materi pelajaran, guru harus memikirkan bagaimana caranya agar siswa menjadi santun, bertanggung jawab, jujur, dan memiliki karakteristik akhlak mulia lainnya. Penerapan pendekatan saintifik dapat membantu guru untuk membentuk siswa yang cakap, kreatif, mandiri, serta memiliki ilmu yang dapat disesuaikan dengan perkembangan kemampuannya.

Adapun jumlah SMA di wilayah Kabupaten Serang, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun 2017, sebanyak 161 SMA yang terdiri dari 32 SMA Negeri dan 129 SMA Swasta. SMA Negeri dipilih sebagai objek penelitian karena SMA Swasta hanya satu sekolah yang sudah menggunakan kurikulum 2013 yaitu SMA Nurul Fikri Kabupaten Serang.

Peneliti juga membatasi penelitiannya pada SMA Negeri karena SMA Negeri merupakan sekolah yang banyak mengimplementasikan kebijakan kurikulum 2013. Maka sudah semestinya sekolah negeri memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa. Sekolah negeri di banyak daerah juga dijadikan acuan prestasi dan mutu pendidikan. Dalam MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), sekolah negeri seringkali ditunjuk menjadi leader bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di lingkungan sekolah itu berada.

Dalam penelitiannya, penulis memfokuskan diri hanya pada dua SMA Negeri yang akan menjadi objek penelitian yaitu : SMA Negeri 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande. SMA Negeri 1 Ciruas adalah sekolah yang merupakan SMA Negeri yang semula diprogramkan oleh Pemerintah

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kabupaten Serang untuk menjadi pilot proyek untuk implementasi kebijakan kurikulum 2013.

Sedangkan SMAN 1 Cikande sebagai sekolah yang baru berdiri delapan tahun yang lalu adalah SMA Negeri yang sedang berusaha keras mensejajarkan dirinya dengan SMA-SMA yang ada di Kabupaten Serang dan SMAN 1 Cikande adalah salah satu sekolah dari sepuluh sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang untuk mengimplementasikan kebijakan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2015-2016. Bermodalkan lokasi yang strategis, karena berada di Jalan Otonom Situterate-Bandung, Situterate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang Provinsi Banten, dan guru-guru muda yang enerjik, SMA Negeri 1 Cikande ini telah membuktikan dirinya diminati oleh siswa.

Hal ini terbukti dari animo siswa untuk mendaftar di sekolah ini pada tahun pelajaran 2016/2017 ini, SMA Negeri mendapat 10 rombongan (rombongan belajar / kelas), setara dengan apa yang diperoleh SMA Negeri 1 Ciruas yang relatif lebih lama berdiri.

Dengan diberlakukannya kurikulum 2013 di 1.273 SMA diseluruh Indonesia, Kabupaten Serang terdapat empat SMA sebagai sekolah sasaran pelaksanaan kurikulum 2013 untuk tahun pelajaran 2013-2014. SMAN 1 Ciruas telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sebagai sekolah uji coba penerapan kurikulum 2013. Uji coba tersebut dilaksanakan karena kurikulum tersebut masih tergolong

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

baru, dimana pada kurikulum tersebut lebih menitikberatkan pada penguatan karakter bangsa, menurut Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Daud Fansauri “Penunjukan SMAN 1 Ciruas tersebut didasari dari kesiapan dan ketersediaan sarannya yang dinilai telah memenuhi kriteria seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.”¹⁶

SMAN 1 Ciruas sudah sejak dini, menanamkan kepada siswanya agar berpandangan bahwa sekolah benar - benar bisa menjadi pusat pendidikan yang mempunyai wawasan kepedulian terhadap lingkungan dan budaya. Memulai semua kegiatan tersebut melalui proses kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler serta melalui pola pengembangan diri. Agar kelak dapat melahirkan anak - anak yang cerdas dan berbudi luhur, mempunyai bekal intreprenuer serta memahami budaya adat ketimuran bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

Adapun data kelulusan siswa SMAN 1 Ciruas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Kelulusan Siswa SMAN 1 Ciruas

No	Tahun Pelajaran	Jumlah Siswa	Daya Serap				Keterangan
			PT. Negeri	PT. Swasta	Dunia Usaha	Tidak Melanjutkan	
1	2014/2015	278	60	61	65	87	kurikulum 2006
2	2015/2016	290	72	55	75	88	kurikulum 2013
3	2016/2017	332	30	80	50	172	kurikulum 2013

Sumber : SMAN 1 Ciruas 2017

¹⁶. Baraya Pos Edisi 05Juni 2013

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SMA Negeri 1 Cikande merupakan sekolah yang terus melakukan pembenahan dan didukung oleh masyarakat yang merespon positif. SMAN 1 Cikande terus melakukan berbagai upaya guna mewujudkan visinya yaitu mewujudkan warga sekolah yang berakwa, cerdas, terampil dan berkarakter.

Adanya visi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kepala SMAN 1 Cikande, mengatakan, sekolah yang dipimpinnya saat ini terus melakukan pembenahan disegala bidang, dan mewujudkan sekolah berkarakter. "Untuk itu kami ingin merubah karakter para siswa di sini agar memiliki budi pekerti, rasa sopan santun yang tinggi, beragama, dan berimtaq," kata Mulyadi di Ruang kerjanya belum

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

lama ini. Lanjutnya, untuk dapat dengan membentuk siswa sesuai dengan tujuan pendidikan karakter bangsa, harus didukung dari semua pihak.

“Pendidikan karakter adalah usaha sekolah yang dilakukan secara bersama oleh guru dan pimpinan sekolah melalui semua mata pelajaran dan kegiatan lain di luar mata pelajaran untuk mengembangkan watak tabiat, akhlak, atau kepribadian peserta didik melalui internalisasi yang kita yakini serta peserta didik sebagai landasan untuk cara pandang berpikir, bersikap dan bertindak yang menunjukkan kemuliaanya”¹⁷

Adapun data kelulusan siswa SMAN 1 Cikande dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Data Kelulusan Siswa SMAN 1 Cikande

No	Tahun Pelajaran	Jumlah Siswa	Daya Serap				Keterangan
			PT. Negeri	PT. Swasta	Dunia Usaha	Tidak Melanjutkan	
1	2014/2015	149	26	24	60	39	kurikulum 2006
2	2015/2016	193	30	40	59	64	kurikulum 2006
3	2016/2017	237	35	42	50	110	kurikulum 2006

Sumber : SMAN 1 Cikande 2017

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0128/MPK/KR/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Implementasi kurikulum 2013 menetapkan bahwa kurikulum 2013 diimplementasikan secara bertahap dan terbatas mulai tahun pelajaran 2013/2014. Implementasi kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2013/2014 pada kelas X di 1.273 SMA sasaran dan sejumlah SMA yang melaksanakan secara mandiri. Selanjutnya pada tahun

¹⁷. Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyadi, S.Pd pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 09.00 WIB

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pelajaran 2014/2015, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 156928/MPK.A/KR/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Implementasi kurikulum 2013, pelaksanaan kurikulum 2013 diperluas di seluruh SMA pada kelas X dan XI.

Setelah melalui evaluasi dan masukan dari berbagai kalangan pelaksana di sekolah ditemukan beberapa kendala diantaranya kesiapan guru, ketersediaan buku, dan belum lengkapnya konsep kurikulum 2013.

Mempertimbangkan pentingnya kurikulum 2013 dan masih ditemukannya beberapa kendala teknis tersebut, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan kurikulum Tahun 2006 dan kurikulum 2013, melakukan penataan kembali implementasi kurikulum 2013 pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk SMA di Kabupaten Serang pada sampai pada tahun 2016/2017 hanya 14 SMA yang memberlakukan kurikulum 2013 dari 161 SMA yang ada di Kabupaten Serang.

Kepala sekolah sebagai elemen utama kesuksesan implementasi kurikulum 2013 terutama berkaitan dengan tugas dan kewenangannya dalam lingkup sekolah. Sebagai seorang pimpinan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah dalam menggunakan semua sumber daya sekolah dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai kesuksesan implementasi kurikulum 2013 diperlukan kepala sekolah yang mandiri, profesional dan bertanggung jawab dengan kemampuan manajemen serta kepemimpinan yang tangguh, agar mampu mengambil kebijakan dan prakarsa guna meningkatkan mutu sekolah.

Guru sebagai fasilitator menurut Rogers dalam Mulyasa sedikitnya harus memiliki tujuh sikap yaitu :

“tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinannya atau kurang terbuka, dapat lebih mempertahankan peserta didik terutama tentang aspirasi dan perasaannya, mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif dan kreatif bahkan sulit sekalipun, lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik seperti halnya terhadap bahan pembelajaran, dapat menerima balikan baik yang sifatnya positif maupun negatif dan menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri dan perilakunya, toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama proses pembelajaran, menghargai peserta didik meskipun biasanya mereka sudah tahu prestasi yang dicapainya”.¹⁸

Kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum 2013 dalam Mulyasa adalah kreativitas guru karena guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar sehingga kinerja guru disini sangat diperlukan terutama kreatifitas guru dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan yang dapat membuat siswa merasa mudah dalam proses pembelajaran di sekolah.¹⁹

¹⁸. Mulyasa, E. 2014, p 42

¹⁹. Mulyasa, E. . 2014, p 41

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pembiayaan dan sarana prasarana yang ada di sekolah adalah salah satu hal penting yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran hal ini terbukti dengan pendapat Mulyasa :

“keberhasilan implementasi kurikulum 2013 adalah lingkungan yang kondusif akademik, baik secara fisik maupun non fisik. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari seluruh warga sekolah, kesehatan sekolah, serta kegiatan - kegiatan yang terpusat pada peserta didik merupakan iklim yang dapat membangkitkan gairah dan semangat belajar”.²⁰

Kondisi siswa dapat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum hal ini di buktikan oleh Mulyasa, dimana keberhasilan implementasi kurikulum 2013 adalah aktivitas siswa, guru harus mampu mendisiplinkan siswa, terutama disiplin diri, guru harus mampu membina peserta didik mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan standar perilakunya dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin dalam setiap aktivitasnya.²¹

Komite sekolah adalah lembaga/badan khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Komite sekolah ini terdiri dari unsur-unsur: wakil orang tua siswa dan masyarakat.

Komite sekolah merupakan wadah yang berfungsi sebagai forum untuk mempresentasikan segala aspirasi, prakarsa, dan partisipasi para

²⁰ Ibid, hlm.53

²¹ Ibid, hlm.45

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini tanpa digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

stakeholder sekolah secara proporsional. Berdasarkan definisi diatas komite sekolah adalah badan mandiri yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* pendidikan, yang mewadahi peran serta masyarakat untuk meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, tokoh masyarakat dan partisipasi para guru. Wadah tersebut berfungsi sebagai forum resmi dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, pengambilan keputusan, pemerataan.

Dengan berbagai alasan tersebut peneliti ingin sekali menggali lebih jauh tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Serang dan permasalahan yang di alami oleh implementator kebijakan kurikulum 2013 terutama kepala sekolah dan guru. Maka peneliti terinspirasi untuk mengadakan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Serang” studi multi kasus di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, implementasi kurikulum 2013 sekolah menengah atas Kabupaten Serang di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande, maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kepimpinan kepala sekolah terhadap implementasi kurikulum 2013.
2. Sikap guru sebagai implementor kurikulum 2013.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3. Profesionalitas dan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum 2013.
4. Pembiayaan dan sarana prasarana dalam implementasi kurikulum 2013.
5. Fasilitas dan sumber belajar yang memadai dalam kurikulum 2013.
6. Keterlibatan komite sekolah dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka fokus penelitian ini dibatasi pada :

1. Kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi kurikulum 2013.
2. Sikap karakter profesionalisme dan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum 2013.
3. Pembiayaan dan sarana prasarana penunjang dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013.
4. Keterlibatan komite sekolah dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam bidang pendidikan. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk mengetahui implementasi dari teori tentang kebijakan kurikulum 2013 dan implementasi kebijakan publik.
2. Untuk menambah hasil kajian tentang implementasi kebijakan - kebijakan kurikulum 2013 dan sebagai pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan informasi bagi sekolah dan pihak lain yang berkecimpung dalam dunia pendidikan
2. Sebagai masukan bagi stake holder dalam merumuskan dan membuat kebijakan dalam bidang pendidikan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kebijakan

Kebijakan (policy) diberi arti yang bermacam-macam. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai “a project programs of goals, values, practices” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek yang terarah).²² Sementara itu Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan. Mirip dengan definisi Friedrich diatas, James Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.²³

Amara Raksapaya mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan (Islamy, 2014).²⁴ Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen yaitu :

-
22. Subarsono, AG. 2015 p 3
23. Solichin A.W. 2008 p 3
24. Irfan Islamy. 2014 p 17

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Makna kebijaksanaan menurut Prof. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt ialah *a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it.*²⁵ Yang terakhir dari United Nation, 1975; Jika kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak, maka dalam maknanya seperti itu kebijaksanaan merupakan “suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, atau suatu rencana”.²⁶

Dapat disimpulkan dari berbagai pengertian di atas, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dalam prakteknya kata kebijakan seringkali mempunyai dua pilihan dalam penggunaannya, yaitu kebijakan negara dan kebijakan publik yang secara substantif tidak ada perbedaan diantara keduanya. Thomas R. Dye dalam Irfan Islamy,²⁷ mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pengertian ini mirip dengan yang diartikan oleh George C.

²⁵ Solichin A.W. 2008 p 3

²⁶ Ibid,2

²⁷ Irfan Islamy. 2014 p 18

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Irfan Islamy.²⁸ yaitu apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

Berkaitan dengan definisi kebijakan yang telah dikemukakan sebelumnya, Anderson dalam Irfan Islamy.²⁹ mengatakan bahwa kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Masih menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut adalah:

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijaksanaan negara berisi tindakan atau pola-pola tindakan para pejabat pemerintah.
3. Kebijaksanaan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Kebijaksanaan negara bisa bersifat positif maupun negatif.
5. Kebijaksanaan negara setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundangundangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

²⁸ Ibid...../8

²⁹ Irfan Islamy. 2014 p 19

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Sifat kebijaksanaan yang otoritatif ini hampir sama dengan definisi kebijaksanaan negara yang disampaikan oleh David Easton dalam Irfan Islamy.³⁰, yaitu pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Perlu diketahui bahwa kebijakan publik (*public policy*) ini muncul disebabkan oleh tiga hal, antara lain karena ada tuntutan dari bawah atau dari masyarakat, adanya kepentingan dari elite penguasa, dan ada konflik dalam masyarakat. Jadi kebijakan publik muncul untuk mengakomodir kepentingan masyarakat maupun untuk menyelesaikan masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Dapat didefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan (1) bagaimana pemerintah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, (2) mengapa pemerintah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, (3) apa akibat dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh pemerintah. Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah tersebut tentunya dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik. Dari beberapa pengertian kebijaksanaan negara atau kebijakan publik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan negara (*public policy*) itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Selanjutnya untuk membuat kebijakan memerlukan proses yang dikenal dengan proses kebijakan. Banyak model yang telah dirancang

³⁰ Ibid.....19

PERINGATAN !!!

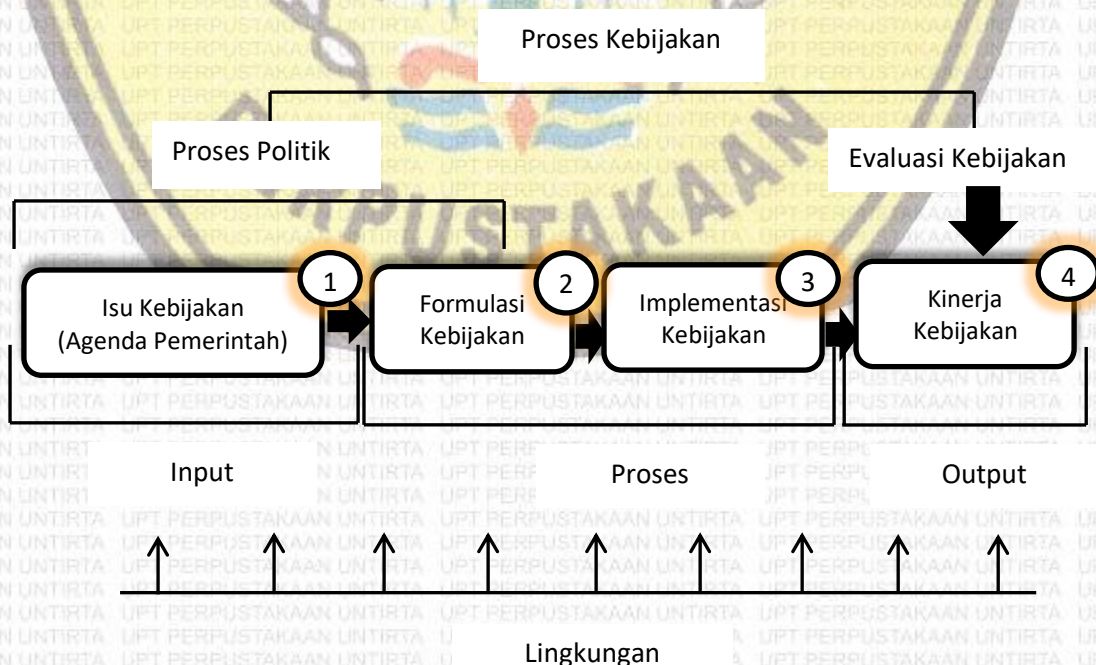
1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

oleh para ilmuwan untuk mengimplementasikan proses kebijakan.
Menurut Nugroho (2011) :³¹

“model yang dikembangkan para ilmuwan kebijakan publik seperti Anderson dkk (1978), Dunn (2000), Paton dan Savicky (1983), Dye (1978), Meier dalam Porter dan Hick (2003), Grindle dan Thomas (1991), mempunyai satu kesamaan, yaitu bahwa proses kebijakan berjalan dari formulasi menuju implementasi, untuk mencapai kinerja kebijakan. Uniknya para akademisi tersebut tidak memasukan kinerja kebijakan melainkan langsung pada evaluasi kebijakan. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa para akademisi tersebut menilai bahwa kinerja adalah proses yang pasti terjadi dalam kehidupan publik, bahkan tanpa harus disebutkan”.

Namun demikian, ada satu pola yang sama bahwa model formal proses kebijakan adalah dari “gagasan kebijakan”, “formulasi dan legalisasi kebijakan”, “implementasi kebijakan”, baru kemudian menuju pada kinerja seperti yang disampaikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1.
Proses Kebijakan



Sumber : Nugroho 2011

³¹ Riant Nugroho. 2011 p 497

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2.2. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Sebagai Produk Kebijakan Publik

Menurut Rian Nugroho Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut (2011).³²

Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd dan Anne-Marie O'Neil (2000), kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi bangsa-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.³³

Definisi kebijakan publik yang banyak diikuti adalah definisi Thomas R. Dye (1995) yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan hasil kebijakan yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.³⁴

Begitupun juga kurikulum 2013 sebagai sebuah kebijakan publik dalam ranah pendidikan adalah sebuah pilihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

³² Ibid.....,32

³³ Ibid.....,35

³⁴ Ibid.....,36

PERINGATAN !!!

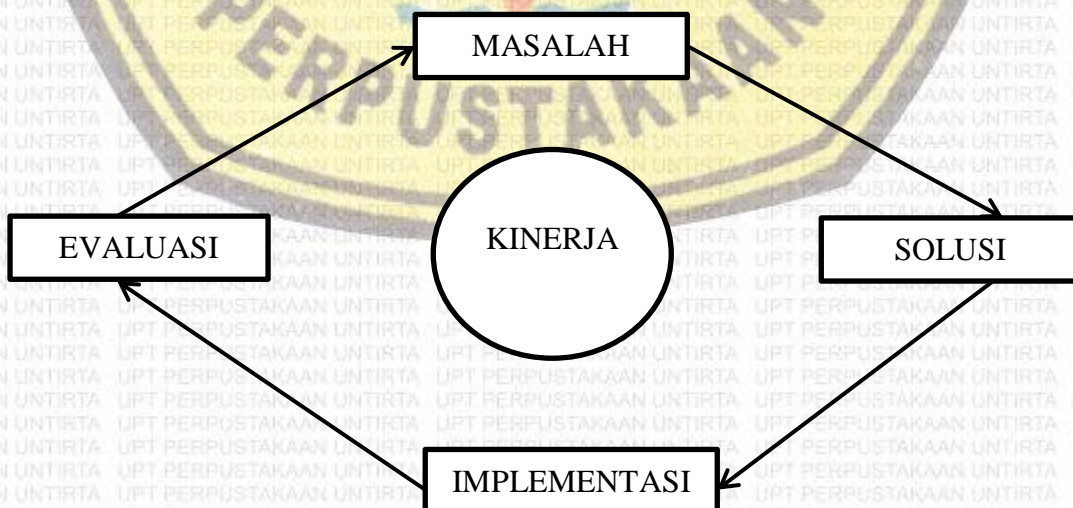
1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Menurut JE.Hosio dalam Rohman

“ Kebijakan pendidikan (*Education Policy*) adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Wujud dari kebijakan pendidikan ini biasanya berupa undang-undang pendidikan, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya menyangkut pendidikan”³⁵.

Masih menurut Rohman secara teoritik, proses pemecahan atas masalah pendidikan melalui kebijakan dapat dilaksanakan secara sistematis pragmatik; namun secara empiris sering kali berjalan kurang efektif. Efektifitas kebijakan pendidikan selama ini berlangsung tanpa evaluasi dan monitoring. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya mengendalikan perilaku birokrasi pengelola kebijakan pendidikan. Lebih jelasnya, siklus pemecahan masalah pendidikan akan dijelaskan melalui gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2
Pemecahan Masalah Pendidikan Melalui Pendidikan



Sumber : Arif Rohman dan Teguh Wiyono, *Education Policy in Decentralization Era*. 2010

³⁵ Rohman, Arif Wiyono, 2010 p 2

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini tanpa digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Selanjutnya kebijakan pendidikan dapat dikatakan sebagai kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara - negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.

Dalam hal ini fungsi kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan. Diperkuat oleh Fredrickson dan Hart kebijakan adalah: "suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan - hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan."³⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang - undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang menjadi lebih baik. Kebijakan pendidikan diperlukan agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pembenahan dan perkembangan Pendidikan di Indonesia pada saat sekarang selalu mengalami perkembangan kearah penyempurnaan, salah satunya adalah peyempurnaan kurikulum, kurun waktu 15 tahun

³⁶ Ibid,.....5

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

terakhir kurikulum sudah mengalami perubahan kebijakan sebanyak tiga kali yaitu, kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan sekarang ini muncul kurikulum 2013 yang lahir berdasarkan peraturan presiden nomor 8 tahun 2012 yaitu tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

Pemerintah membuat kebijakan publik bertujuan untuk memberdaya, mensejahterakan atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau pemerintah. Untuk itulah, pemerintah membuat bermacam-macam kebijakan yang berkenaan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik dimaksudkan memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satu aspek kehidupan yang diatur oleh kebijakan publik adalah aspek pendidikan yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia.

Salah satu kebijakan sekarang ini adalah perubahan kurikulum 2013 (kompas.com). Perubahan kurikulum ini sudah berjalan dari tahun 2013 dan sudah dimulai pelaksanaannya mulai dari SD, SMP dan SMA. Penjelasan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada Bagian konsideran dijelaskan bahwa pentingnya dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, dan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional ini adalah pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pada pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa “Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.” Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 35 dinyatakan bahwa “kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran tersebut diperlukan suatu kurikulum yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (19) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

2.3. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan terkait dengan kegiatan membuat pilihan kebijakan beserta tahapannya, yang mempertimbangkan berbagai faktor dalam lingkungan kebijakan. Menurut Harold Laswell, pertimbangan tersebut berkenaan dengan *who get what, when and how*. Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Oleh karena itu, dalam setiap pembuatan kebijakan akan bersinggungan dengan kepentingan publik yang kompleks. (Dikutip Dye, 1981)³⁷

Subarsono (2015)³⁸ menjelaskan kerangka kerja kebijakan, yang dalam realitasnya ditentukan oleh beberapa aspek sebagai berikut.

- 1) Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka akan sulit mencapai kinerja kebijakan yang diinginkan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
- 2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung beberapa preferensi nilai akan lebih sulit untuk dicapai dibandingkan dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai saja.
- 3) Sumberdaya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumberdaya: finansial, material dan infrastruktur lainnya.
- 4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses pembuatan dan penetapan kebijakan.
- 5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik pada tempat atau wilayah kebijakan tersebut diimplementasikan.

³⁷ Subarsono, 2015 p 3

³⁸ Ibid,.....6

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi implementasi akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Strategi tersebut dapat bersifat *top-down* atau *bottom up approach*; otoriter atau demokratis.

Selanjutnya, Dunn (2004)³⁹ menjelaskan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), dengan menentukan masalah publik apa yang akan diselesaikan;
- 2) Formulasi kebijakan, dengan menentukan kemungkinan kebijakan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah melalui proses *forecasting* (konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan ditentukan);
- 3) Adopsi kebijakan, menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para eksekutif dan legislatif, yang sebelumnya dilakukan proses usulan atau rekomendasi kebijakan;
- 4) Implementasi kebijakan, tahapan dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh organisasi atau unit administratif tertentu dengan memobilisasi dana dan sumberdaya untuk mendukung kelancaran implementasi. Pada tahap ini, proses pemantauan (*monitoring*) kebijakan dilakukan;
- 5) Evaluasi kebijakan, adalah tahap melakukan penilaian kebijakan atau kebijakan yang telah diimplementasikan.

³⁹ Dunn, William. (2009)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Shafritz dan Russel menjelaskan proses pembuatan kebijakan

sebagai sebuah siklus, dimulai dari :

- 1) Agenda setting dimana masalah - masalah publik diidentifikasi menjadi masalah kebijakan,
- 2) Memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan,
- 3) Melaksanakan kebijakan (implementasi),
- 4) Evaluasi kebijakan (baik berupa program atau kegiatan) beserta dampaknya, dan
- 5) Melakukan umpan balik, yakni memutuskan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan, direvisi atau dihentikan.⁴⁰

Proses kebijakan publik menurut Dunn (2004), pada praktiknya tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Shafritz dan Russel (1997), kecuali menetapkan pelaksanaan proses umpan balik untuk menentukan kelanjutan kebijakan yang sudah ada. Dunn juga menekankan pentingnya umpan balik, namun tidak secara eksplisit dalam satu tahapan khusus, begitu pula dengan Anderson (1979) yang memberi istilah *agenda setting* dengan formulasi masalah.⁴¹

Menurut Mustopadidjaja proses kebijakan publik bukanlah semata-mata kegiatan teknis teknokratis, tetapi juga kegiatan sosiopolitis yang dinamis dan berlangsung dalam sistem kelembagaan yang kompleks. Manajemen proses kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan

⁴⁰ Mustopadidjaja A.R, 2003 p 2

⁴¹ Ibid

PERINGATAN !!!

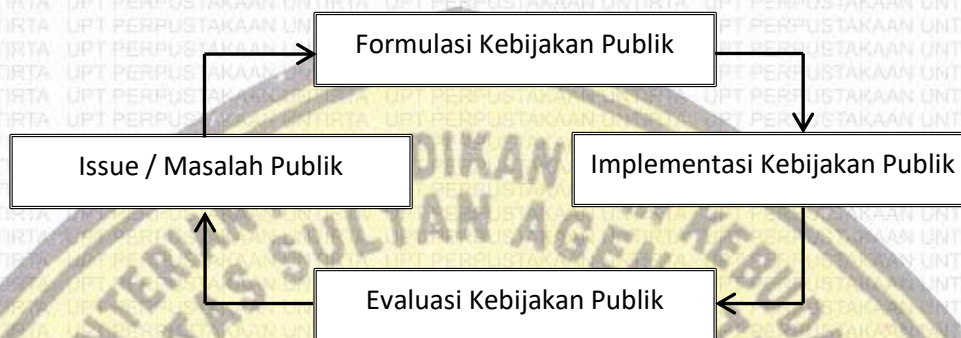
1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini tanpa digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

evaluasi kebijakan yang kesemuanya bermula dari issue / masalah publik.⁴² Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3
Rangkaian Kegiatan Kebijakan Publik



Sumber : Mustopodidjaja (2003 : 3)

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan sebuah tahapan dari kebijakan publik setelah sebelumnya adalah perumusan kebijakan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tahap implementasi merupakan tahap dimana sebuah kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan, kemudian dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya. Tahap implementasi ini adalah suatu tahapan yang penting dalam sebuah kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana para pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sesuai dengan perumusan kebijakan yang sebelumnya telah dilakukan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai

⁴² Ibid

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kelompok. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini pun diartikan berbeda-beda oleh para ahli.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Sementara itu Grindle dalam Winarno (2007:146) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) dalam Wahab (2005:65), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatankegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Dari ketiga pendapat para ahli di atas, dapat disederhanakan bahwa pendapat Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier tentang implementasi lebih terfokus pada apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut secara tegas, agar proses pelaksanaannya yang berupa kegiatan-kegiatan tidak melenceng dari apa yang telah ditetapkan. Sedangkan, tidak jauh berbeda dengan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Van Meter dan Van Horn mengemukakan selain proses dan pencapaian tujuan, implementasi juga harus melihat kelangsungan dari kebijakan tersebut agar dapat ditransformasikan menjadi pola-pola operasional, intinya bahwa implementasi kebijakan tersebut pada dasarnya harus berkelanjutan.

Pendapat dari Grindle juga memiliki persamaan dengan pendapat Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang memberikan penjelasan bahwa implementasi kebijakan harus berfokus pada tujuan kebijakan, agar *output* dan *outcome* tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Dari paparan berbagai definisi implementasi kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

yang merupakan tindak lanjut dari suatu kebijakan setelah kebijakan tersebut ditetapkan guna merealisasikan program sebagai hasil dari aktivitas pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Dari definisi tersebut, dalam penelitian ini implementasi kebijakan kurikulum 2013 pada awalnya berwujud dari Amanat UUD 1945 yaitu dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada akhirnya dirumuskanlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 60 Tahun 2014 tentang Implementasi kurikulum 2013.

Kebijakan Implementasi kurikulum 2013 ini sejalan dengan definisi yang sebelumnya telah diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, dimana setelah adanya sebuah keputusan maka selanjutnya kebijakan tersebut akan ditransformasikan secara operasional ke dalam kegiatan, dalam hal ini adalah kebijakan Implementasi kurikulum 2013.

2.5. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan.

Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Oleh karena itu penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. Pada umumnya, model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan.


Model Merilee S. Grindle dalam Agustino (2012:154) mengemukakan bahwa ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:141) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu adanya tujuan dan sasaran, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan. Dalam implementasi ini, terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan pelaksanaan, antara lain :

- a. Standar dan tujuan kebijakan merupakan apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
- b. Sumber daya, terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya finansial juga ikut menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
 - c. Komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik.
 - d. Karakteristik agen pelaksana, yaitu pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam proses implementasi kebijakan publik.
 - e. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, ketiga kondisi ini mengacu pada sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan suatu kebijakan publik yang telah diterapkan.
 - f. Sikap dan kecenderungan para pelaksana, yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana kebijakan banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik.

Model implementasi kebijakan publik selanjutnya adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Indiahono (2009:31) yang menunjuk pada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjalin komunikasi yang efektif. Terdapat tiga indikator yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.

Tiga indikator tersebut adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

- b. Sumber daya, setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat implementasi kebijakan adalah staf, informasi, wewenang, fasilitas, dan anggaran (*budgetary*).
- c. Disposisi, yaitu kecenderungan perilaku atau watak pelaksana kebijakan. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan adalah pengangkatan birokrat dan insentif.
- d. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu *Standard Operational Procedure (SOP)* dan *fragmentasi*.

Selanjutnya adalah model implementasi kebijakan yang dapat dikatakan telah merangkum seluruh model-model implementasi kebijakan yang telah ada sebelumnya, yaitu model implementasi kebijakan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang sering disebut sebagai *Frame Work for Implementation Analysis*. Dalam Agustino (2012:144–149) Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Model ini memiliki tiga variabel pokok, antara lain:

- a. Karakteristik masalah atau tingkat kesulitan masalah yang harus dipecahkan melalui implementasi suatu kebijakan. Semakin sulit masalah yang harus dipecahkan tentu akan semakin kecil peluang keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel ini meliputi ketersediaan teknologi dan teori teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, persentase populasi, dan perubahan perilaku yang diharapkan.
- b. Daya dukung peraturan atau kemampuan kebijakan dalam merespon masalah yang akan dipecahkan. Semakin jelas tujuan, dukungan, sumber daya, dan lain-lain maka akan semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel ini meliputi kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, teori kausalitas, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan di antara instansi-instansi pelaksana, aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang, rekrutmen dan akses formal pihak-pihak luar.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

c. Lingkungan kebijakan yang mempengaruhi implementasi. Semakin baik dukungan lingkungan kebijakan, maka akan semakin besar pula peluang keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Variabel ini meliputi kondisi sosio-ekonomi, perhatian terhadap kebijakan, dukungan publik, sikap dan sumber daya, dukungan kewenangan, serta komitmen dan kepemimpinan pejabat pelaksana.

Ketiga variabel di atas merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, namun penekanannya masih sangat bergantung kepada tipologi pelaksana dan masih bersifat administratif dengan menitikberatkan pada bagaimana cara untuk mencapai tujuan.

Ketiga variabel ini disebut sebagai variabel bebas (*independent variable*), dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui yang disebut sebagai variabel terikat (*dependent variable*). Variabel terikat yang ditunjukkan melalui tahapan dalam proses implementasi mencakup:

(i) *output* kebijakan badan pelaksana, (ii) kesediaan kelompok sasaran mematuhi *output* kebijakan, (iii) dampak nyata *output* kebijakan, (iv) dampak *output* kebijakan sebagaimana yang dipersepsikan, dan (v) perbaikan. Inti dari pemikiran Mazmanian dan Sabatier ini dapat dilihat pada gambar berikut :

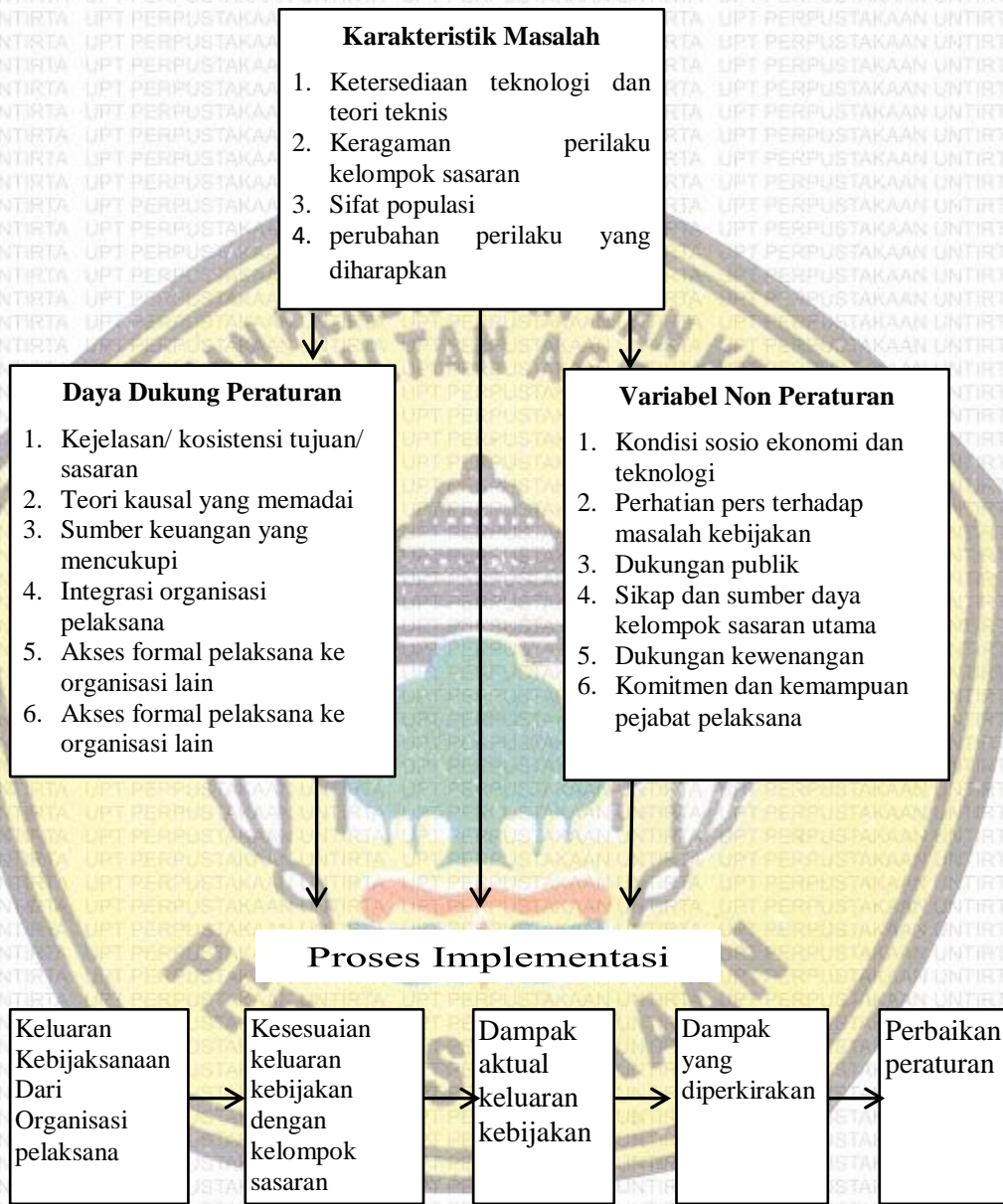
PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Gambar 2.4
Model Implementasi kebijakan Menurut Sabatier dan Mazmanian



Sumber : Samodra Wibawa, dkk, 2005

Model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier ini termasuk dalam kategori model *top-down*. Model *top-down* merupakan suatu pola kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat. Dalam

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

model *top-down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisasi dan dimulai dari aktor tingkat pusat yang keputusannya diambil pula dari tingkat pusat. Model *top-down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratoradministrator atau birokrat-birokrat pada level di bawahnya.

Model milik Mazmanian dan Sabatier ini dikenal dan dianggap sebagai salah satu model *top-down* yang paling maju dan paling lengkap dalam menggabungkan berbagai variabel yang ada dari hasil peneliti sebelumnya. Sehingga dalam penelitian ini, dimana kebijakan kurikulum 2013 merupakan sebuah bentuk kebijakan *topdown*, maka peneliti menggunakan model ini karena dirasa paling tepat untuk mengungkap fenomena implementasi kebijakan kurikulum 2013 beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dan juga kendala apa saja yang mungkin dihadapi dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013.

Model implementasi *top-down* digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat implementasi sukses ataupun gagal. Kebijakan kurikulum 2013 merupakan kebijakan yang termasuk pula dalam model *top-down* karena kebijakan ini dibuat oleh pemerintah dan keputusannya diambil oleh pihak pemerintah pusat. Dengan menggunakan model milik Mazmanian dan Sabatier, akan dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan kurikulum 2013.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier ini juga termasuk dalam mekanisme paksa. Mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli. Karena kebijakan kurikulum 2013 merupakan sebuah kebijakan dengan model *top-down* yang memiliki pola dari atas ke bawah, maka mekanisme yang digunakan adalah mekanisme paksa dimana pemerintah pusat membuat kebijakan kurikulum 2013 untuk dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakannya, bukan mekanisme pasar yang orientasinya kepada model *bottom-up* dimana pelaksanaannya berpola dari bawah ke atas atau dari rakyat ke pemerintah.

Penggunaan model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier ini diambil oleh peneliti dengan dasar pemikiran bahwa tidak ada pilihan model yang terbaik, yang ada adalah pilihan-pilihan yang harus kita pilih secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan kebijakannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih model ini karena unsur-unsur pokok dalam suatu implementasi kebijakan terutama karakteristik masalah, daya dukung peraturan, variabel lingkungan dan juga proses implementasi lebih dibahas secara detail dalam model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier.

2.6. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. (Permendikbud No 69 tahun 2013).

Selanjutnya menurut Taba (dalam Munir, 2010) kurikulum adalah rencana untuk pembelajaran.⁴³ Finch (1989) menambahkan kurikulum diartikan sebagai rangkaian atau susunan dari kegiatan pembelajaran dan pengalaman dari siswa dibawah naungan atau arahan dari sekolah.⁴⁴ Lazimnya kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya (Nasution, 2008).⁴⁵ Selain itu, Hidayat (2013) mendefinisikan kurikulum sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun.⁴⁶

Dalam hal ini kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan.⁴⁷ Kurikulum merupakan acuan dalam mengatur proses pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik untuk mempermudah proses pembelajaran.⁴⁸ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah seperangkat dokumen yang berisikan rambu-

⁴³ Munir, Abdullah, (2010)

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Nasution, S.. (2008)

⁴⁶ Hidayat, Soleh (2013)

⁴⁷ Sariono, (2014)

⁴⁸ Rohmanudin, (2014).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

rambu atau pedoman dalam menyusun perangkat pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Kurikulum ini dipandang sesuai dengan program pendidikan yang berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Perbedaan tersebut nampak pada beberapa karakteristik kurikulum 2013 yakni pendekatan saintifik dan penilaian otentik dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 serentak diterapkan di semua jenjang pendidikan formal pada tahun ajaran 2014/2015 setelah dilakukan uji coba kurikulum di beberapa sekolah terpilih pada Juli 2013. Implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok yakni pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi.

Perubahan empat elemen utama yang ditonjolkan termasuk diantaranya adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Menurut Hidayat (2013) orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (*attitude*), keterampilan (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*).

Pada kurikulum 2013, metode pendidikan yang diterapkan tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*) namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan budaya bangsa, dan sebagainya. Implementasi kurikulum 2013 diharapkan mampu menghasilkan insan produktif, kreatif,

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dan inovatif untuk bersaing dalam dunia Internasional. Hal itu dimungkinkan karena kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi, secara prinsip konseptual memiliki beberapa kelebihan.

Menurut Mulyasa (2013)⁴⁹ menyatakan bahwa keunggulan kurikulum 2013 yaitu penggunaan pendekatan saintifik, berbasis karakter, dan menggunakan pendekatan kompetensi pada bidang studi tertentu. Kelebihan kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kelebihan kurikulum 2013 di pandang dari faktor internal adalah peserta didik diharapkan mampu memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk bersaing di dunia Internasional.

Menurut Kurniasih dan Sani terdapat beberapa hal penting dari perubahan atau penyempurnaan kurikulum tersebut, antara lain keaktifan siswa, penilaian secara holistik, adanya pendidikan karakter, kompetensi yang sesuai kebutuhan, sistem evaluasi yang baik. Sedangkan untuk faktor eksternal kelebihan kurikulum 2013 adalah peserta didik mampu dan siap bersaing di kancah internasional dengan negara-negara lain, sesuai dengan kebutuhan modern saat ini⁵⁰.

⁴⁹ Mulyasa, 2013

⁵⁰ Kurniasih, Imas dan Sani, Berlin. (2014).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Menurut Permendikbud No 69 Tahun 2013 kurikulum 2013 Sekolah menengah Atas dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;
3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran;
6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
7. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antarmatapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tujuan kurikulum 2013 Sekolah menengah Atas untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/ mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/ mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran.

Menurut kepala unit implementasi kurikulum pusat Kemendikbud Tjipto Sumadi⁵¹, perubahan lain antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya untuk SMA yaitu penjurusan tak lagi dilakukan pada kelas II namun dimulai sejak dari kelas I. Adapun struktur kurikulum, terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar dan kalender pendidikan mata pelajaran terdiri atas :

1. Mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik disatu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan.
2. Mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
3. Mata pelajaran pilihan lintas kelompok minat

⁵¹ Dokumen Kurikulum 2013

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Untuk menerapkan konsep kesamaan antara SMA/MA dan SMK/MAK maka dikembangkan kurikulum pendidikan menengah yang terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan.

Mata pelajaran wajib sebanyak 9 mata pelajaran dengan beban belajar 18 jam per minggu.

Konten kurikulum (Kompetensi Inti/KI dan KD) dan kemasankonten serta label konten (mata pelajaran untuk mata pelajaran wajib bagi SMA/MA dan SMK/MAK adalah sama. Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik (SMA) serta pilihan akademik vokasional (SMK).

Mata pelajaran pilihan memberikan corak kepada fungsi satuan pendidikan dan didalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta didik. Beban belajar di SMA untuk kelas X, XI dan XII masing-masing 43 jam belajar per minggu. Satu jam belajar adalah 45 menit.



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Adapun struktur kelompok mata pelajaran wajib adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Struktur kurikulum 2013

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
		X	XI	XII
Kelompok A Wajib				
1.	Pendidikan Agama	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2
6.	Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B Wajib				
7.	Seni Budaya	2	2	2
8.	Prakarya	2	2	2
9.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok Wajib per minggu		23	23	23
Kelompok Peminatan				
Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA)		20	20	20
Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi (SMK)		28	28	28

Keterangan: Mata Pelajaran Seni Budaya dapat memuat Bahasa Daerah

Kompetensi dasar mata pelajaran wajib memberikan kemampuan dasar yang sama bagi tamatan Pendidikan Menengah antara mereka yang belajar di SMA dan SMK. Struktur Kelompok Peminatan Akademik (SMA) memberikan keleluasaan bagi peserta didik sebagai subjek tetapi juga berdasarkan pandangan bahwa semua disiplin ilmu adalah sama dalam kedudukannya.

Kompetensi dasar mata pelajaran wajib memberikan kemampuan dasar yang sama bagi tamatan pendidikan menengah antara mereka yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Bagi mereka yang memilih SMA tersedia pilihan kelompok peminatan (sebagai ganti jurusan) dan pilihan antar kelompok peminatan dan bebas.

Nama kelompok peminatan digunakan karena memilih keterbukaan untuk belajar diluar kelompok tersebut. Sedangkan nama jurusan memiliki konotasi terbatas pada apa yang tersedia pada jurusan tersebut dan tidak boleh mengambil mata pelajaran diluar jurusan.

Struktur kelompok peminatan akademik (SMA) memberikan keleluasaan bagi peserta didik sebagai subjek, tetapi juga berdasarkan pandangan bahwa semua disiplin ilmu adalah sama dalam kedudukannya. Nama kelompok minat diubah dari IPA, IPS dan Bahasa, menjadi Matematika, Sosial dan Bahasa. Nama-nama ini tidak diartikan sebagai nama kelompok disiplin ilmu karena adanya berbagai pertentangan filosofis dalam pengelompokan disiplin ilmu.

Kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi dan untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Adapun struktur kelompok mata pelajaran peminatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Struktur Kelompok Mata Pelajaran Peminatan

MATA PELAJARAN			Kelas		
			X	XI	XII
Kelompok Wajib			23	23	23
Peminatan Matematika dan Sains					
I	1	Matematika	3	4	4
	2	Biologi	3	4	4
	3	Fisika	3	4	4
	4	Kimia	3	4	4
Peminatan Sosial					
II	1	Geografi	3	4	4
	2	Sejarah	3	4	4
	3	Sosiologi dan Antropologi	3	4	4
	4	Ekonomi	3	4	4
Peminatan Bahasa					
III	1	Bahasa dan Sastra Indonesia	3	4	4
	2	Bahasa dan Sastra Inggris	3	4	4
	3	Bahasa dan Sastra Asing lainnya	3	4	4
	4	Sosiologi dan Antropologi	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan					
		Pilihan Pendalaman Minat atau Lintas Minat	6	4	4
Jumlah Jam Pelajaran Yang Tersedia			73	75	75
Jumlah Jam Pelajaran Yang harus Ditempuh			41	43	43

Sumber : Dokumen kurikulum 2013

Mata pelajaran kelompok A dan C adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran 1). Seni Budaya, 2). Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, dan 3). Prakarya dan Kewirausahaan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan tersebut.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Sedangkan untuk mata pelajaran pilihan lintas kelompok minat, kurikulum SMA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan kelompok peminatan, pilihan lintas minat atau pilihan pendalaman minat.

Kelompok peminatan terdiri atas peminatan matematika dan ilmu alam, peminatan ilmu-ilmu sosial, serta peminatan bahasa dan budaya. Sejak kelas X peserta didik sudah harus memilih kelompok peminatan yang akan dimasuki. Pemilihan peminatan berdasarkan nilai rapor di SMP/MTs atau nilai UN SMP/MTs atau rekomendasi guru BK di SMP/MTs atau hasil tes penempatan (*placement test*) ketika mendaftar di SMA atau tes bakat minat oleh psikolog atau rekomendasi guru BK di SMA. Pada akhir minggu ketiga semester pertama peserta didik masih mungkin mengubah pilihan peminatannya berdasarkan rekomendasi para guru, ketersediaan guru dan kelas. Untuk sekolah yang mampu menyediakan layanan khusus maka setelah akhir semester peserta didik masih mungkin mengubah pilihan peminatannya.

Semua mata pelajaran yang terdapat dalam suatu kelompok peminatan yang dipilih peserta didik harus diikuti. Setiap kelompok peminatan terdiri atas 4 (empat) mata pelajaran dan masing-masing mata pelajaran berdurasi 3 jam pelajaran untuk kelas X, dan 4 pelajaran untuk kelas XI dan XII. Untuk mata pelajaran pilihan lintas minat atau pendalaman minat kelas X, jumlah jam pelajaran pilihan per minggu

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

berdurasi 6 jam pelajaran yang dapat diambil dengan pilihan sebagai berikut:

- a. Dua mata pelajaran di luar kelompok peminatan yang dipilihnya tetapi masih dalam kelompok peminatan lainnya.
- b. Mata pelajaran pendalaman kelompok peminatan yang dipilihnya.

Sedangkan pada kelas XI dan XII, peserta didik mengambil pilihan lintas minat atau pendalaman minat dengan jumlah jam pelajaran pilihan per minggu berdurasi 4 jam pelajaran yang dapat di ambil yaitu sebagai berikut:

- a. Satu mata pelajaran di luar kelompok peminatan yang dipilihnya tetapi masih dalam kelompok peminatan lainnya.
- b. Mata pelajaran pendalaman kelompok peminatan yang dipilihnya.

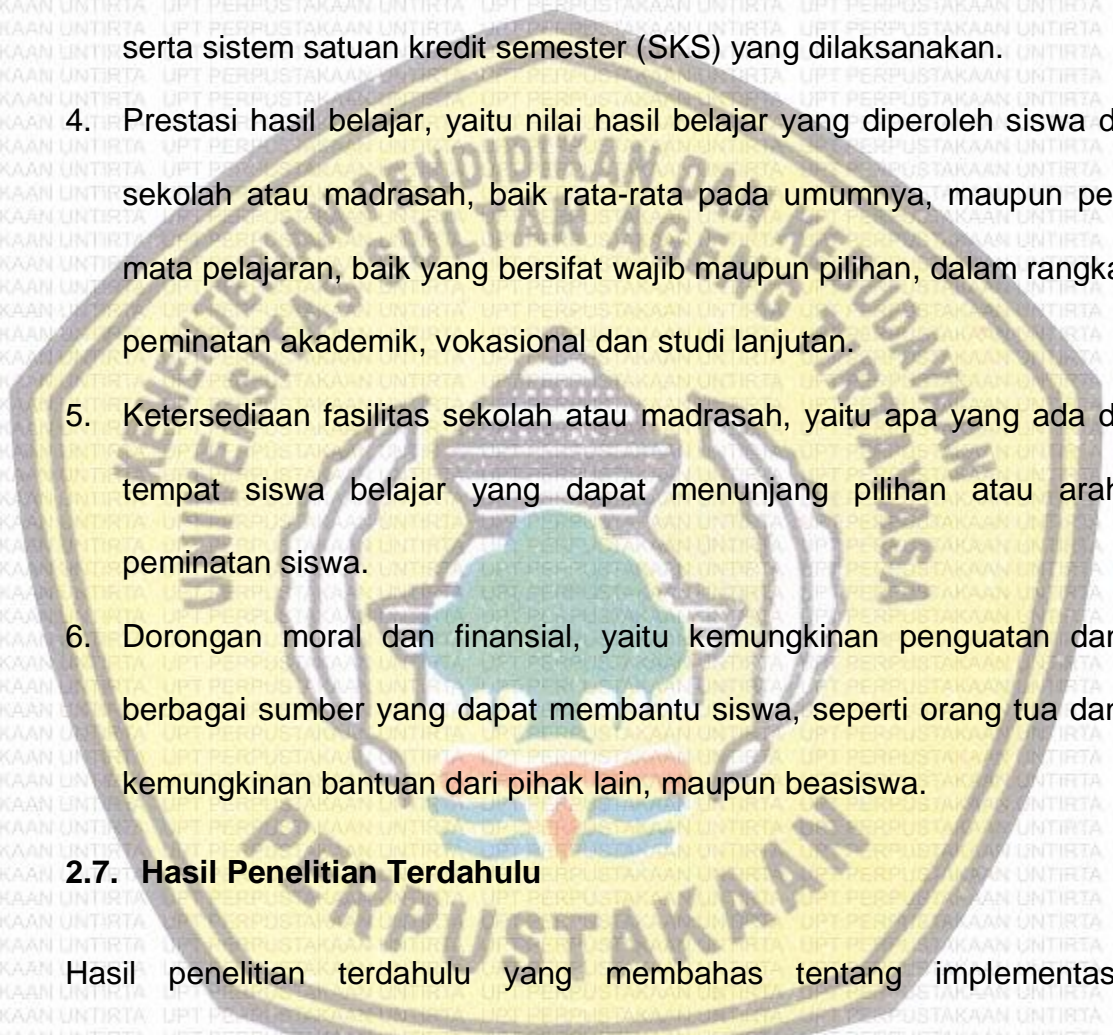
Dengan demikian peminatan adalah sebuah proses yang akan melibatkan serangkaian pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada dilingkungannya.

Untuk setiap tingkat arah peminatan digunakan lima aspek pokok sebagai dasar pertimbangan bagi arah peminatan yang akan ditempuh. Kelima aspek tersebut secara langsung mengacu kepada beberapa karakteristik pribadi siswa dan lingkungannya, kondisi sekolah dan kondisi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan siswa yang bersangkutan, yaitu :

1. Bakat, minat, dan kecenderungan pribadi yang dapat diukur dengan tes bakat atau inventori tentang bakat atau minat.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
2. Kemampuan dasar umum (kecerdasan), yaitu kemampuan dasar yang biasanya diukur dengan tes intelegensi.
 3. Kondisi dan kurikulum yang memuat mata pelajaran atau praktik atau latihan yang dapat diambil atau dialami siswa atas dasar pilihan, serta sistem satuan kredit semester (SKS) yang dilaksanakan.
 4. Prestasi hasil belajar, yaitu nilai hasil belajar yang diperoleh siswa di sekolah atau madrasah, baik rata-rata pada umumnya, maupun per mata pelajaran, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, dalam rangka peminatan akademik, vokasional dan studi lanjutan.
 5. Ketersediaan fasilitas sekolah atau madrasah, yaitu apa yang ada di tempat siswa belajar yang dapat menunjang pilihan atau arah peminatan siswa.
 6. Dorongan moral dan finansial, yaitu kemungkinan penguatan dan berbagai sumber yang dapat membantu siswa, seperti orang tua dan kemungkinan bantuan dari pihak lain, maupun beasiswa.

2.7. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013 dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Penelitian Kaimuddin (2014) tentang Implementasi Pendidikan Karakter dalam kurikulum 2013, menyimpulkan bahwa Pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak dan kepribadian baik, bermoral-berakhlak, dan berefek positif konstruktif pada alam dan masyarakat.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Aspek penting pendidikan karakter dalam pembangunan karakter bangsa, dapat ditinjau secara filosofis, ideologis, dan normatif.

kurikulum 2013 merupakan hasil review dari kurikulum sebelumnya, bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

2. Penelitian Rina Hariana (2015) tentang implementasi program kurikulum 2013 di SMP Negeri 7 Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi kebijakan program kurikulum 2013 di SMP Negeri 7 Samarinda serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat program kurikulum 2013. Fokus penelitian ini yaitu sosialisasi kurikulum, kualitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana serta proses pembelajaran kurikulum 2013 dikelas. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data pada penelitian ini yakni key informan adalah Kepala Sekolah dan Kasi kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan informan adalah guru dan siswa-siswi yang diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Kesimpulan penelitian diperoleh gambaran bahwa sosialisasi kurikulum 2013 yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal. Tenaga pengajar masih banyak yang belum memahami proses penilaian yang menggunakan teknologi informasi yang dianggap

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

rumit. Kemudian sarana dan prasarana belum sepenuhnya menunjang sehingga menjadi faktor penghambat dalam kegiatan pembelajaran. Adanya perubahan kurikulum sangat mempengaruhi mutu pendidikan namun sejauh penerapannya masih menuai pro dan kontra.

3. Penelitian Estika Kapiyani (2016) dalam tesisnya yang berjudul efektifitas implementasi kurikulum 2013 pada enam sekolah sasaran SMA di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. Hasil penelitian menunjukkan: Implementasi kebijakan kurikulum 2013 dipengaruhi oleh : Kepemimpinan kepala sekolah di enam sekolah sasaran, persiapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan kriteria pelaksanaan kurikulum 2013, buku pegangan guru dan peserta didik yang tersedia harus memadai dalam menunjang proses pembelajaran yang sesuai dengan kriteria pelaksanaan Kurikulum 2013.

Penelitian-penelitian tersebut memperkaya kajian penyelenggaraan kebijakan kurikulum 2013. Namun dengan demikian penelitian ini memiliki perbedaan dan kekhasan tersendiri. Selain itu implementasi yang akan dilihat meliputi proses pelaksanaan kebijakan secara umum pada sekolah penyelenggara, sehingga tidak hanya terfokus pada satu obyek kajian.

2.8. Kerangka Berpikir

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yaitu antara lain untuk

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3) memerintahkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan produk undang-undang pendidikan pertama pada awal abad ke-21. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, dan otonomi pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pendidikan nasional, sebagai salah satu sektor pembangunan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Makna manusia yang berkualitas, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus berfungsi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

secara optimal sebagai wahana utama dalam pembangunan bangsa dan karakter.

Kurikulum 2013 tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja akan tetapi adanya keseimbangan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa terutama dalam hal mewujudkan karakter siswa yang baik hal ini sejalan dengan tujuan kurikulum 2013 dalam lampiran satu Permendikbud No. 59 Tahun 2014, halaman 3 “kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia”. Sehingga dari penjelasan tersebut jelas terlihat bahwa kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang memiliki kemampuan hidup dan menjadi warga negara yang beriman yang dapat berkontribusi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk melihat seberapa jauh proses implementasi kebijakan kurikulum 2013 pada sekolah penyelenggara penulis melihatnya faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum 2013 sekolah menengah atas Kabupaten Serang di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande dari tiga variabel menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yaitu :

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Karakteristik Masalah

Pada faktor ini implementasi kebijakan melihat seberapa dalam kesulitan-kesulitan yang akan ditemui dalam penyelenggaraan kurikulum 2013 di Kabupaten Serang. Hal ini dilihat dari (a) sikap pelaksana implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande (b) keberagaman karakteristik profesionalisme dan kompetensi perilaku Implementor Kebijakan kurikulum 2013 di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande.

2. Daya Dukung Kebijakan

Faktor selanjutnya melihat daya dukung implementasikan kebijakan kurikulum 2013. Hal ini dilihat dari (a) kejelasan komunikasi dan tujuan (b) keterandalan teori yang digunakan atau isi kebijakan; (c) pembiayaan yang tersedia dan sarana prasarana pendukung kurikulum 2013 di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande.

3. Faktor yang Berpengaruh di Luar Kebijakan

Pada faktor yang terakhir ialah melihat ada atau tidaknya faktor lain yang muncul di luar kebijakan dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan kurikulum 2013 yang diterapkan di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande. Hal ini dilihat dari dukungan dari komite sekolah di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande

2.9 Model Analisis Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Berdasarkan pada konsep tentang implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, maka tiga variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik adalah karakteristik

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

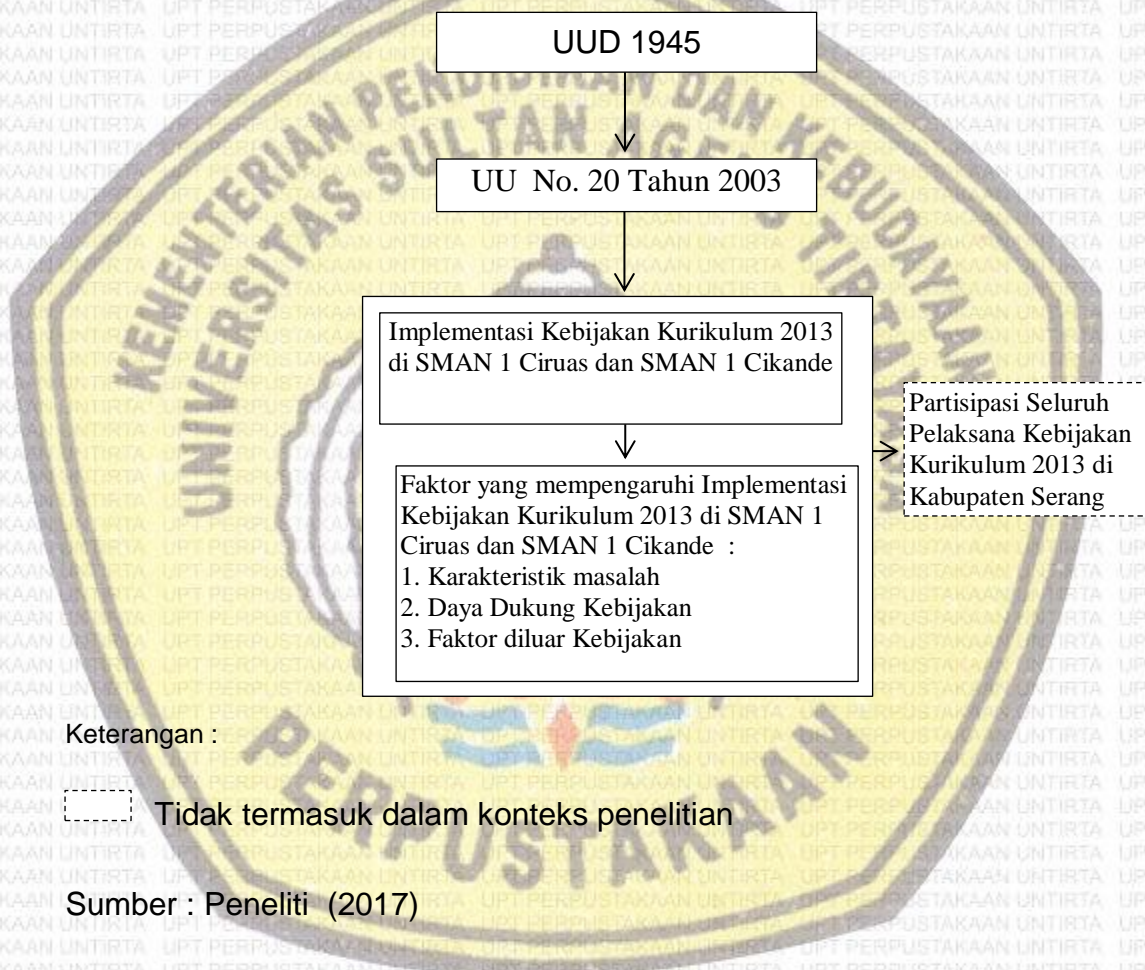
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

masalah, daya dukung kebijakan dan faktor berpengaruh diluar kebijakan.

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka model analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.5
Model Analisis Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Paradigma Penelitian

Langkah pertama sebuah penelitian adalah memilih dan menetapkan paradigma penelitian yang dapat dijadikan panduan selama proses penelitian. Ritzer (2004) mendefinisikan paradigma sebagai gambaran fundamental mengenai masalah pokok dalam ilmu tertentu.

Paradigma membantu menemukan apa yang mesti dikaji, pertanyaan apa yang mestinya diajukan, bagaimana cara mengajukannya, dan apa aturan yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Selanjutnya Ritzer menekankan bahwa paradigma menggolongkan, menetapkan, dan menghubungkan eksemplar, teori, metode, dan instrumen yang ada di dalamnya.⁵²

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Paradigma *critical*. Menurut Neuman (2013), pendekatan *critical* lebih bertujuan untuk memperjuangkan ide peneliti agar membawa perubahan substansial pada masyarakat. Penelitian bukan lagi menghasilkan karya tulis ilmiah yang netral/tidak memihak dan bersifat apolitis, namun lebih bersifat alat untuk mengubah institusi sosial, cara berpikir, dan perilaku masyarakat ke arah yang diyakini lebih baik.⁵³ Karena itu, dalam pendekatan ini pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena berdasarkan fakta lapangan

⁵² Ritzer, 2004

⁵³ Neuman, W. L., 2013 p 80

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

perlu dilengkapi dengan analisis dan pendapat yang berdasarkan keadaan pribadi peneliti, asalkan didukung argumentasi yang memadai. Secara ringkas, pendekatan *critical* didefinisikan sebagai proses pencarian jawaban yang melampaui penampakan dipermukaan saja yang seringkali didominasi oleh ilusi, dalam rangka menolong masyarakat untuk mengubah kondisi mereka dan membangun dunianya agar lebih baik (Neuman, 2013).⁵⁴ Perbedaan masing-masing paradigma dapat dilihat dalam ringkasan di tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perbedaan Paradigma Positivistik, Interpretif, *Critical*

Aspek Kunci	Positivistik	Interpretif	<i>Critical</i>
1. Alasan melakukan penelitian	Untuk menemukan hukum sebab akibat perilaku manusia agar berbagai kejadian dapat diramalkan dan dikendalikan	Untuk memahami dan menjelaskan tindakan-tindakan manusia	Untuk membongkar mitos dan Memberdayakan untuk mengubah masyarakat
2. Asumsi tentang sifat realita sosial	Ada pola yang stabil dan berulang-ulang yang dapat ditemukan	Realita diciptakan oleh manusia sendiri melalui tindakan dan interaksi mereka	Realita sosial dibentuk dari ketegangan, konflik dan kontradiksi dari para pelakunya
3. Asumsi tentang sifat manusia	Mementingkan diri sendiri, rasional, dan dibentuk oleh berbagai kekuatan di lingkungannya	Makhluk sosial yang bersama-sama menciptakan arti untuk digunakan sebagai pegangan hidup	Kreatif, adaptif, berpotensi, namun terjebak dalam ilusi dan eksploitasi

⁵⁴ Ibid,.....81

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4. Peran <i>common sense</i>	Berbeda dan kurang valid dibandingkan ilmu	Sebagai pegangan yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Sebagai ilusi dan mitos yang menyesatkan manusia sehingga mereka sering bertindak merugikan diri sendiri
5. Sifat dari teori yang dihasilkan	Berisikan definisi, aksioma, dan hukum yang terkait secara logis-deduktif	Gambaran tentang berbagai sistem makna dari sebuah kelompok terbentuk dan menjadi langgeng	Sebuah kritik yang mengungkap kondisi yang sebenarnya untuk menolong manusia menemukan cara yang lebih baik untuk mengubah hidupnya
6. Penjelasan yang dianggap baik	Terkait secara logis dengan hukum-hukum dan berdasarkan fakta	Masuk akal bagi para pelakunya dan dapat membantu orang lain memahami dunia para pelakunya	Mampu membekali manusia dengan alat-alat yang diperlukan untuk mengubah dunia
7. Bukti yang dianggap baik	Tidak bias, terukur secara tepat, netral, dapat diulangi hasilnya	Diperoleh langsung dari pelakunya dalam sebuah konteks yang spesifik	Mampu mengungkap mitos dan ilusi
8. Nilai-nilai pribadi pelaku dalam ilmu dan penelitian	Ilmu dan penelitian harus bebas nilai	Nilai-nilai adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada yang salah/benar, yang ada hanya "berbeda"	Semua ilmu dan penelitian harus memihak. Ada nilai-nilai yang dianggap benar dan salah

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

9. Metode penelitian yang digunakan	Alat-alat kuantitatif dalam bentuk survai, kuesioner, model matematis, dan uji statistik	Studi kasus spesifik dengan penggunaan alat-alat kualitatif secara intensif, meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen	Lebih menekankan pada alat-alat kualitatif namun dapat juga menggunakan alat kuantitatif sebagai pelengkap
-------------------------------------	--	--	--

Sumber: Neuman (2013)

3.2 Jenis, Pendekatan, dan Model Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor sebagaimana yang dikutip oleh *Lexi Moleong* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁵

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dikarenakan ada beberapa pertimbangan di antaranya adalah: penelitian ini bersifat menggambarkan, menguraikan suatu hal dengan apa adanya, maksudnya adalah data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata atau penalaran, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan kualitatif; penyajian data dilakukan secara langsung hakikat hubungan peneliti dengan informan lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan.

⁵⁵ Lexi Moleong, 2000, p. 3.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Suatu rencana prosedur kualitatif harus menghasilkan bagian tentang naratif yang muncul dari analisa data. Naratif dalam penelitian kualitatif menyajikan informasi dalam bentuk naskah atau gambar. Penulis dapat memasukkan pembahasan tentang kesepakatan naratif seperti: menggunakan kutipan panjang, pendek dan kutipan yang ada dalam naskah secara bervariasi menyusun naskah percakapan, memasukkan kutipan dan penafsiran (penulis) secara bergantian menggunakan indeks untuk menandai kutipan - kutipan informan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi multi - kasus. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi alamiah subjek (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian kualitatif, kebenaran bersifat dinamis dan hanya dapat diungkapkan dengan cara menelaah interaksi subjek penelitian dengan lingkungan sosialnya. Sementara itu, studi kasus berfokus pada fenomena tertentu dengan maksud untuk melakukan penelahaan mendalam tentang sebuah kasus dan proses yang terjadi dalam kasus tersebut (Denscombe, 2007).

Salah satu jenis desain studi kasus adalah studi multi - kasus (multiple - case study). Menurut Baxter and Jack dalam penelitian studi multi- kasus, peneliti meneliti beberapa kasus untuk memahami persamaan dan perbedaan antar kasus yang diteliti.⁵⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat Yin yang menyatakan bahwa tujuan studi multi-kasus

⁵⁶ Baxter dan Jack, 2008

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

adalah untuk mereplikasi temuan dalam kasus untuk kemudian ditarik perbandingan. Yin menambahkan bahwa desain studi multi-kasus digunakan untuk memprediksi hasil yang serupa (replikasi literal) atau memprediksi hasil yang kontras tetapi dengan alasan yang dapat diprediksi (replikasi teoritis).⁵⁷ Demikian juga dengan penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian studi multi-kasus untuk memungkinkan peneliti menemukan persamaan dan perbedaan implementasi kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande Kabupaten.

Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menggali informasi secara langsung melalui interaksi dengan nara sumber (informan). Selanjutnya penulis memberikan analisis alamiah mengenai implementasi kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang dengan harapan terciptanya kualitas peserta didik sebagai sumber daya manusia di Indonesia.

Metode ini penulis ambil untuk mendapatkan data yang akurat melalui pengamatan langsung sebagai sebuah studi tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang, dimana penulis dapat terlibat langsung dalam fokus penelitian yang dilakukan. Keterlibatan langsung penulis dalam proses penelitian diharapkan dapat lebih mendalami realitas dari fenomena yang ada.

⁵⁷ Yin, Robert K. 2003.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang pokok dan utama dalam penelitian karena sumber data merupakan bahan yang akan diteliti.⁵⁸

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Informasi dalam hal ini informasi berasal dari data yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan dengan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Kepala Sekolah, Guru, komite sekolah di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande, Praktisi Pendidikan atau Akademisi Pendidikan.

Tabel 3.2
Informan dan Data

No	Informan	Data	Ket
1	Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	a. Data tentang Kebijakan kurikulum 2013 b. Implementasi Kebijakan kurikulum 2013	Primer dan Skunder
2	Kepala Sekolah	a. Implementasi Kebijakan kurikulum 2013	Primer dan Skunder
3	Guru	a. Implementasi Kebijakan kurikulum 2013	Primer dan Skunder
4	Komite Sekolah	b. Implementasi Kebijakan kurikulum 2013	Primer
5	Praktisi / Akademisi Pendidikan	a. Implementasi Kebijakan kurikulum 2013	Primer

Sumber : Peneliti 2017

2. Dokumen, arsip serta data lain yang relevan.

Dokumentasi bisa berupa arsip surat, gambar/foto atau catatan - catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber

⁵⁸ Arikunto, Suharsimi 2010 p 172

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

noninsani yang berupa dokumen dan rekaman Teknik ini memberikan keuntungan dari penggunaan data dari bahan - bahan yang telah tersedia dan siap dipakai. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengacu setiap tulisan atau selain rekaman yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan penelitian adalah surat surat, buku harian, naskah pidato, editorial, catatan kasus, skrip, televisi, foto-foto, sejarah pendirian sekolah dan catatan lain yang dianggap perlu.

3.4. Teknik Pengumpulan Informan

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive network sampling* dimana peneliti akan memilih informan yang dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi dan diharapkan mengetahui permasalahan yang menjadi obyek penelitian secara mendetail. Akan tetapi juga digunakan teknik *snowball sampling* guna mengantisipasi keterbatasan data yang diperoleh, dengan menunjuk informan baru dan seterusnya sehingga data yang diperoleh semakin banyak, lengkap, dan mendalam.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data bagi keperluan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Dalam penelitian tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang, wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data yang utama. Adapun yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dimaksud dengan wawancara (interview) adalah percakapan yang dilakukan secara langsung dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁹

Wawancara adalah teknik yang tidak mudah digunakan, tetapi jika dilakukan dengan baik, wawancara akan mampu memberi kita data yang sangat kaya. Wawancara adalah gabungan antara ilmu pengetahuan dan seni (intuisi). Wawancara bisa dilakukan dengan format tidak terstruktur, semi terstruktur. Wawancara bisa juga dilakukan dengan satu orang atau dengan sekelompok orang.⁶⁰

Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu Wawancara Narrative. Keabsahan dari wawancara naratif tidaklah terletak pada stabilitas dan obyektivitas pengukuran, melainkan pada kejujuran dan ketepatan deskripsi atas manusia yang menjadi subyek penelitian. Kriteria yang lazim digunakan di dalam penelitian-penelitian tradisional yang banyak bersifat kuantitatif tidak akan dapat diterapkan di dalam metode penelitian naratif, yang memang memiliki kriterianya sendiri. Kriteria itu antara lain adalah kemampuan untuk menemukan cerita atau data yang tepat untuk diteliti (access), kejujuran di dalam membaca dan menafsirkan cerita ataupun data yang ada, kebenaran, kemampuan untuk menjalin relasi yang dekat dengan subyek

⁵⁹ Lexy J Moleong, 2008 p 157

⁶⁰ Ibid,.....158

PERINGATAN !!!

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini tanpa digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

penelitian (*familiarity*), dan kemampuan untuk menerima catatan dan data serta mengolahnya menjadi kajian penelitian yang bermakna.⁶¹

Tabel 3.3

Kisi-Kisi Wawancara
Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

No	Kisi - Kisi Pertanyaan	Aspek
1	a. Sikap Pelaksana Kebijakan kurikulum 2013	Karakteristik masalah
2	a. Kejelasan Komunikasi b. Kondisi sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan Kebijakan kurikulum 2013	Daya dukung kebijakan

Tabel 3.4

Kisi-Kisi Wawancara Kepala Sekolah

No	Kisi- Kisi Pertanyaan	Aspek
1	a. Sikap Pelaksana Kebijakan kurikulum 2013 b. Karakteristik Profesionalitas, dan Kompetensi Pelaksana Implementasi Kebijakan	Karakteristik masalah
2	a. Kejelasan komunikasi b. Isi Kebijakan kurikulum 2013 c. Pembiayaan dan sarana prasarana pendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013	Daya dukung kebijakan
3	a. Peran komite sekolah terhadap Kebijakan kurikulum 2013	Faktor yang berpengaruh diluar kebijakan

⁶¹ Reza A.A Wattimena, 2008 p 21

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tabel 3.5
Kisi-Kisi Wawancara Guru

No	Kisi- Kisi Pertanyaan	Aspek
1	a. Sikap Pelaksana Kebijakan kurikulum 2013 b. Karakteristik Profesionalitas, dan Kompetensi Pelaksana Implementasi Kebijakan	Karakteristik masalah
2	a. Kejelasan komunikasi b. Isi Kebijakan kurikulum 2013 c. Pembiayaan dan sarana prasarana pendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013	Daya dukung kebijakan
3	a. Peran komite sekolah terhadap Kebijakan kurikulum 2013	Faktor yang berpengaruh diluar kebijakan

Tabel 3.6
Kisi-Kisi Wawancara Komite Sekolah

No	Kisi- Kisi Pertanyaan	Aspek
1	a. Peran komite sekolah terhadap Kebijakan kurikulum 2013	Faktor yang berpengaruh diluar kebijakan

Tabel 3.7
Kisi-Kisi Wawancara Praktisi / Akademisi Pendidikan

No	Kisi- Kisi Pertanyaan	Aspek
1	a. Sikap Pelaksana Kebijakan kurikulum 2013 b. Karakteristik Profesionalitas, dan Kompetensi Pelaksana Implementasi Kebijakan	Karakteristik masalah
2	a. Kejelasan komunikasi b. Isi Kebijakan kurikulum 2013 c. Pembiayaan dan sarana prasarana pendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013	Daya dukung kebijakan
3	a. Peran komite sekolah terhadap Kebijakan kurikulum 2013	Faktor yang berpengaruh diluar kebijakan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah usaha mendapatkan data dengan mengambil dokumen. Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah sumber data berupa peraturan-peraturan tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas, serta catatan-catatan yang berisi kegiatan-kegiatan kepala sekolah, guru, dan arsip-arsip lain yang relevan. Teknik dokumenter ini akan penulis gunakan untuk memperoleh data-data tentang aspek-aspek yang diteliti, khususnya mengenai implementasi kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande.

3.6. Tempat dan Waktu Penelitian

3.6.1. Tempat Penelitian

Suatu penelitian memerlukan tempat guna memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini tempat yang penulis pilih adalah di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten.

3.6.2. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis perlukan untuk mengadakan penelitian ini adalah dari bulan Mei 2017 sampai dengan Juli 2017.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3.7. Validasi

Data yang berhasil dikumpulkan dari wawancara naratif, pengamatan insidental, dan dokumen-dokumen yang relevan diusahakan kemantapan dan keabsahannya. Untuk meningkatkan keabsahan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data, yaitu menggunakan sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sejenis.

Data triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data, dimana peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu dari pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, kepala sekolah guru, komite sekolah SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande dan praktisi/akademisi pendidikan untuk mengumpulkan data yang relevan tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang.

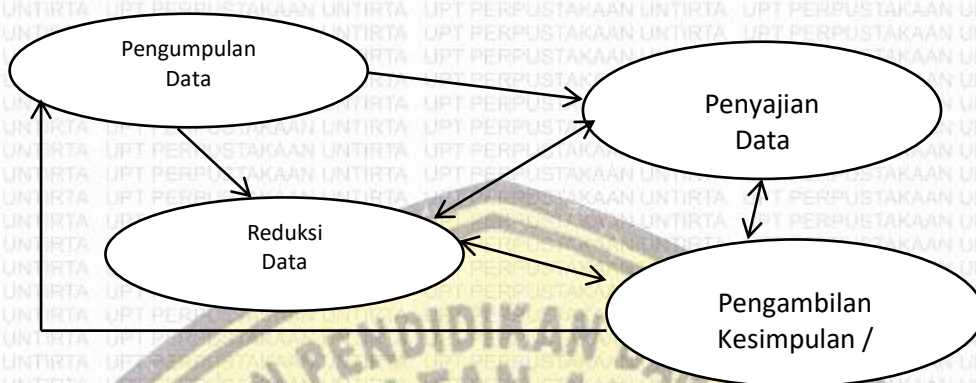
3.8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data dan informasi berupa hasil wawancara dan studi dokumentasi serta observasi tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang dilakukan pengolahan data, kemudian selanjutnya disajikan secara deskriptif dan dilakukan analisis dengan cara ; (a) reduksi data; (b) display data; dan (c) verifikasi. Prosedur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Gambar 3.1
Model interaktif komponen analisis data



Sumber data: Denzin dan Lincoln (2009 : 592)

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara diseleksi dan diambil data yang relevan dengan fokus penelitian yakni bagaimana implementasi kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande.
2. Display data, adalah penyajian dalam bentuk tulisan, tabel serta kutipan hasil wawancara yang dilakukan penulis setelah mereduksi data yang didapat, selanjutnya dirangkum secara sistematis sehingga mudah difahami maknanya
3. Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan terhadap kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding dari hasil pengumpulan data yang ada dan datapenunjang yang lain. Proses verifikasi dengan triangulasi atau metode konfirmasi adalah dengan mencari kasus-kasus yang negatif kemudian menindaklanjuti temuan-temuan, lalu dicek silang dengan responden dengan sumber data lainnya (Prasetya Irawan, 2009 : 76)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3.9. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan data yang harus dilalui untuk mendapatkan data, menganalisisnya serta membuat kesimpulan. Tahap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahap pra lapangan

tahap pra lapangan merupakan tahap awal sebelum peneliti memasuki lapangan. Tahap ini berkaitan dengan masalah perijinan, penajakan, penilaian lapangan serta mempersiapkan peralatan penelitian.

2. Tahap lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai memasuki lapangan penelitian yang bertempat di Provinsi Banten untuk mengumpulkan data dan menganalisis data yang yang diperoleh dari lapangan

3. Tahap ini adalah akhir prosedur penelitian yang dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu analisis dilakukan sejak pengumpulan data dan bukan hanya setelah data terkumpul.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Deskripsi Kabupaten Serang

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari enam kabupaten/kota di propinsi Banten, terletak di ujung barat bagian utara Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dengan jarak 70 km dari Kota Jakarta, Ibu Kota Negara Indonesia. Secara geografis, wilayah Kabupaten Serang terletak pada koordinat $5^{\circ} 50' - 6^{\circ} 2'$ lintang selatan dan $105^{\circ} 7' - 106^{\circ} 22'$ bujur timur.

Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 60 km dan jarak terpanjang dari barat ke timur adalah sekitar 90 km, sedangkan kedudukan secara administratif sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa, sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Tangerang, sebelah selatan dibatasi oleh Kota Cilegon dan Selat Sunda dan Sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang

Luas wilayah Kabupaten Serang secara administratif tercatat 1.734,09 km² dan terdiri dari 34 wilayah kecamatan, 353 desa dan 20 kelurahan. Dari jumlah wilayah sebanyak 34 kecamatan tersebut, terdapat pulau-pulau diantaranya Pulau Sangiang, Pulau Panjang, Pulau Tunda dan Pulau Tarakan. Namun pada tahun 2008 terjadi pemekaran wilayah propinsi Banten dengan pemisahan Kabupaten Serang menjadi dua

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

wilayah yaitu Kabupaten Serang dan Kota Serang. Sehingga Kabupaten Serang pada tahun 2008 hanya memiliki 28 wilayah kecamatan dengan pengurangan enam wilayah kecamatan yaitu Cipocok Jaya, Curug, Kasemen, Serang, Taktakan dan Walantaka (Profil Kabupaten Serang 2007).

4.1.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Serang

Visi dari Kabupaten Serang adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Yang Berkualitas Menuju Kabupaten Serang Yang Agamis, Adil Dan Sejahtera”

Misi Kabupaten Serang adalah :

1. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlakul karimah dan berbudaya.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan dasar disemua wilayah.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat struktur perekonomian daerah
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kawasan strategis, cepat tumbuh, pesisir dan pulau-pulau.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

7. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung kondisi sosial, politik, keamanan yang kondusif dan strategis.

4.1.1.2 Motto Kabupaten Serang

Motto dari Kabupaten Serang adalah Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe, arti dari semboyan adalah agar masyarakat mengutamakan kerja keras untuk mencapai kemakmuran dan keadilan, mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi tanpa mengharapkan pujian, penghargaan serta imbalan, berjuang dengan ikhlas.

4.1.2 Deskripsi SMA Negeri 1 Ciruas

SMA Negeri 1 Ciruas Kabupaten Serang berdiri sejak tahun 1984 telah menyumbangkan berbagai macam prestasi baik akademik maupun non-akademik guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di wilayah timur Kabupaten Serang.

Pada awal pendiriannya SMA Negeri 1 Ciruas menumpang di SMP Negeri 1 Ciruas yang beralamat di jl. Raya Jakarta Km. 7,5 Ciruas. Namunkeadaan ini tidak berlangsung lama. Satu tahun kemudian, SMA Negeri 1 Ciruas, yang dahulu bernama SMA Negeri 3 Serang memiliki gedung sendiri dengan letak yang strategis dan representatif, yaitu di jl. Raya Jakarta KM. 9,5 tepatnya kampung Kuaron, desa Citerep, Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SMA Negeri 1 Ciruas sudah sejak dini, menanamkan kepada siswanya agar berpandangan bahwa sekolah benar-benar bisa menjadi pusat pendidikan yang mempunyai wawasan kepedulian terhadap lingkungan dan budaya. Memulai semua kegiatan tersebut melalui proses kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler serta melalui pola pengembangan diri. Agar kelak dapat melahirkan anak - anak yang cerdas dan berbudi luhur, mempunyai bekal intreprenuer serta memahami budaya adat ketimuran bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan yang tertuang dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003.

Untuk mewujudkan sekolah yang benar-benar diminati masyarakat, Sekolah bukan saja sebagai pusat pendidikan tetapi juga mempunyai wawasan kepedulian terhadap lingkungan dan budaya. Antara pendidikan, lingkungan dan budaya ada saling keterpautan benang merah yang tidak bisa dipisahkan.

Karena di dalam proses kegiatan pembelajaran terjadi proses pengenalan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan lingkungan. Melalui pola pengembangan diri tentunya akan sangat berarti bagi peserta didik. Untuk dapat mewujudkan semua program SMA Negeri 1 Ciruas tidak lepas dari dukungan komite sekolah yang selalu memberikan motivasi pada setiap kegiatan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.1.2.1 Visi, Misi, dan Tujuan SMA Negeri 1 Ciruas

Visi dari SMA Negeri 1 Ciruas adalah :

Iman taqwa dan karakter budaya lingkungan mencapai prestasi dan kreasi sekolah mandiri.

Missi SMA Negeri 1 Ciruas adalah :

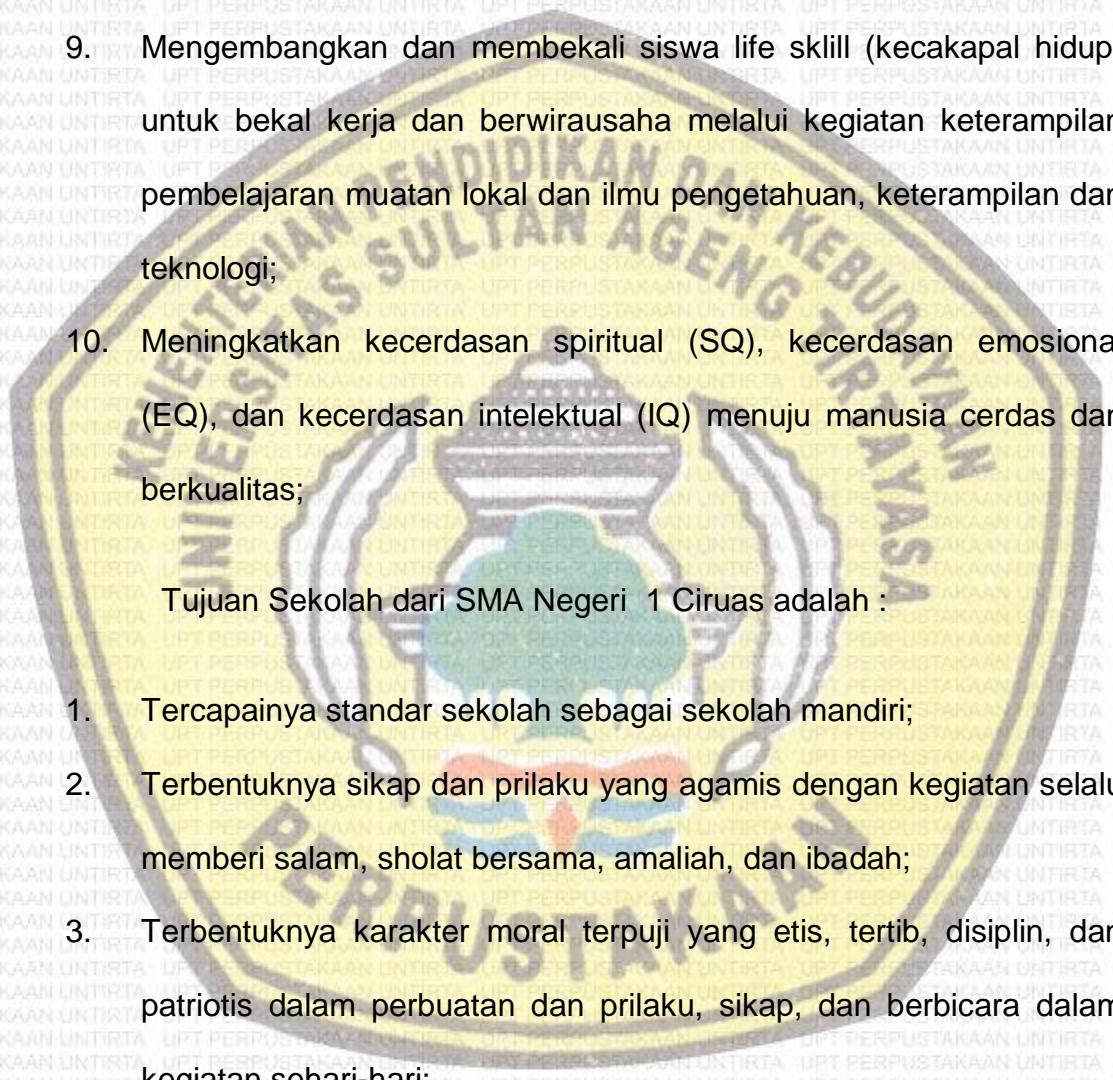
1. Mengembangkan karakter moral terpuji yang religius melalui pendidikan agama dan akhlaq mulia;
2. Mengembangkan karakter moral terpuji yang etis, tertib, disiplin, dan patriotis dalam perbuatan dan prilaku, sikap, dan berbicara melalui pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian untuk mencapai moral;
3. Mengembangkan karakter nilai-nilai budaya lingkungan alam dan sosial budaya;
4. Mengembangkan karakter nilai-nilai budaya bangsa melalui kelompok pendidikan estetika untuk pengembangan bakat dan kemandirian;
5. Mengembangkan karakter yang inovatis, berkemauan, dan kemampuan untuk berkreaitivitas dalam berbagai kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler untuk mencapai keterampilan tinggi;
6. Mengebangkan prestasi dan karakter budaya sehat dan bugar secara fisik dan mental dalam diri dan lingkungannya melalui kelompok mata pelajaran olah raga dan kesehatan;

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

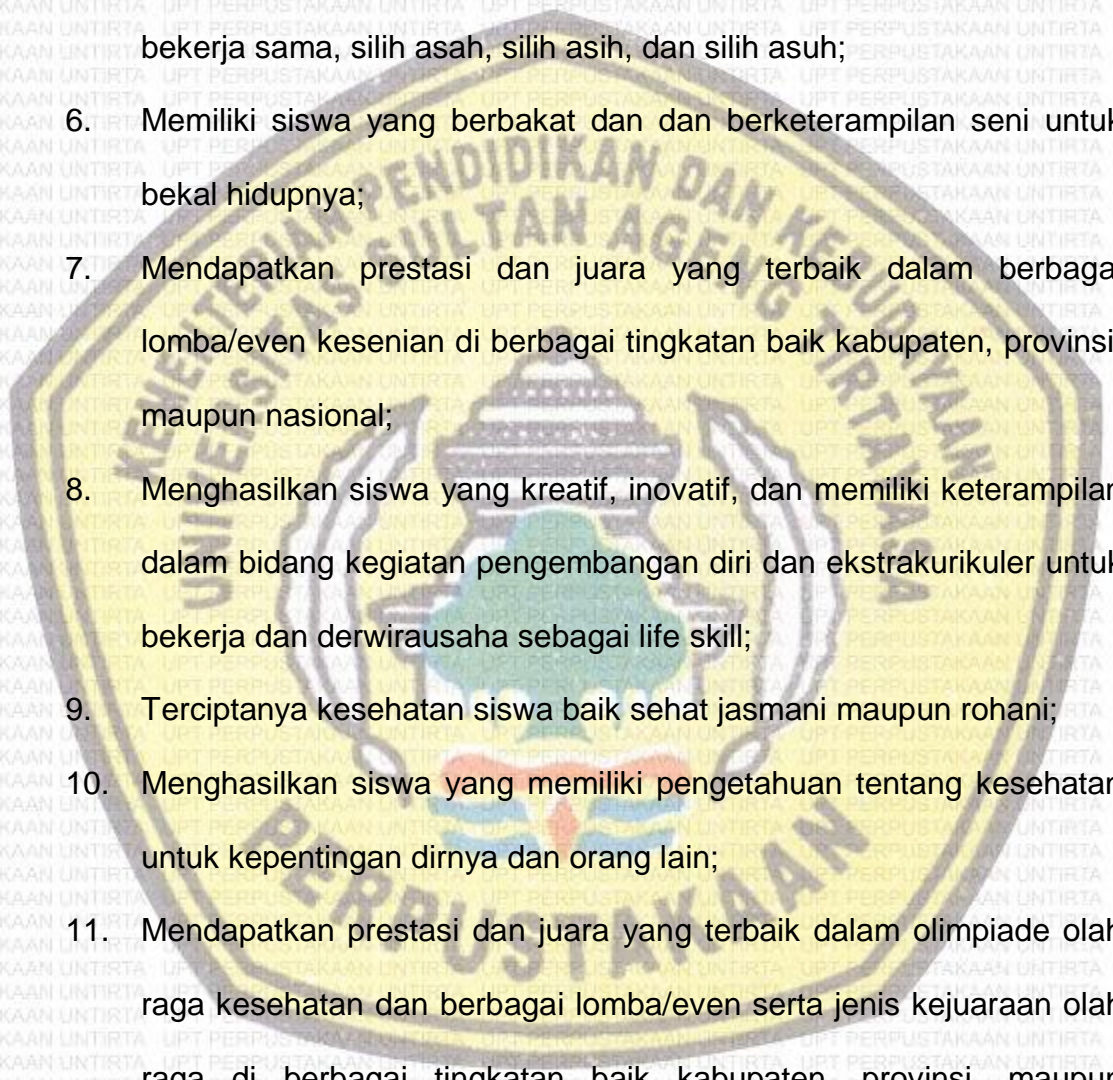
- 
7. Mengembangkan prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas melalui kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 8. Mengembangkan pendidikan berkelanjutan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;
 9. Mengembangkan dan membekali siswa life skill (kecakapan hidup) untuk bekal kerja dan berwirausaha melalui kegiatan keterampilan pembelajaran muatan lokal dan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi;
 10. Meningkatkan kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan intelektual (IQ) menuju manusia cerdas dan berkualitas;

Tujuan Sekolah dari SMA Negeri 1 Ciruas adalah :

1. Tercapainya standar sekolah sebagai sekolah mandiri;
2. Terbentuknya sikap dan prilaku yang agamis dengan kegiatan selalu memberi salam, sholat bersama, amaliah, dan ibadah;
3. Terbentuknya karakter moral terpuji yang etis, tertib, disiplin, dan patriotis dalam perbuatan dan prilaku, sikap, dan berbicara dalam kegiatan sehari-hari;
4. Mengembangkan karakter nilai-nilai budaya lingkungan alam dan sosial budaya:
 1. menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, kesehatan, kekeluargaan, dan kerindangan;
 2. melaksanakan pelestarian lingkungan hidup;

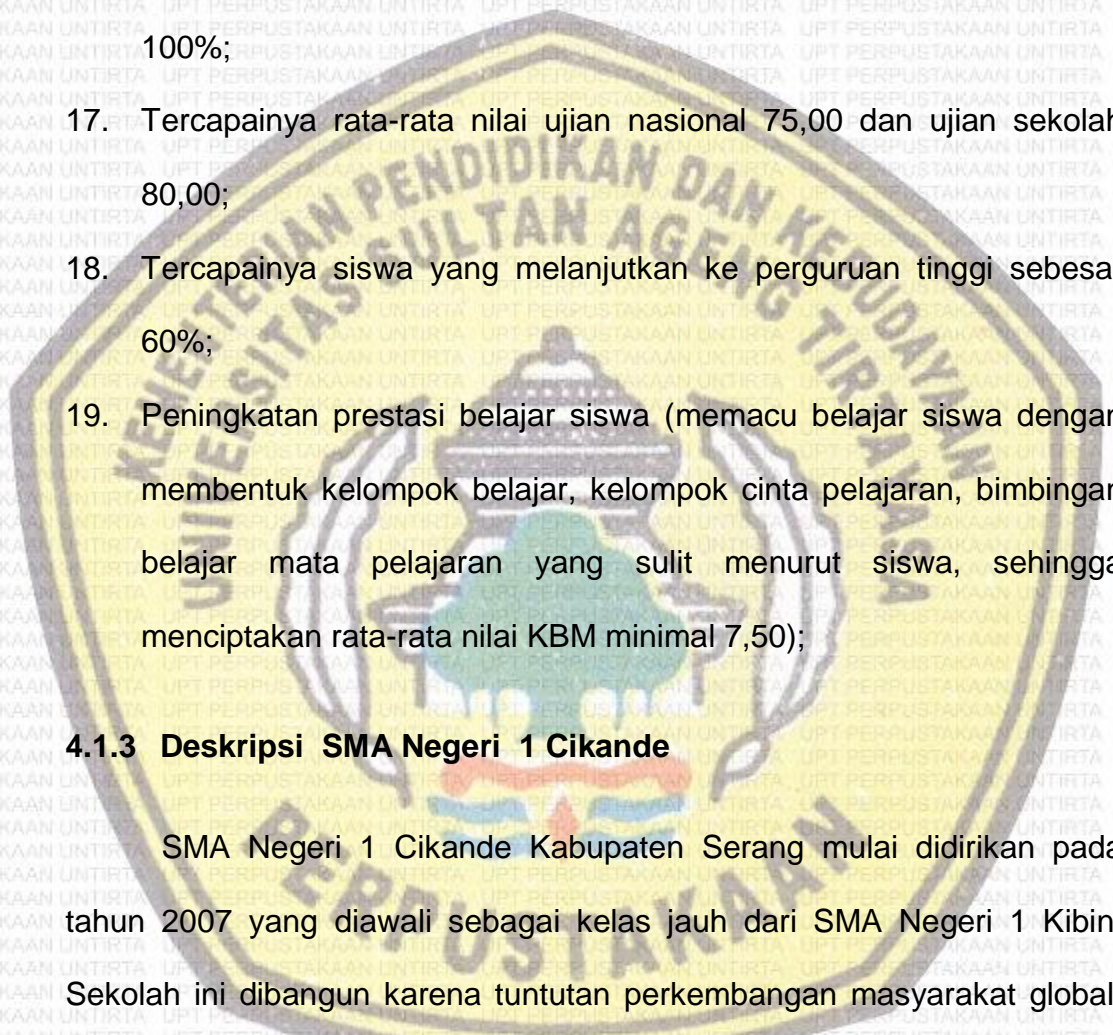
PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
3. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 4. mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 5. mencintai lingkungan sebagai sumber kehidupannya.
 5. Terbentuknya karakter budaya saling mendukung, saling membantu, bekerja sama, silih asah, silih asih, dan silih asuh;
 6. Memiliki siswa yang berbakat dan dan berketerampilan seni untuk bekal hidupnya;
 7. Mendapatkan prestasi dan juara yang terbaik dalam berbagai lomba/even kesenian di berbagai tingkatan baik kabupaten, provinsi, maupun nasional;
 8. Menghasilkan siswa yang kreatif, inovatif, dan memiliki keterampilan dalam bidang kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler untuk bekerja dan derwirausaha sebagai life skill;
 9. Terciptanya kesehatan siswa baik sehat jasmani maupun rohani;
 10. Menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan untuk kepentingan dirinya dan orang lain;
 11. Mendapatkan prestasi dan juara yang terbaik dalam olimpiade olah raga kesehatan dan berbagai lomba/even serta jenis kejuaraan olah raga di berbagai tingkatan baik kabupaten, provinsi, maupun nasional;
 12. Mendapatkan prestasi terbaik dan juara dalam lomba-lomba kebahasaan di semua tingkatan;
 13. Mendapatkan prestasi terbaik dan juara dalam lomba-lomba UUD di semua tingkatan;

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
14. Mendapatkan prestasi terbaik dan juara dalam lomba-lomba lainnya baik ekstrakurikuler maupun kurikuler di semua tingkatan;
 15. Tercapainya siswa yang naik kelas sebesar 99%;
 16. Tercapainya kelulusan ujian nasional dan ujian sekolah sebesar 100%;
 17. Tercapainya rata-rata nilai ujian nasional 75,00 dan ujian sekolah 80,00;
 18. Tercapainya siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi sebesar 60%;
 19. Peningkatan prestasi belajar siswa (memacu belajar siswa dengan membentuk kelompok belajar, kelompok cinta pelajaran, bimbingan belajar mata pelajaran yang sulit menurut siswa, sehingga menciptakan rata-rata nilai KBM minimal 7,50);

4.1.3 Deskripsi SMA Negeri 1 Cikande

SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang mulai didirikan pada tahun 2007 yang diawali sebagai kelas jauh dari SMA Negeri 1 Kibin. Sekolah ini dibangun karena tuntutan perkembangan masyarakat global, di mana pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya mencerdaskan bangsa khususnya masyarakat Kecamatan Cikande dan sekitarnya, dan pada tahun 2012 SMA Negeri mendapatkan status penegerian dari Pemerintah Kabupaten Serang.

Kecamatan Cikande sangatlah ideal memiliki sekolah menengah negeri, karena lokasi Kecamatan Cikande terletak di perbatasan tiga

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kabupaten provinsi Banten, yaitu letaknya di ujung timur Kabupaten Serang (\pm 30 Km) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang dan Lebak. Oleh karena itu untuk mengurangi eksekusi negatif sosial penduduk di perbatasan tersebut perlu dibangun sarana pendidikan sehingga kualitas Sumber Daya Manusia meningkat dan kesejahteraan pun terangkat.

Pembangunan SMA Negeri 1 Cikande sangatlah strategis, karena lokasinya terletak pada jalur lalu lintas utama yang menghubungkan Kabupaten Lebak, Serang dan Tangerang. Sehingga sekolah ini diharapkan akan menjadi sekolah kebanggaan masyarakat Kecamatan Cikande dan sekitarnya, terlebih apabila telah dilengkapi dengan sarana/prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Memasuki tahun ke-5 penergian SMA Negeri 1 Cikande sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar, hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya peserta didik yang mendaftar di kelas X. Tahun Pelajaran 2016/2017 SMA Negeri 1 Cikande menerima 400 peserta didik dari 442 pendaftar yang dikelompokkan menjadi 10 rombongan belajar (rombel). Jumlah peserta didik seluruhnya tahun ini mencapai 1015 orang.

4.1.3.1 Visi Misi dan Tujuan SMA Negeri 1 Cikande

Visi SMA Negeri 1 Cikande Adalah

”Terwujudnya Sekolah Adiwiyata Unggul dalam Akademik, Mandiri, Dilandasi Iman Dan Taqwa”.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Misi SMA Negeri 1 Cikande adalah :

- 1) Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku berlandaskan agama dan karakter budaya bangsa.
- 2) Melaksanakan bimbingan dan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
- 3) Mendorong, membantu dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan, bakat, dan minatnya sehingga dapat dikembangkan secara optimal dan memiliki daya saing.
- 4) Mendorong, membantu dan memfasilitasi peserta didik untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.
- 5) Menata lingkungan sekolah yang bersih, rindang, sehat, dan indah sehingga lebih kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.

Tujuan SMA Negeri 1 Cikande adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengamalan ajaran agama sesuai agama yang dianut, bagi siswa muslim rajin mengikuti pengajian dan terbiasa menjalankan shalat berjamaah.
- 2) Meningkatkan pengamalan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) pada seluruh warga sekolah.
- 3) Meningkatkan penguasaan materi pelajaran dan nilai rata-rata Ujian Nasional secara berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi;
- 5) Mewujudkan tim olahraga dan kesenian tradisional yang mampu bersaing minimal di tingkat kabupaten.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 6) Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan prakarya dan kewirausahaan sebagai bekal hidup mandiri.
- 7) Meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan sekolah.

Sasaran SMA Negeri 1 Cikande adalah sebagai berikut :

- 1) 10% siswa aktif dalam pengkajian dan pendalaman agama di sekolah;
- 2) 50% siswa terbiasa shalat dhuhur berjamaah di sekolah;
- 3) Seluruh siswa dan guru mengamalkan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) minimal di sekolah;
- 4) Penguasaan materi pelajaran minimal 70%;
- 5) 100% siswa lulus UN dengan nilai rata-rata UN minimal 7,00;
- 6) 20% siswa dapat diterima di perguruan tinggi negeri;
- 7) Masuk 5 besar Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat kabupaten;
- 8) Mengikuti O2SN dan mampu menjadi Juara untuk minimal 2 mata lomba pada tingkat kabupaten;
- 9) Memiliki satu tim kesenian tradisional dan mampu bersaing minimal tingkat kabupaten.
- 10) Menjadi juara I sekolah adiwiyata tingkat kabupaten.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang

4.2.1. Informan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yang dijadikan sebagai sumber/pemberi informasi yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah, pejabat di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan dan praktisi pendidikan dari universitas sultan ageng tirtayasa sebagai data pembanding bagi penelitian.

Pengambilan informan awal / kunci adalah dengan mempertimbangkan aspek seseorang yang dinilai paling banyak mengetahui tentang seluk - beluk implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang.

Penulis menetapkan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande yang mengetahui informasi awal pada implementasi kebijakan kurikulum 2013 Kabupaten Serang. Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dikembangkan secara bergulir kepada informan - informan selanjutnya (snow ball) untuk menggali informasi lebih dalam. Pada penelitian ini jumlah informan yang berhasil dihubungi dan bersedia untuk memberikan keterangan sejumlah 22 orang.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.2.2. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentang Implementasi Kurikulum 2013

Setelah diberlakukan selama 10 tahun untuk jenjang SMA, pemerintah mengganti kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004, yang pada waktu itu dikenal dengan kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kemudian setelah dikeluarkannya PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum yang baru berusia dua tahun tersebut diganti lagi dengan istilah kurikulum 2006 (kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A tentang Implementasi kurikulum SMA, pemerintah mengganti kurikulum 2006 (KTSP) dengan kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 adalah hasil penyempurnaan dari kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 dan kurikulum KTSP tahun 2006 yang menyangkut sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu di Kabupaten Serang proses sosialisasi adanya perubahan kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 tersebut dilakukan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kepada sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Serang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang adalah pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan yang ada di tingkat kabupaten, demikian pula punya kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan semua kebijakan pemerintah pusat di wilayahnya. Disamping itu juga ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Provinsi Banten dengan mengundang perwakilan sekolah-sekolah dari tiap kabupaten/kota. Setelah kegiatan tersebut maka masing-masing sekolah berusaha melaksanakan penggantian kurikulum.

Namun karena masih tahap awal, tidak semua sekolah siap dengan perubahan tersebut. Maka kebijakan yang ditempuh adalah pada tahun 2013/2014 semester satu diharapkan tiap sekolah yang akan memulai memberlakukan kurikulum 2013 minimal untuk kelas X dulu, sedangkan kelas XI dan XII tetap menggunakan kurikulum yang lama.

Sekolah yang belum siap diberi kesempatan memberlakukan mulai tahun 2014/2015 untuk kelas X. Dengan catatan selambat-lambatnya tahun 2018/2019 semua SMA sudah memberlakukan kurikulum 2013 untuk semua jenjang, mulai dari kelas X sampai kelas XII.

Berdasarkan penelitian di lapangan, ternyata untuk tahun ajaran 2013/2014 tidak semua SMA yang ada di Kabupaten Serang (Negeri maupun swasta) sudah memberlakukan kurikulum 2014 hanya empat sekolah sebagai pilot projek implementasi kurikulum 2013, tahun pelajaran 2014/2015 semua sekolah di Kabupaten Serang sudah melaksanakan implementasi kurikulum 2013 untuk jenjang SMA.

Pada era pemerintahan Presiden Jokowi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Anies Baswedan kurikulum 2013 akhirnya dikaji ulang kemudian dibekukan pada tanggal 5 Desember 2014 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan kurikulum Tahun 2006 dan kurikulum 2013.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Ada dua pijakan konsep kurikulum yang tidak mudah menentukan dan menjalankannya, keputusan pemerintah ini sangat disayangkan yang seakan kontra produktif dan menambah permasalahan baru dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

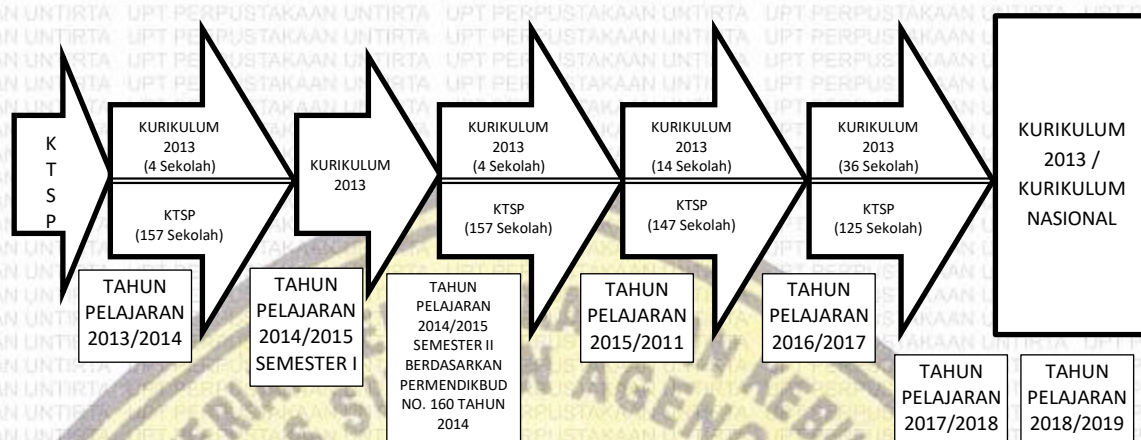
Tahun pelajaran 2015/2016 melalui Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 022/H/Kr/2015 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana kurikulum 2013 di Kabupaten Serang kembali di tunjuk 10 sekolah untuk melaksanakan implementasi kurikulum 2013 salah satunya adalah SMA Negeri 1 Cikande dan Tahun pelajaran 2015/2016 baru 14 SMA dari 161 SMA di Kabupaten Serang yang sudah melaksanakan implementasi kurikulum 2013.

Hal ini menunjukkan ternyata tidak semua SMA dapat melaksanakan kurikulum 2013, dengan di laksanakan implementasi kurikulum 2013 di 14 SMA di Kabupaten yang dilakukan oleh sekolah - sekolah SMA di Kabupaten Serang adalah bagaimana bisa melaksanakan kebijakan kurikulum 2013, sedangkan semua yang berkaitan dengan prasyarat yang harus dipenuhi dilakukan secara bertahap sambil berjalan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Gambar 4.1
Alur Implementasi Kurikulum 2013
Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 2017

4.2.3 Deskripsi Penelitian

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Butir 1 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam undang-undang tersebut, pemerintah menjamin upaya pengendalian kualitas. Untuk menjawab tantangan di era pesatnya teknologi informasi dan lemahnya mutu pendidikan kita sekarang ini maka

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini tanpa digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pemerintah membuat kebijakan baru yaitu membuat program kurikulum baru yang merupakan rujukan dari kurikulum lama yakni dari kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ke kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan yang sekarang ini adalah program kurikulum 2013 yang merupakan rujukan dari kurikulum sebelumnya.

Kurikulum 2013 yang lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selain itu hal yang paling mendasar pada perubahan kurikulum 2013 ini adalah agar kurikulum yang akan diterapkan tersebut mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah tanpa dapat dicegah, dan untuk mempersiapkan peserta didik yang mampu bersaing di masa depan dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan kurikulum 2013 dilandasi secara filosofis, yuridis, konseptual, teoritis dan empiris sebagai berikut.

1. Landasan Filosofis
 - a. Filosofis pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan.
 - b. Filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat.

2. Landasan Yuridis

Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standart isi.

- a. RPJMM 2010-2014 Sektor Pendidikan, tentang perubahan Metodologi Pembelajaran dan Penataan kurikulum.
- b. PP. No.19 tahun 2005 tentang Standart Nasional pendidikan.
- c. Inpres No. 1 tahun 2010, tentang percepatan pelaksanaan Prioritas pembangunan Nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya asing dan karakter bangsa.

Beberapa landasan yuridis dari Undang-Undang sebagai berikut:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. UU nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- c. UU no. 17 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan
- d. Peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP no. 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3. Landasan Konseptual

- a. Relevansi pendidikan
- b. Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter
- c. Pembelajaran kontekstual
- d. Pembelajaran aktif
- e. Penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh.

4. Landasan Teoritis

Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standart dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standart adalah pendidikan yang menetapkan standart nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standart kualitas nasional dinyatakan sebagai Standart Kompetensi Lulusan. Standart Kompetensi Lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. SKL mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP nomor 19 tahun 2005).

5. Landasan Empiris

Berbagai perubahan telah terjadi di Indonesia. Kemajuan terjadi di beberapa sektor di Indonesia, namun di beberapa sektor yang lain, khususnya pendidikan, Indonesia tetap tinggal di tempat, atau bahkan mundur. Hal-hal seperti ini menunjukkan perlunya perubahan orientasi kurikulum dengan tidak membebani peserta didik dengan konten, namun pada aspek kemampuan esensial yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

diperlukan semua warga untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa mendatang.

Dalam satu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Namun demikian, perubahan dan pengembangan kurikulum harus dilakukan secara terarah dan tidak asal-asalan. Tema kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, ketrampilan, dan penguatan yang terintegrasi.

Dalam rangka menjamin keberhasilan kurikulum 2013, diperlukan dukungan dan peran semua pihak sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing pihak. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kota/kabupaten masing-masing memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan untuk keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi kurikulum, diketahui peran dan kewajiban Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban menyiapkan anggaran penyiapan naskah buku dan pencetakan melalui lelang. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pelatihan kepada guru sasaran dan kepala sekolah mengenai penerapan kurikulum 2013 serta penyiapan materi,

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

bimbingan teknis pendampingan, dan monitoring evaluasi yang harus selesai pada bulan Juli 2014.

2. Pemerintah daerah tingkat provinsi berkewajiban untuk mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota yang tidak mendapatkan DAK bidang pendidikan untuk menyiapkan anggaran penggandaan dan distribusi buku semester 2 sampai ke sekolah, menyiapkan dukungan anggaran untuk pelatihan guru bersama pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013 di tingkat sekolah.
3. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk menyiapkan anggaran penggandaan dan pendistribusian buku semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 sampai ke sekolah, bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak mendapatkan DAK bidang pendidikan,, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menyiapkan dukungan anggaran pelatihan guru, menyiapkan mekanisme teknis pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013 tahun pelajaran 2014/2015 pada tingkat sekolah.

Pemerintah kabupaten/kota memiliki sejumlah kewajiban lain dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu melakukan koordinasi, menyiapkan anggaran, serta menyiapkan mekanisme teknis pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Pemerintah daerah mempunyai peran yang penting untuk keberhasilan kurikulum 2013. Namun, perlu disadari bahwa kabupaten/ kota di Indonesia amat bervariasi ditinjau dari sisi kondisi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kemampuan sumber daya manusia, dana, fasilitas dan sosial budaya serta geografis. Komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013.

Dinas pendidikan dan kebudayaan adalah unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016, dinas pendidikan dan kebudayaan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
dinas pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas pendidikan dan kebudayaan menyelenggarakan fungsi: Penyusunan perencanaan program di bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah.

Penetapan kebijakan dibidang pendidikan, melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan yang meliputi kebijakan, pembiayaan, kurikulum, prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebagai pelaksana kebijakan kurikulum 2013 di tingkat daerah memiliki tanggung

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

jawab untuk meneruskan informasi dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan kurikulum 2013 kepada kepala sekolah dan guru. Materi sosialisasi dan pelatihan antara lain mencakup : (1) Sikap, Karakteristik, profesionalitas dan kompetensi pelaksana kurikulum 2013, (2) Sasaran, tujuan, kondisi sarana prasarana penunjang, standar operasional prosedur kurikulum 2013.

Peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum 2013. Kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Secara lebih operasional dapat melakukan kegiatan menggali dan mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah secara terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

Selanjutnya peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013:8) peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 secara umum terdiri dari peran kepala sekolah dalam Perencanaan Pembelajaran dan peran kepala sekolah dalam proses pembelajaran dan penilaian.

Keberhasilan kurikulum 2013 sangat ditentukan oleh berbagai faktor (kunci sukses). Kunci sukses tersebut antara lain berkaitan dengan kreatifitas guru, karena guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar. Menghadapi diberlakukannya kurikulum 2013, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang bisa dilakukan guru :

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Perubahan *mind set* / pola pikir. Pengembangan kurikulum dengan pendekatan saintifik memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran melalui mengamati, menanya, menalar pada proses *inquiry*, *eksplorasi*, dan *elaborasi*. Perubahan pola pikir guru dibutuhkan untuk bisa berperan lebih menjadi fasilitator dan motivator dari pada inisiator dan eksekutor, dalam merubah dari *teacher centered* ke *student centered*. Implementasi *collaborative learning* akan membantu siswa bisa menyikapi keberagaman dan kerjasama sebagai etos akademik dalam menemukan dan mengungkap fenomena ilmiah, yakni dari kebiasaan anak diberi tahu mengarah kepada memfasilitasi anak mencari tahu. Sementara *authentic assessment* semakin dikedepankan sebagai *assessment for learning* dari pada *assessment of learning*. Hal - hal tersebut bisa terwujud tatkala ada *good will* dari para guru untuk merubah *mind set*-nya bahwa tugas mengajar adalah sebagai komitmen profesi dalam membelajarkan dan mencerdaskan anak bangsa.

2. Tindakan konstruktif dan inovatif. Rencana pengembangan kurikulum 2013 yang akan diikuti dengan fasilitasi buku siswa, buku pedoman guru, maupun silabus serta RPP - nya tentunya tidak malah membuat guru merasa "santai" dalam mengajar. Akan tetapi hal ini dimaksudkan dengan harapan guru tidak lagi terlalu disibukkan dengan hal-hal yang bersifat administratif, tetapi lebih fokus pada kegiatan inovatif akademis pembelajaran di kelas. Keunikan peserta didik, keragaman lingkungan belajar, maupun keterbatasan sarana /

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

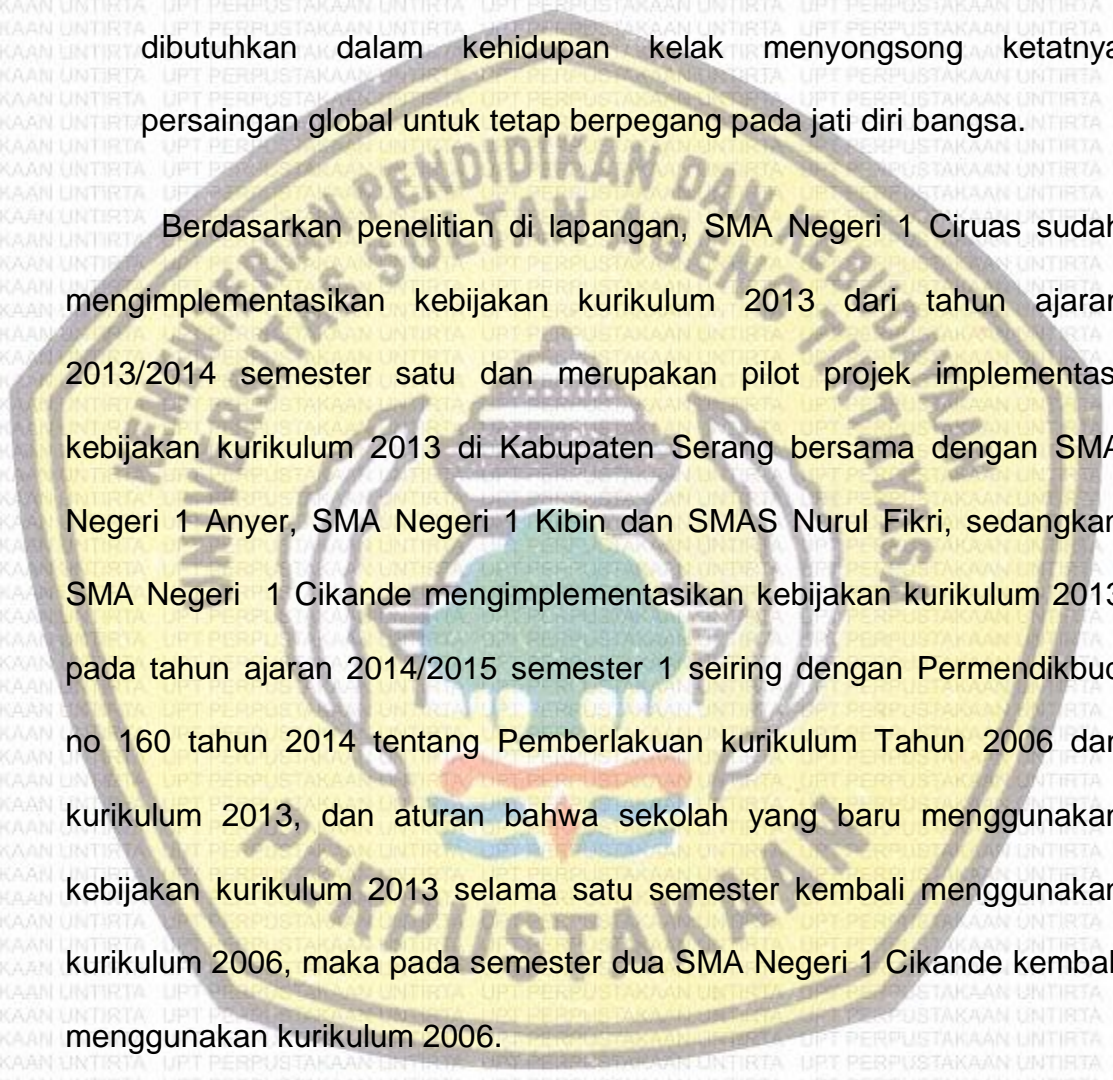
prasarana yang ada adalah adagium pedagogis yang harus disikapi tentunya dengan penyesuaian strategi/model pembelajaran yang adaptif dan edukatif. Artinya, guru justru harus mengkritisi secara konstruktif dan inovatif buku, silabus, dan RPP yang ada untuk disesuaikan dengan peserta didiknya. Ibarat seorang *pastry*, meski resep dan bahan rotinya sama, namun di tangan *pastry* yang profesional akan dihasilkan roti yang berbeda dengan *pastry* yang amatiran. Keahlian, kejelian dan kecerdasan guru dalam meramu “kompetensi inti, dan kompetensi dasar; aspek sikap, pengetahuan, dan aspek keterampilan; akan menghasilkan siswa yang kompeten dan men *drive* berpikir *high order thinking* dalam bangku sekolahnya guna keberlanjutan pada jenjang berikutnya. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) baik melalui level sekolah maupun kelompok / wadah seprofesi (KKG / MGMP), perlu ditingkatkan untuk saling asah, asih, dan asuh sesama kolega guna menghasilkan siswa - siswa yang cerdas dan unggul.

3. Sikap teladan guru. Seiring dengan kompleksitas dan perkembangan peradaban dunia di era globalisasi, tugas mendidik guru perlu dikedepankan dalam aspek penguatan sikap dan budi pekerti siswa. Pendidikan karakter tidak hanya terhenti pada pengetahuan saja akan tetapi perlu suatu pengintegrasian pada pembiasaan pembelajaran, suri tauladan, apresiasi dan implementasi norma akademis yang nantinya tercermin pada norma sosial yang semakin utuh dalam praktik berbangsa dan bernegara. Terkait dengan hal

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

tersebut, tugas guru utamanya untuk mengintegrasikan nilai sikap dan pendidikan karakter dalam praktik pembelajaran yang diampunya, yang selanjutnya akan menjadi *school culture* untuk bisa menambah identitas diri pribadi siswa yang berkarakter. Inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan kelak menyongsong ketatnya persaingan global untuk tetap berpegang pada jati diri bangsa.



Berdasarkan penelitian di lapangan, SMA Negeri 1 Ciruas sudah mengimplementasikan kebijakan kurikulum 2013 dari tahun ajaran 2013/2014 semester satu dan merupakan pilot proyek implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Kabupaten Serang bersama dengan SMA Negeri 1 Anyer, SMA Negeri 1 Kibin dan SMAS Nurul Fikri, sedangkan SMA Negeri 1 Cikande mengimplementasikan kebijakan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2014/2015 semester 1 seiring dengan Permendikbud no 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan kurikulum Tahun 2006 dan kurikulum 2013, dan aturan bahwa sekolah yang baru menggunakan kebijakan kurikulum 2013 selama satu semester kembali menggunakan kurikulum 2006, maka pada semester dua SMA Negeri 1 Cikande kembali menggunakan kurikulum 2006.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 022/H/Kr/2015 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana kurikulum 2013 Tahun 2015 maka SMA Negeri 1 Cikande pada tahun ajaran 2015/2016 kembali mengimplementasikan kebijakan kurikulum 2013 bersama sepuluh sekolah tingkat SMA.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kepala SMA Negeri 1 Ciruas dan Kepala SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang berada di garda terdepan dalam mengimplementasikan kurikulum dan mempunyai peran yang sangat dominan dalam manajemen di sekolah masing-masing. Kepala SMA Negeri 1 Ciruas dan Kepala SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang dapat dikatakan sebagai manajer sekolah, karena ia mempunyai peran yang sangat penting dalam: (1) meningkatkan mutu sekolah, (2) menghasilkan output pendidikan yang baik, dan (3) mendayagunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai visi dan misi sekolah.

Dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang, Kepala SMA Negeri 1 Ciruas dan Kepala SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang mempunyai peran yaitu sebagai: (1) pemimpin yang selalu memberikan kepercayaan dengan mendelegasikan tugas kepada guru yang ada di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang; (2) pemimpin yang selalu memberi motivasi kepada seluruh tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dalam membantu guru mengimplementasikan kurikulum 2013; (3) pemimpin yang selalu memonitor terhadap pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 di kelas; (4) pemimpin yang selalu melakukan tugas supervisi di kelas untuk memantau implementasi kurikulum 2013 yang dilakukan oleh guru; (5) pemimpin yang mengendalikan situasi apabila ada permasalahan selama proses implementasi kurikulum 2013.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Untuk mencapai prestasi yang baik, kepala sekolah di SMA Negeri

1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang harus memenuhi kriteria tertentu. Kepala sekolah di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang juga harus memenuhi kriteria umum yang menekankan kepada persyaratan jabatan serta kriteria khusus yang meliputi aspek manajerial, aspek kepribadian, aspek sosial, dan aspek penunjang yang terdiri dari prestasi sekolah, penguasaan teknologi informasi dan peningkatan wawasan atau pengembangan diri.

Kepala sekolah sebagai seorang pimpinan harus mampu mempengaruhi dan mengarahkan bawahannya untuk memahami dan menerima dengan tulus secara terkordinasi dan terpadu untuk melaksanakan dan mencapai tujuan yaitu prestasi sekolah dan mutu pendidikan yang lebih baik.

Sebagai kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang, guru di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang memegang banyak peranan yang sangat penting dan krusial. Peranan tersebut berhubungan dengan beberapa hal berikut :

- a. Pengelolaan administratif. Ruang lingkupnya antara lain mencakup administrasi kurikulum dan administrasi material. Pengelolaannya harus tercatat, teratur, dan tertib untuk kelancaran pendidikan.
- b. Pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum 2013. Pengelolaan terkait dengan hal ini dirasakan mendesak dan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

diperlukan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Hanya saja hal ini menuntut keahlian pemahaman prinsip dan penguasaan keterampilan teknis.

c. Guru di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang sebagai tenaga profesi kependidikan. Guru di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang tidak hanya berperan di dalam kelas, tetapi juga seorang komunikator, pendorong kegiatan belajar, pengembang alat-alat belajar, penyusun organisasi, manajer sistem pengajaran, dan pembimbing, baik di sekolah maupun di masyarakat.

d. Meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Keberhasilan mengajar tergantung pada tiga faktor, yaitu : (1) kepribadian; (2) pengetahuan; dan (3) keahlian guru. Kepribadian guru ditandai dengan sikap antusias dan kecintaan terhadap siswa. Guru di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Selanjutnya sebagai pelaksana kurikulum, guru harus mampu menciptakan kegiatan belajar para peserta didiknya.

e. Berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum 2013. Guru di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang harus mampu mengambil peran dalam perumusan kebijakan operasional serta perencanaan dan pelaksanaan administrasi pengembangan kurikulum, terutama bagi kelasnya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

f. Pendekatan kurikulum 2013. Guru di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang harus bijaksana dan senantiasa berupaya mengembangkan kurikulum sekolah berdasarkan kepentingan masyarakat, kebutuhan siswa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

g. Meningkatkan pemahaman konsep diri. Keberhasilan guru terletak pada pengetahuan tentang diri (*self-knowledge*) dan pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan pribadi, serta bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.

h. Memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Tujuan utama guru adalah mengubah pola tingkah laku siswa menjadi lebih baik. Oleh karena itu guru harus mampu mendorong dan memajukan kegiatan belajar siswa sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang diinginkan. Disamping itu guru hendaknya bersikap menerima, menghargai, dan menyukai siswanya sehingga siswa pun menyenangi guru dan menghayati harapan serta keinginan gurunya.

Kegiatan belajar yang bermakna merupakan jantung kurikulum dan berpengaruh dalam pembentukan pengalaman belajar (*learning experience*). Oleh sebab itu peran guru sangat krusial dalam menghadirkan kegiatan belajar sehingga siswa mampu menemukan makna personal. Seringkali kurikulum dianggap tidak efektif karena pengalaman belajar disusun dengan suatu cara yang mengakibatkan pembelajaran kurang efektif.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kurikulum tidak fungsional (*dysfunctional curriculum*) karena konten tidak dilengkapi oleh kegiatan belajar yang relevan sehingga tidak ada pengalaman belajar yang berarti bagi peserta didik. Implikasinya adalah pendidikan tidak berfungsi membentuk berbagai pengalaman belajar yang efektif bagi peserta didik akibat lebih jauhnya, ia tidak kompeten dan tidak berkembang memiliki kepribadian yang ideal.

Ada empat elemen yang menjadi wujud perubahan dalam kurikulum 2013 ini yang sekaligus membedakan dari kurikulum sebelumnya yaitu:

- 1) Perubahan standar kompetensi lulusan yaitu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, dengan kata lain standar kompetensi lulusan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Perubahan pada materi pembelajaran berupa penguatan materi yang dilakukan dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang terdapat dalam materi kurikulum sebelumnya dengan cara meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi peserta didik dan mempertahankan materi yang masih dianggap relevan dan menambahkan materi yang dianggap penting dalam

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

level internasional. Materi pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dikembangkan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan dengan mengakomodasi konten lokal, nasional dan internasional.

- 3) Perubahan proses pembelajaran kurikulum 2013 mencakup ;
- pertama* berorientasi pada karakteristik yang mencakup, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. *Kedua* menggunakan pendekatan saintifik dengan mengutamakan model *Discovery Learning* dan *Project Based Learning*. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4) Perubahan pada Penilaian kurikulum 2013 ini dilakukan secara komprehensif untuk menilai sejak dari masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*) pembelajaran, yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Penilaian dilakukan secara utuh sehingga menggambarkan kapasitas, gaya dan hasil belajar peserta didik dari keterpaduan antara komponen (*input - proses - output*) juga dampak intruksional dan dampak pengiring yang selanjutnya penilaian semacam ini dikenalkan dengan istilah penilaian autentik.

Dari keempat elemen perubahan diatas guru merupakan pihak yang secara langsung menjadi sasaran perubahan tersebut sebab guru sebagai pengguna langsung kurikulum (Implementator), dengan demikian harus ada perubahan pada diri guru terutama menyangkut kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Kompetensi Pedagogik, yang harus berubah berkaitan dengan elemen ketiga dan keempat yaitu dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi; pemahaman terhadap peserta didik, kemampuan merancang rencana pembelajaran, kemampuan melaksanakan pembelajaran (sebagai keterampilan dasar mengajar), kemampuan merancang dan melaksanakan evaluasi hasil belajar, kemampuan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik, semuanya harus disesuaikan dengan tuntutan kurikulum 2013.

Kompetensi Profesional yang harus berubah berkaitan dengan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

elemen pertama dan elemen kedua yaitu dalam penguasaan visi dan misi Pendidikan Nasional, penguasaan konsep dasar dan teori - teori materi pelajaran, menganalisis dan mengembangkan materi pembelajaran. memilah, memilih, dan menetapkan materi yang akan diajarkan atas dasar; tingkat relevansi dengan kompetensi yang telah dirumuskan; tingkat kemenarikan bagi peserta didik, juga harus disesuaikan dengan tuntutan kurikulum 2013.

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan Model Implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang mengukur implementasi kebijakan dengan tiga variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik adalah karakteristik masalah, daya dukung kebijakan dan faktor berpengaruh diluar kebijakan.

4.2.4 Karakteristik Masalah

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Leo Agustino adalah karakteristik masalah, aspek karakteristik masalah dalam penelitian ini adalah sikap, karakteristik profesioanalisme dan kompetensi pelaksana kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Cikande dan SMA Negeri 1 Ciruas.

4.2.4.1 Sikap Pelaksana Kebijakan Kurikulum 2013

Sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor pertama yang mempunyai konsenkuensi-konsenkuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Perubahan kurikulum 2013 ini juga ditanggapi positif oleh Kepala SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang, sebagai produk pendidikan yang semakin mengarah siswa untuk bersaing

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

secara global. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti diperoleh tanggapan tentang kurikulum 2013 sebagai berikut,

“Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan, karena itu kurikulum 2013 dirancang agar siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik demi menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, saya selaku kepala sekolah mendukung penuh pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah yang saya pimpin” (Wawancara dengan H.Mohamad Najih, S.Pd, M.Pd tanggal 18 Juli 2017).

“Tentu saja setiap keputusan yang dibuat oleh pusat menimbulkan dampak bagi kami warga sekolah karena kita berada dalam satu sistem dengan pemerintahan pusat. Kita tidak mungkin tidak melaksanakan apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat karena kita berpikir ini adalah keputusan yang terbaik dalam rangka mempersiapkan masa depan anak-anak kita” (Wawancara dengan Mulyadi, S.Pd tanggal 20 Juli 2017).

Untuk mengetahui sikap guru tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013 diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande. Dari wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sikap guru terhadap implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Kabupaten Serang diperoleh penjelasan sebagai berikut,

“Ya, tentu saja pa... Saya sangat mendukung, demikian juga teman-teman guru yang lain juga selama ini mendukung semuanya, tidak ada yang keberatan. Kan sudah peraturannya begitu. Asalkan ditinjau terus sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Dengan melibatkan Tim Pengembang. Jangan sampai kurikulum 2013 itu dari awal sampai seterusnya tidak mengalami perubahan dan perkembangan kan tujuan dari kurikulum 2013 adalah persiapan untuk generasi emas bangsa Indonesia.” (Wawancara dengan Tri Gunadi, S.Pd, M.Pd tanggal 19 Juli 2017).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Kurikulum 2013 sangat bagus pa...karena membawa siswa-siswa menuju jenjang globalisasi...jadi kalau kita memang mau setara dengan pendidikan diluar dalam hal ini pendidikan diluar negeri, semestinya kita mengikuti kurikulum 2013 karena memang menurut pengalaman saya sebagai guru, kurikulum itu diubah dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan pendidikan dan juga menyangkut output itu sendiri” (Wawancara dengan Safiudin tanggal 20 Juli 2017).

“Kurikulum ini lebih bagus dari kurikulum sebelumnya karena lebih mengutamakan siswa dan siswa lebih aktif dari guru” (Wawancara dengan Hayati Nufus, S.Sos tanggal 19 Juli 2017)

“Kurikulum 2013 ini sangat baik karena memacu siswa untuk lebih kreatif. Apabila dilaksanakan dengan baik saya yakin pendidikan di Indonesia akan mampu bersaing dengan pendidikan diluar negeri” (Wawancara dengan Sentot Hadi, S.Pd tanggal 20 Juli 2017)

Adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 ini tidak semua guru menyambut dengan antusias seperti mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berhubungan dengan tercapainya pelaksanaan kurikulum 2013.

“ Kurikulum 2013 itu kurikulum yang baik. Standar Isi dan Standar Proses bagus, model pembelajaran pun dapat membuat siswa menjadi lebih aktif. Dari segi positifnya kurikulum 2013 memiliki teknik penilaian yang bagus karena semua aspek dinilai yaitu aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Namun, kurikulum 2013 juga memiliki segi negatif karena aspek yang dinilai lebih banyak maka administrasinya juga lebih banyak dan menyulitkan pihak guru apalagi untuk guru yang sudah tua.seperti saya” (Wawancara dengan Budi Setyono, S.Pd tanggal 19 Juli 2017).

“Tentang kurikulum 2013, sebenarnya tidak berbeda dengan kurikulum yang lama (kurikulum 2006) yang sudah kami gunakan selama ini, yang sedikit membedakan adalah kurikulum baru dalam hal ini kurikulum 2013 lebih menekankan kepada pemanfaatan teknologi, dan kami memahami itu, hanya saja guru-guru yang ada disekolah ini terutama yang sudah sepuh seperti saya ini tidak mengerti penggunaan komputer atau alat peraga elektronik lainnya karena sejak dulu sudah mengajar secara manual jadi mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi” (Wawancara dengan Oom Soma, S.Pd tanggal 20 Juli 2017)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Untuk mengetahui sikap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten, dalam hal ini Kepala Seksi Kurikulum SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten menjelaskan alasannya sebagai berikut :

“ Ya walaupun kami baru diserahi tugas membina SMA dari tahun 2017 karena sebelumnya kewenangan untuk pembinaan SMA ada ditingkat kabupaten/kota tapi sudah seharusnya kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk selalu siap mendukung setiap kebijakan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan seperti halnya kebijakan kurikulum 2013 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan LPMP selalu siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013, kurikulum ini merupakan kurikulum pengganti kurikulum 2006 yang dilakukan pemerintah dengan niatan untuk memperbaiki sistem pendidikan. kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan” (Wawancara dengan Drs. Adang Abdurahman tanggal 21 Juli 2017).

Dalam hal ini agar pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 berjalan seperti yang diharapkan, sesuai dengan intruksi dari pusat. Dinas pendidikan dan kebudayaan bertanggung jawab mempersiapkan kepala sekolah dan guru untuk memahami dan melaksanakan kurikulum 2013 pada tingkat satuan pendidikan dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan kurikulum 2013 kepada instansi terkait serta melaksanakan pembinaan atau pelatihan yang bekerjasama dengan LPMP kepada sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013. Menurutnya, hal tersebut sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Provinsi Banten sehingga sampai saat ini pembinaan atau pelatihan terus dilaksanakan secara berkala agar sekolah-sekolah di Kabupaten Serang benar-benar siap melaksanakan kurikulum 2013.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Namun, sebaiknya implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan setelah tercapainya kesiapan dan kompetensi guru-guru di sekolah. Kesiapan guru sangat penting dalam pengimplementasian kurikulum 2013, karena guru sebagai penentu keberhasilan kurikulum 2013 yang diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap berbagai kemungkinan terjadinya perubahan. Maka dari itu perlu adanya persiapan yang matang dari pemerintah dalam setiap sistem yang diperlukan untuk pelaksanaan kurikulum 2013 dan guru-guru harus terbuka terhadap setiap perubahan yang dilakukan demi perbaikan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Kabupaten Serang ditanggapi cukup baik walau ada guru di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande yang tidak mendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013 dikarenakan usia yang sudah lanjut tapi dalam hal ini pelaksana kebijakan kurikulum 2013 menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari pusat.

Karena ketika pelaksana memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Untuk mengetahui bagaiman sikap yang seharusnya dilaksanakan implementor suatu kebijakan dalam hal ini kebijakan kurikulum 2013, penulis melakukan wawancara dengan akademisi pendidikan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Tentu saja untuk memberikan pendidikan yang bermutu tidak semudah membalikkan telapak tangan, seperti yang terjadi di Indonesia. Sumberdaya manusia masih menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan. Masalah sumberdaya manusia, ternyata memiliki korelasi positif dengan masalah pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu masalah klasik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dimana mutu pendidikan yang ada pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan menengah belum bisa menunjukkan hasil yang maksimal, dengan adanya kebijakan kurikulum 2013 ini harus didukung oleh pihak baik dari dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala sekolah, guru bahkan komite sekolah semua harus berperan aktif” (Wawancara dengan DR H Masrupi, M.Pd tanggal 21 Juli 2017)

Dari Wawancara dengan akademisi pendidikan Universitas Sultan Agung Tirtayasa bahwa Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kurikulum 2013 adalah sikap implementor. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan kurikulum 2013 maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan kurikulum 2013 maka proses implementasi kebijakan kurikulum 2013 akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan kurikulum 2013 , kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran kebijakan kurikulum 2013 namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan implementasi kurikulum 2013 secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi kebijakan kurikulum 2013, di

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung kebijakan kurikulum 2013, memperhatikan sikap dan karakteristik yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana kebijakan kurikulum 2013 agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan kurikulum 2013.

4.2.4.2 Karakteristik Profesionalisme dan Kompetensi Pelaksana Kebijakan Kurikulum 2013

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. profesionalisme mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan kompetensi yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Profesionalisme di sebuah sekolah yang memegang peranan dalam pelaksanaan kurikulum adalah kepala sekolah dan dewan gurunya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kepala sekolah sebagai pemegang pucuk pimpinan tertinggi di suatu sekolah tentu dituntut memiliki kemampuan mengelola organisasi, termasuk dalam hal menjalankan kebijakan kurikulum 2013 di sekolahnya. Sedangkan dewan guru sebagai pelaksana langsung kurikulum di kelas juga merupakan komponen profesionalisme yang utama. Berikut ini akan diuraikan hasil pengamatan dan wawancara terhadap fenomena karakteristik profesionalisme dan kompetensi pelaksana kebijakan kurikulum 2013, yang dikelompokkan menjadi 4 : (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (2) Kepala sekolah; (3) Guru; (4) Tim Pengembang kurikulum 2013

4.2.4.2.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dukungan dinas pendidikan dan kebudayaan terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah sangat penting bagi terselenggaranya pelaksanaan kurikulum 2013 secara optimal. Peran dinas pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai koordinator pelaksanaan kurikulum 2013 di wilayahnya. Untuk mengetahui sejauh mana dukungan yang telah diberikan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah, peneliti menanyakannya kepada Kasie kurikulum SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Dalam hal pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah, termasuk di SMA Negeri, tentu saja pihak dinas pendidikan dan kebudayaan sangat mendukung. Karena disini peran kami sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan kurikulum 2013 di tingkat wilayah provinsi. Yang kami lakukan misalnya mulai dari sosialisasi dan pelatihan....seperti saat inipun pa,....kami sedang melaksanakan bimtek kurikulum 2013 dari tanggal 17 sampai 22 Juli 2017 dengan tema kita sukseskan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan,..... kami juga menugaskan kepala sekolah pada workshop kurikulum tingkat provinsi, dan juga melalui pengawas mengadakan supervisi atau monitoring terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah” (Wawancara dengan Drs. Adang Abdurahman tanggal 21 Juli 2017).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diungkapkan, bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi sangat mendukung terhadap pelaksanaan atau implementasi kurikulum 2013 di sekolah-sekolah, termasuk di SMA. Hal ini mengingat peran dari dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi adalah sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan kurikulum 2013 di tingkat wilayah provinsi.

Bentuk-bentuk dukungan dari dinas pendidikan dan kebudayaan misalnya proses sosialisasi tentang kurikulum 2013 kepada seluruh sekolah yang ada di wilayah provinsi, pengiriman kepala sekolah pada kegiatan workshop atau pelatihan kurikulum di tingkat provinsi.

Biasanya workshop atau pelatihan kurikulum di tingkat provinsi diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten.

Tugas dari dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi adalah menyeleksi, memilih, atau menunjuk peserta , untuk mengikuti kegiatan di tingkat provinsi seperti yang sedang berlangsung dari tanggal 17 sampai dengan 22 Juli 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

PERINGATAN !!!

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

bekerja sama dengan LPMP mengadakan bimbingan teknis kurikulum 2013 dengan tema kita sukseskan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan kepada 14 sekolah dari 22 sekolah sasaran implementasi kurikulum 2013 Tahun 2017 Kabupaten Serang yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 253/Kep.D/Kr/2017 Tanggal : 7 April 2017 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017.

Gambar 4.2
Surat Tugas Bimbingan Teknis Kurikulum 2013



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 2017

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Gambar 4.3
Bimbingan Teknis kurikulum 2013



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 2017

Tabel 4.1
Data sekolah sasaran implementasi kurikulum 2013 Tahun 2017
Kabupaten Serang

NO	NAMA SEKOLAH	KETERANGAN
1	SMA Negeri 1 BAROS	
2	SMA Negeri 1 BANDUNG	
3	SMA Negeri 1 BINUANG	
4	SMA Negeri 1 CARENANG	
5	SMA Negeri 1 GUNUNG SARI	
6	SMA Negeri 1 KOPO	
7	SMA Negeri 1 PADARINCANG	
8	SMA ATTAUFIQIYYAH	
9	SMAS BINA MACHMUD	
10	SMAS AL FURQON KRAGILAN	
11	SMAS ISLAM DAARUL AHIBAH	
12	SMAS PLUS ASSAADAH	
13	SMAS PGRI KRAGILAN	
14	SMAS AL IRSYAD WARINGIN KURUNG	
15	SMAS AL HUSEN	
16	SMA PESANTREN ALBAYAN ANYER	
17	SMAS NURUL FALAH PETIR	
18	SMAS MANBAUL HIKMAT	
19	SMAS PLUS DOWA AL ISLAMI	
20	SMAS BINA PUTRA KOPO	
21	SMAS AL KHAIRIYAH KELAPIAN	
22	SMAS AL KHAIRIYAH TANARA	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi banten 2017

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Di samping itu dukungan dari dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi berupa bimbingan teknis dinas pendidikan dan kebudayaan juga melakukan kegiatan monitoring dan supervisi oleh pengawas terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah.

Untuk mengetahui kebenaran dari keterangan pihak dinas pendidikan dan kebudayaan, peneliti menanyakan kepada pihak sekolah.

Salah satu jawaban seorang guru SMA Negeri 1 Cikande adalah sebagai berikut :

“Menurut penilaian kami, pihak dinas pendidikan dan kebudayaan kurang mendukung diberlakukannya kurikulum 2013. Hal ini jika dilihat dari indikator sedikitnya kegiatan tentang sosialisasi kurikulum 2013 dan sejenisnya yang melibatkan para guru di sekolah. Kalaupun ada kegiatan sosialisasi atau workshop yang diundang paling hanya perwakilan dari beberapa mata pelajaran saja, padahal jumlah guru kan banyak.” (Wawancara dengan Bai Suwardi, S.Pd tanggal 20 Juli 2017).

Berdasarkan penilaian pihak sekolah, dukungan dari pihak dinas pendidikan dan kebudayaan kurang. indikatornya berupa sedikitnya kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan dalam sosialisasi kurikulum 2013 kepada guru di sekolah. Jika ada kegiatan sosialisasi dan sejenisnya yang diundang hanya perwakilan dari beberapa mata pelajaran yang ada, jadi baru melibatkan sebagian kecil dari jumlah guru yang ada. Keterangan dari guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Ciruas berikut ini, disamping memperkuat keterangan dari informan yang pertama tadi, juga lebih konkret :

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Ya ada dukungan, tapi tidak sepenuhnya, artinya hanya setengah-setengah. Sepertinya kebijakan tentang kurikulum 2013 ini diluncurkan begitu saja tanpa adanya pembimbingan dan sosialisasi yang cukup, masing-masing sekolah dilepaskan begitu saja. Contohnya, mestinya semua atau sebagian besar guru diikuti dalam workshop tentang kurikulum, bukan sistem perwakilan. Memang pernah beberapa kali dilaksanakan, tapi pelaksanaan tidak pernah optimal, terlalu singkat. Atau sengaja disingkat waktunya. Narasumber kurang menguasai betul materi yang diberikan, sehingga kurang bisa dipahami. Peserta harusnya dari tiap mapel dengan waktu dan tempat yang cukup.” (Wawancara dengan Yusuf Effendi, S.Pd tanggal 18 Juli 2017).

Berdasarkan keterangan informan tersebut bahwa dukungan yang diberikan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan bersifat setengah-setengah, tidak sepenuhnya.

Pemberlakuan kebijakan tentang kurikulum 2013 di sekolah - sekolah dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan proses sosialisasi yang cukup. Dalam kegiatan workshop tentang kurikulum yang diundang dari sekolah hanyalah perwakilan, itupun belum mewakili seluruh mata pelajaran yang ada. Narasumber dalam kegiatan tersebut juga dinilai kurang menguasai materi tentang kurikulum 2013. Di samping itu waktu kegiatan dinilai terlalu singkat, atau barangkali memang sengaja disingkat.

4.2.3.2.2 Kepala Sekolah

Fenomena karakteristik profesionalisme implementasi kebijakan kurikulum 2013 yang menyangkut kepala sekolah meliputi : Kualifikasi Kepala Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah

4.2.3.2.2.1 Kualifikasi Kepala Sekolah

Kualifikasi Kepala Sekolah, ditinjau dari aspek kualifikasi pendidikan, pengalaman/masa kerja sebagai kepala sekolah,

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pengalaman/masa kerja sebagai guru, pengalaman dalam kegiatan pengembangan kurikulum, dan tingkat penguasaan kepala sekolah tentang materi kurikulum 2013. Berikut ini akan dipaparkan masing-masing aspek tersebut, dan merupakan rangkuman untuk seluruh SMA yang ada di daerah penelitian, yaitu SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande :

Tabel 4.2
Data Kepala Sekolah

No	Nama Sekolah	Pendidikan	Masa Kerja Sebagai Kepala Sekolah (Th)	Masa Kerja Sebagai Guru (Th)
1	SMAN 1 Ciruas	S.2	16	13
2	SMAN 1 Cikande	S.1	8	14

Sumber: Wawancara dengan informan pada tiap SMA

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui, bahwa perbandingan antara kepala sekolah yang kualifikasi pendidikannya Sarjana S-1 dengan Sarjana S-2 berimbang, yaitu 50,%. Namun demikian menurut informasi di lapangan bahwa kepala sekolah SMA N 1 Cikande sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang Sarjana S-2. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah memiliki pengalaman/masa kerja sebagai kepala sekolah 8-16 tahun, berarti dianggap cukup lama menduduki jabatan sebagai kepala sekolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa diantara semua kepala sekolah tidak satupun yang memiliki pengalaman/masa kerja sebagai guru kurang dari 10 tahun. pengalaman/masa kerja sebagai guru adalah 13 dan 14 tahun.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dalam hal pengalaman kepala sekolah dalam kegiatan pengembangan kurikulum, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di tiap sekolah, tidak satu pun kepala sekolah yang pernah menjadi anggota tim pengembangan kurikulum di tingkat kabupaten atau provinsi, apalagi di tingkat nasional.

Keterlibatan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum hanya terbatas di tingkat sekolahnya masing-masing saja. Sedangkan dalam aspek tingkat penguasaan kepala sekolah terhadap materi kurikulum 2013, semua informan di tiap sekolah menilai kepala sekolah mereka “cukup menguasai.”

4.2.3.2.2 Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepemimpinan seorang kepala sekolah mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan termasuk dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013. Aspek kepemimpinan ini mempengaruhi karakteristik dan profesionalisme, kepatuhan anggota organisasi dan kinerja organisasi, Untuk mengetahui kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande peneliti melakukan wawancara dengan informan dari guru di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande.

“Kepala Sekolah proaktif, guru dipandang sebagai tim, jadi terlalu tidak antara guru dengan kepala sekolah,.....sifatnya sangat terbuka” (Wawancara dengan Yusdi Irfan, S.Pd, M.Pd tanggal 19 Juli 2017)

Kepemimpinan kepala sekolah terbuka dan menempatkan guru sebagai mitra kerja, tidak otoriter gitu pak.....tapi untuk hal-hal tertentu dan dalam keadaan tertentu kadang-kadang agak otoriter, tapi itu jika keadaan mendesak sekali,.....contohnya dalam hal kedisiplinan guru” (Wawancara dengan Drs Rahmat Urip, S.Pd tanggal 20 Juli 2017)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan kepala sekolah umumnya demokratis, tidak otoriter, kooperatif, terbuka dan dalam pergaulannya tidak terlalu mengambil jarak dan bersifat kekeluargaan. Hanya dalam keadaan tertentu dan mendesak kadang-kadang kepala sekolah bersifat otoriter, misalnya berkaitan dengan aspek kedisiplinan guru.

4.2.3.2.3 Guru

Karakteristik profesional dan kompetensi guru mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan kurikulum 2013. Aspek Karakteristik profesional dan kompetensi guru di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande ini meliputi : Rasio jumlah guru dan siswa di sekolah, kualifikasi pendidikan, bersertifikat profesi pendidik, pengalaman guru dalam kegiatan pengembangan kurikulum, pengalaman guru dalam kegiatan sosialisasi kurikulum 2013, tingkat penguasaan guru terhadap materi kurikulum 2013, kepatuhan guru dalam pengembangan silabus, Kepatuhan guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran.

4.2.3.2.3.1. Rasio Guru

Rasio jumlah guru dan siswa di sekolah menurut standar nasional pendidikan yang ideal adalah 1 : 20. Artinya satu orang guru melayani 20 orang siswa. Berdasarkan data yang terkumpul di lapangan, pencapaian rasio tersebut berbeda di SMA negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 4.3 berikut ini.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tabel 4.3
Rasio Jumlah Guru dan Siswa

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Ratio Guru : Murid
1	SMAN 1 Ciruas	1142	59	1 : 20
2	SMAN 1 Cikande	1015	43	1 : 24

Sumber : Wawancara dengan informan

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa SMA Negeri 1 Ciruas dan memiliki rasio jumlah guru dan siswa yang ideal atau sesuai standar nasional sedangkan SMA Negeri 1 Cikande rasio jumlah guru dan siswa yang kurang ideal atau tidak sesuai standar nasional yaitu 1 : 24 artinya 1 orang guru harus melayani 24 siswa

4.2.3.2.3.2. Kualifikasi Pendidikan Guru SMA

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah minimal Sarjana S1 atau D-IV. Data yang ada di lapangan diperlihatkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Kualifikasi Pendidikan Guru

No	Kualifikasi	Jumlah		Prosentase
		SMAN 1 Ciruas	SMAN 1 Cikande	
1	D III	0	0	0%
2	S.1	50	41	89%
3	S.2	9	2	11%
4	S.3	0	0	0%
	Jumlah	59	43	100%

Sumber : Wawancara masing-masing informan

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar guru di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande (89%) sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S-1, sedangkan yang memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana S-2 baru mencapai 11%. Dari data tersebut

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

menggambarkan bahwa guru di SMAN 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande sudah sesuai dengan kualifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4.2.3.2.3.3. Guru yang sudah bersertifikat Pendidik.

Menurut Undang- undang nomor 15 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru yang mengajar di tiap jenjang dan satuan pendidikan harus memiliki sertifikat profesi pendidik. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bertahap, sampai tahun 2017 sebagian besar dari guru di satuan pendidikan sudah dinyatakan lulus proses sertifikasi dan mendapatkan sertifikat profesi pendidik. Seorang guru yang sudah mendapatkan sertifikat profesi pendidik berarti telah dinyatakan sebagai guru profesional.

Tabel 4.5
Guru Bersertifikasi di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande

No	Nama Sekolah	Jumlah Guru	Prosentase
1	SMAN 1 Ciruas	34	57
2	SMAN 1 Cikande	14	32

Sumber : Wawancara masing-masing informan

Dari tabel diatas guru SMA Negeri Ciruas sebanyak 57 % sudah bersertifikat profesi pendidik yang dan telah dinyatakan sebagai guru profesional sedangkan guru SMA Negeri Cikande sebanyak 32 % sudah bersertifikat profesi pendidik yang dan telah dinyatakan sebagai guru profesional.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.2.3.2.3.4. Pengalaman guru dalam kegiatan pengembangan kurikulum.

Kegiatan pengembangan kurikulum adalah salah satu bentuk kompetensi lebih yang dimiliki oleh seorang guru dibandingkan dengan guru lainnya, karena dia dipandang memiliki kemampuan untuk melakukan proses kreatif terhadap kurikulum yang ada, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik di daerahnya, atau minimal di sekolahnya.

Kegiatan pengembangan kurikulum dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten, dan yang paling rendah adalah tingkat satuan pendidikan atau sekolah.

Dalam program kurikulum 2013, dimana sekolah diberi keleluasaan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulumnya sendiri, terdapat kesempatan bagi para guru di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande untuk melakukan kegiatan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana pengalaman guru dalam kegiatan pengembangan kurikulum peneliti memperoleh keterangan dari guru di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande berikut ini.

Untuk mengetahui sejauh mana pengalaman guru SMA Negeri 1 Ciruas dalam kegiatan pengembangan kurikulum peneliti memperoleh keterangan dari guru SMA Negeri 1 Ciruas berikut ini.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Saya hanya terlibat dalam kegiatan pengembangan kurikulum di sekolah sendiri. Jadi tidak pernah di tingkat kabupaten, apalagi di tingkat provinsi. Dan setahu saya ya... banyak guru di sekolah kami yang dilibatkan dalam pengembangan kurikulum di luar sekolah karena banyak yang jadi ketua MGMP Kabupaten Serang.”
(Wawancara dengan Aan Suhendar, S.Pd tanggal 18 Juli 2017).

Untuk mengetahui sejauh mana pengalaman guru SMA Negeri 1 Cikande dalam kegiatan pengembangan kurikulum peneliti memperoleh keterangan dari guru SMA Negeri 1 Cikande berikut ini.

“saya membuat perangkat dan pengembangan kurikulum hanya untuk mata pelajaran sendiri melalui MGMP tingkat kabupaten, sehingga sedikit banyak saya meniru sekolah lain (dalam arti menyesuaikan). Untuk tingkat sekolah hanya dilakukan oleh waka urusan kurikulum (wawancara dengan Suharta, MA tanggal 20 Juli 2017)

“Pernah, tapi hanya di tingkat sekolah sendiri setelah berlakunya kurikulum 2013 sekarang ini. Kan saya sebagai waka kurikulum, tentu saja yang bertanggungjawab dengan adanya program pengembangan kurikulum di sekolah saya. dalam melakukan pekerjaan tersebut saya dibantu oleh seorang asisten kurikulum.”
(Wawancara dengan safiuddin, S.Pd, MM.Pd tanggal 20 Juli 2017).

Menurut keterangan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Cikande umumnya hanya memiliki pengalaman dalam pengembangan kurikulum di sekolahnya sendiri, terutama setelah diberlakukannya kebijakan kurikulum 2013.

Pengalaman dalam pengembangan kurikulum di tingkat yang lebih luas atau lebih tinggi tidak pernah dialami. Hal ini berbeda dengan guru-guru di SMA Negeri 1 Ciruas memiliki pengalaman dalam pengembangan kurikulum di luar sekolahnya sendiri, terutama ditingkat kabupaten banyak dari mereka yang menjabat sebagai ketua MGMP atau pengurus MGMP tingkat kabupaten dan ada beberapa sanggar MGMP yang berpusat di

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SMA Negeri 1 Ciruas, seperti mata pelajaran sejarah, fisika, kimia, Pkn, Penjaskesor dan Sosiologi.

4.2.3.2.3.5. Pengalaman guru dalam sosialisasi kurikulum 2013

Baik sebagai peserta maupun sebagai pemandu atau narasumber adalah penting dalam menambah pengetahuan dan penguasaan guru tersebut terhadap materi kurikulum sekolah. Informan mendeskripsikan pengalamannya ketika diajukan pertanyaan tentang bagaimana pengalamannya dalam kegiatan sosialisasi kurikulum 2013.

“saya belum pernah menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi tentang kurikulum 2013, maklum kemampuan tidak ada, atau kesempatannya yang memang tidak ada... Tapi kalau sebagai peserta sosialisasi pernah sekali ketika awal diberlakukannya kurikulum 2013 tahun 2014 dengan nara sumber kepala sekolah dan pengawas: (Wawancara dengan, H. Sakri, S.Pd tanggal 20 juli 2017).

Menurut guru tersebut dia tidak pernah menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi kurikulum 2013, tetapi kalau terlibat sebagai peserta pernah, yaitu yang diselenggarakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelejaran (MGMP) tingkat kabupaten dan di sekolah. Perlu dijelaskan bahwa guru-guru tiap mata pelajaran bergabung dalam suatu kelompok atau organisasi yang disebut MGMP.

Keberadaan MGMP ini berjenjang mulai dari MGMP tingkat sekolah yang anggotanya terdiri dari para guru mata pelajaran sejenis di sekolah yang sama, dan MGMP tingkat kabupaten yang anggotanya terdiri dari semua guru mata pelajaran yang sama dari seluruh jenjang dan jenis sekolah yang ada.

Bahkan beberapa MGMP ada yang sudah berkembang sampai

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

tingkat provinsi. Berdasarkan keterangan dari informan tersebut juga dapat diketengahkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan juga LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Banten dalam mengadakan semacam pelatihan dan sosialisasi tentang kurikulum 2013 hanya kepada kepala sekolah dan waka kurikulum dengan harapan kepala sekolah dan waka kurikulum kemudian menyampaikannya kepada guru dan warga sekolah yang lain hal ini terjadi karena lingkup wilayahnya yang sangat luas. Jadi masih banyak guru dan sekolah yang tidak mempunyai kesempatan memperoleh informasi dan sosialisasi kurikulum 2013 secara langsung dari narasumber di tingkat provinsi.

4.2.3.2.2.5 Tingkat penguasaan guru terhadap kurikulum 2013

Untuk mengetahui tingkat penguasaan guru terhadap kurikulum 2013 Untuk peneliti mencoba menanyakannya kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang

“Tingkat penguasaan para guru di sekolah kami terhadap kurikulum 2013 ya kira-kira baru 90% saja. Sisanya masih kurang menguasai, dilihat dari keseharian dalam menjalankan tugas sebagai guru sering mengalami hambatan atau kesulitan. Hambatan yang paling menonjol misalnya guru masih terlalu berperan sentral di kelas karena siswa tidak bisa diarahkan untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran.” (Wawancara dengan Trigunadi S.Pd, M.Pd tanggal 18 Juli 2017)

Keterangan Wakil Kepala Sekolah Bidang kurikulum tersebut memberikan gambaran bahwa di SMA Negeri Ciruas tingkat penguasaan terhadap materi kurikulum 2013 belum mencapai angka ideal 100%. Masih ada sekitar 10% guru yang kurang menguasai kurikulum 2013.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Kesulitan yang sering dijumpai adalah masih dominannya peran guru dalam proses pembelajaran di kelas, atau dengan kata lain masih rendahnya pemberdayaan siswa untuk menjadi lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran sebagaimana tuntutan kurikulum 2013. Jika kondisinya demikian maka berarti masih ada guru belum beranjak dari kebiasaan yang dijalankan ketika masih menggunakan kurikulum lama.

“Menurut penilaian saya tingkat penguasaan guru di sekolah saya masih sangat kurang. Masih sering terjadi beda penafsiran diantara para guru terhadap suatu pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis kurikulum. Misalnya dalam hal sistematika RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) dan tata cara penuangan gagasan pembelajaran yang kreatif, penentuan KBM (ketuntasan belajar minimal), cara penilaian dan lain-lain.” (Wawancara dengan Safiudin, S.Pd, MM.Pd tanggal 20 Juli 2017)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketengahkan bahwa tingkat penguasaan guru di SMA Negeri 1 Cikande terhadap materi kurikulum 2013 masih sangat kurang. Hal ini ditunjukkan dengan masih sering terjadinya cara penafsiran yang berbeda di antara para guru dalam menerjemahkan pedoman atau petunjuk teknis kurikulum yang ada. Seperti dalam hal tata cara penuangan gagasan pembelajaran yang kreatif dalam RPP, penghitungan KBM, dan cara penilaian. Apabila terjadi beda pemahaman seperti ini maka menjadi kewenangan Wakil Kepala Sekolah Urusan kurikulum untuk menjelaskan petunjuk atau pedoman yang sebenarnya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.2.3.2.3.7 Tingkat Penguasaan guru dalam pengembangan silabus kurikulum 2013

Salah satu hal baru yang ada dalam kurikulum 2013 adalah adanya kewenangan, atau kesempatan, bagi para guru dalam kegiatan pengembangan silabus mata pelajaran yang diampunya. Memang dalam hal penentuan kompetensi Inti dan kompetensi dasar sudah ditentukan secara nasional oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Kesempatan yang dapat dilakukan guru untuk melakukan pengembangan silabus adalah dalam hal penentuan materi pokok / materi pelajaran, kegiatan pembelajaran / pengalaman belajar, indikator, penilaian (jenis dan bentuk tagihan), penetapan alokasi waktu pelajaran yang dibutuhkan sesuai dengan kalender pendidikan sekolah, dan penentuan sumber / bahan / alat pelajaran.

Untuk mengetahui kepatuhan guru dalam melakukan kegiatan pengembangan silabus, peneliti menanyakannya kepada kepala sekolah SMA Negeri 1 Cikande

“Kalau mau jujur ya ... sebagian besar guru belum dapat melakukan kegiatan pengembangan silabus sebagaimana mestinya. Saya lihat ketika awal semester para guru mengajukan silabus kepada kepala sekolah ya masih tidak jauh berbeda dengan contoh silabus dari pusat, atau masih mengkopi dari MGMP. Padahal kondisi setiap sekolah berbeda, jadi ya silabus mestinya berbeda setiap sekolah .” (Wawancara dengan Mulyadi, S.Pd tanggal 20 Juli 2017).

Penjelasan kepala sekolah SMA Negeri 1 Cikande tersebut cukup memberikan gambaran bahwa kegiatan pengembangan silabus belum dilaksanakan dengan semestinya Oleh sebagian besar guru. Mereka kebanyakan masih menggunakan silabus dari pusat atau menyalin begitu

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

saja silabus yang disusun dalam forum MGMP. Padahal kondisi SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande berbeda, baik tingkat kepandaian peserta didiknya maupun dukungan sarana prasarananya.

Untuk mengetahui alasan guru tidak melakukan kegiatan pengembangan silabus sebagaimana yang dituntut oleh aturan yang ada, peneliti mencoba menanyakan kepada seorang guru di SMA Negeri 1 Cikande.

“Alasan sebagian teman guru tidak melakukan pengembangan silabus antara lain karena keterbatasan kemampuan. Jadi guru merasa kurang mampu melakukan pekerjaan itu. Ada juga yang beralasan tidak memiliki waktu, atau karena merasa silabus yang dibuat oleh MGMP sudah cukup bagus untuk dipakai di sekolah, jadi tidak perlu diubah-ubah lagi...” (Wawancara dengan Susetyo Hadi, S.Pd tanggal 20 Juli 2017).

Faktor ketidakmampuan melakukan pengembangan silabus dijadikan alasan oleh guru untuk tidak melakukan tugas tersebut. Sebagian yang lain beralasan keterbatasan waktu. Dan ada juga yang menyalin apa adanya dari yang dibuat oleh forum MGMP dengan pertimbangan sudah cukup bagus untuk diterapkan di sekolahnya, sehingga tidak dilakukan penyesuaian lagi.

4.2.3.2.3.8 Tingkat penguasaan guru dalam program pembelajaran kurikulum 2013

Tugas seorang guru adalah disamping menyusun dan mengembangkan silabus juga perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran biasanya terdiri dari kalender pendidikan sekolah, analisis minggu efektif belajar, program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan buku daftar nilai.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Perangkat pembelajaran disusun pada awal semester atau awal tahun pelajaran sebagai pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas pada semester atau tahun pelajaran yang bersangkutan.

“Kepatuhan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran di sekolah kami pada tahun terakhir ini sekitar 90%, maksudnya 10% diantara guru yang ada tidak menyusunnnya. Biasanya kepala sekolah kami membuat daftar guru yang membuat dan yang tidak membuat perangkat pembelajaran dan kemudian guru tersebut dipanggil satu persatu untuk dicari penyebab ketidak patuhan guru tersebut. (wawancara Mulyadi, S.Pd tanggal 20 Juli 2017)

Ternyata belum semua guru melaksanakan penyusunan perangkat pembelajaran. Langkah yang ditempuh oleh kepala sekolah dengan membuat daftar guru yang menyusun dan yang tidak menyusun perangkat pembelajaran dan diberikan pembinaan khusus bertujuan agar guru yang tidak menyusun akan melakukannya pada semester berikutnya. Kondisi yang sedikit berbeda dijumpai dari keterangan kepala sekolah SMA Negeri 1 Ciruas berikut ini.

“Semua guru di sekolah kami menyusun perangkat pembelajaran pada awal semester, jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Tetapi kalau melihat kualitas perangkat pembelajaran yang disusun guru memang bervariasi, tetapi tetap dengan acuan utama tetap yang dikeluarkan oleh BSNP (wawancara H. Mohamad Najih, S.Pd, M.Pd tanggal 19 Juli 2017)

Di SMA Negeri 1 Ciruas, semua guru memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran. Walaupun hal ini terlepas dari faktor kualitas perangkat pembelajaran yang disusun oleh para guru, tetapi setidaknya ini mencerminkan suatu kondisi yang cukup baik.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.2.3.2.4 Tim pengembang kurikulum 2013 di sekolah

Keberadaan tim pengembang kurikulum atau tim pengembang kurikulum 2013 di sebuah sekolah memiliki peranan penting bagi pengembangan sekaligus pelaksanaan kurikulum di sekolah tersebut. Tim pengembang kurikulum 2013 juga memiliki tugas pengkajian perangkat kurikulum yang disusun sekolah, dan silabus yang disusun oleh para guru, sehingga di tingkat sekolah ada penjaminan terhadap kualitas dan keterlaksanaan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengetahui keberadaan tim pengembang kurikulum atau tim pengembang kurikulum 2013 peneliti menanyakannya kepada salah satu guru di SMAN 1 Cikande.

“Tim pengembangan kurikulum 2013 ada, tetapi dalam pelaksanaannya Tim Pengembang tidak bekerja. Jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum 2013 ya langsung atau secara otomatis dilaksanakan oleh wakil kepala sekolah urusan kurikulum.” (Wawancara dengan Oom Soma tanggal 20 Juli 2017)

Sekalipun di sekolah lain ada Tim Pengembang kurikulum, akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan tugas tim pengembang kurikulum langsung ditangani oleh Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Dengan demikian tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Wakasek kurikulum jadi bertambah. Keberadaan tim pengembang kurikulum atau tim pengembang kurikulum 2013 di sebuah sekolah memiliki peranan penting bagi pengembangan sekaligus pelaksanaan kurikulum di sekolah tersebut.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tim pengembang kurikulum 2013 juga memiliki tugas pengkajian perangkat kurikulum yang disusun sekolah, dan silabus yang disusun oleh para guru, sehingga di tingkat sekolah ada penjaminan terhadap kualitas dan keterlaksanaan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah pada sekolah-sekolah yang sudah memiliki tim pengembang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau tim pengembang kurikulum 2013 sudah terdapat uraian tugas yang jelas.

“dalam susunan TPK 3 tahun terakhir tidak ada uraian tugas yang jelas dari tim pengembang. Dalam surat keputusan kepala sekolah tentang pengangkatan tim pengembang hanya disebutkan susunan tim saja, tapi tidak ada uraian tugas yang jelas dari masing-masing anggota tim. Barulah pada tahun 2017 ini ada uraian tugas nya” (Wawancara dengan Tri Gunadi, S.Pd. MM.Pd tanggal 18 Juli 2017)

Jawaban yang senada disampaikan juga oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan kurikulum di SMAN 1 Cikande :

“Tidak ada tentang hal itu. Kami hanya menerima SK/ surat keputusan kepala sekolah tentang susunan tim pengembang kurikulum, tetapi tidak ada pembagian tugas yang jelas dan terperinci dari masing-masing anggota yang ada. Jadi dalam pelaksanaannya ya disesuaikan saja dengan kebutuhan situasional.” (Wawancara dengan Safiuddin, S.Pd. MM.Pd tanggal 20 Juli 2017)

Dalam proses pembentukan tim pengembang kurikulum atau tim pengembang kurikulum 2013 kepala sekolah hanya menerbitkan SK (surat keputusan) saja yang berisi susunan keanggotaan tim, di dalamnya tidak ada uraian tugas (job description) yang jelas dari masing-masing anggota tim, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyebabkan hambatan. Untuk mengatasinya tim bekerja disesuaikan dengan kebutuhan yang bersifat situasional, jadi tidak sistematis dan menjadi kurang optimal.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Untuk mengetahui bagaimana Karakteristik dan profesionalisme yang seharusnya dilaksanakan implementor suatu kebijakan dalam hal ini kebijakan kurikulum 2013, penulis melakukan wawancara dengan akademisi pendidikan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa :

Peningkatan profesionalisme guru sebenarnya ditentukan oleh seorang guru itu sendiri.....Apakah seorang guru tersebut ingin menjadi seorang guru yang profesional atau tidak..... Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang guru jika ingin meningkatkan profesionalismenya....pertama dia harus memahami standart tuntutan profesinya...yang kedua...mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan...ketiga ada... organisasi profesi kemudian mampu mengembangkan etos kerja yang baik...serta mempunyai inovasi atau mengembangkan kreativitas terutama memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.. kalau mengenai kompetensi, di Indonesia telah ditetapkan sembilan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai instructional leader, yaitu harus memiliki kepribadian ideal...menguasai landasan pendidikan... menguasai bahan pengajaran...mempunyai kemampuan menyusun program pengajaran...mempunyai kemampuan menilai hasil dan proses belajar mengajar...mempunyai kemampuan menyelenggarakan program bimbingan, kemudian memiliki kemampuan menyelenggarakan administrasi sekolah...memiliki kemampuan bekerja sama dengan teman sejawat dan masyarakat serta memiliki kemampuan menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran...ya...semacam PTK. (Wawancara dengan DR. H Masrupi, M.Pd tanggal 21 Juli 2017)

Dari hasil wawancara dengan akademisi pendidikan bahwa Karakteristik dan profesionalisme yang seharusnya dilaksanakan guru sebagai implementor suatu kebijakan dalam kurikulum 2013 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang guru dalam meningkatkan keprofesionalisme dan kompetensi sebagai berikut :

1. Memahami standart tuntutan profesi yang ada.
Upaya memahami tuntutan standar profesi yang ada harus

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ditempatkan sebagai prioritas utama jika guru kita ingin meningkatkan Profesionalismenya. Sebab persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara, sebagai profesional seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik. Cara satu-satunya untuk memenuhi standar profesi ini adalah dengan belajar secara terus menerus sepanjang hayat, dengan membuka diri yakni mau mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya.

2. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Upaya mencapai kualifikasi dan kompetensi yang di persyaratkan juga tidak kalah pentingnya bagi guru. Dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai maka guru memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi ini dapat ditempuh melalui training, seminar, dan berbagai upaya lain untuk memperoleh sertifikasi.
3. Membangun kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan membina jaringan kerja. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses. Sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Melalui jaringan kerja inilah guru dapat memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya. Dalam hal ini juga dapat di bina melalui jaringan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kerja yang luas dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, misal melalui korespondensi dan mungkin melalui internet.

Apabila hal ini dilakukan secara intensif akan dapat diperoleh kiat-kiat menjalankan profesi dari sejawat guru di Indonesia.

4. Mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Upaya membangun etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen merupakan suatu keharusan di zaman sekarang. Semua bidang dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada konstituenya yaitu siswa, Orang tua dan sekolah. Terlebih lagi pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu guru harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik.

5. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak keinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran. Satu hal lagi yang dapat diupayakan untuk peningkatan profesionalisme guru adalah melalui adopsi inovasi atau pengembangan kreatifitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir. Guru dapat memanfaatkan media presentasi komputer dan juga pendekatan-pendekatan baru bidang teknologi pendidikan. Upaya-upaya guru untuk

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

meningkatkan profesionalismenya tersebut pada akhirnya memerlukan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait agar benar-benar terwujud. Pihak-pihak yang harus memberikan dukungannya tersebut adalah organisasi profesi, pemerintah dan juga masyarakat.

Mengenai kompetensi, di Indonesia telah ditetapkan sembilan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai instructional leader, yaitu :

1. Memiliki kepribadian ideal sebagai guru
2. Penguasaan landasan pendidikan
3. Menguasai bahan pengajaran
4. Kemampuan menyusun program pengajaran
5. Kemampuan menilai hasil dan proses belajar mengajar
6. Kemampuan menyelenggarakan program bimbingan
7. Kemampuan menyelenggarakan administrasi sekolah
8. Kemampuan bekerja sama dengan teman sejawat dan masyarakat;
9. Kemampuan menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.

Dengan begitu tugas guru menjadi lebih luas lagi dari pada proses membangun afeksi, mentransmisikan pengetahuan, dan mengembangkan fungsi psikomotorik sendiri. Disini predikat guru sebagai pendidik itu berkonotasi dengan tindakan - tindakan yang senantiasa memberi contoh yang baik dalam semua perilakunya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Sebagai pendidik guru harus profesional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bab IX pasal 39 ayat 2: Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

4.2.4. Daya Dukung Kebijakan

Daya dukung kebijakan merupakan unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, aspek daya dukung dalam penelitian ini adalah kejelasan komunikasi dan tujuan, isi kebijakan kurikulum 2013, pembiayaan sarana dan prasarana pendukung kurikulum 2013, standar operasional prosedur (SOP) implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Kabupaten Serang .

4.2.4.1 Kejelasan Komunikasi dan Tujuan

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Leo Agustino Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut (2016 : 148). Pada pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka harus menggunakan komunikasi yang baik.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Komunikasi adalah bagian yang penting bagi proses pemahaman suatu kebijakan oleh pelaksana kebijakan, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan.

Dalam hal implementasi kebijakan kurikulum 2013, faktor komunikasi juga merupakan hal yang berpengaruh penting dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande.

Hal ini akan menyangkut bagaimana kebijakan kurikulum 2013 disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten dan atau Kabupaten Serang kepada kepala sekolah SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande, dan oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande kepada para guru di sekolahnya masing - masing. Dalam mengungkap masalah komunikasi ini peneliti mengelompokkan menjadi beberapa pertanyaan, yaitu: (1) Media komunikasi; (2) materi komunikasi; (3) Monitoring dan evaluasi (Monev);

4.2.4.1.1. Media Komunikasi

Media komunikasi biasanya dipergunakan untuk memperjelas pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang, sehingga akan sangat membantu tujuan komunikasi. Dalam hal penyampaian pesan kebijakan tentang kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande juga akan sangat menentukan tingkat kejelasan pesan yang diterima oleh para guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah. Mengingat bahwa kebijakan kurikulum merupakan hal yang penting untuk

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dikuasai oleh para guru, maka penggunaan media komunikasi dalam penjelasan atau sosialisasi tentang kurikulum 2013 oleh narasumber sangatlah diperlukan. Di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande ternyata pemakaian media yang lebih kompleks sudah dilakukan sekolah :

“Media komunikasi yang digunakan adalah disamping berupa audio visual, berupa mikrofon dan speaker ruangan, juga multimedia, misalnya menggunakan laptop dan proyektor untuk lebih memperjelas komunikasi yang disampaikan. Disamping itu juga ada fotokopi makalah yang dibagikan kepada para guru.” (Wawancara dengan Tri Gunadi. S.Pd, M.Pd tanggal 18 Juli 2017 dan Safiuddin, S.Pd.MM.Pd tanggal 20 Juli 2017).

Berdasarkan keterangan informan tersebut bahwa pemakaian media yang lebih kompleks sudah dilakukan. Disamping menggunakan perangkat audio visual dan multimedia, untuk memperjelas pesan-pesan komunikasi kepada peserta rapat atau para guru diberikan fotokopi makalah. Penggunaan media komunikasi seperti ini berdampak pada tingkat pemahaman penerima pesan, dalam hal ini para guru, menjadi lebih baik.

4.2.4.1.2. Pelaku komunikasi

Faktor komunikasi memegang peranan penting dalam proses implementasi kebijakan publik, karena merupakan bagian yang menjembatani pesan-pesan pokok dari pengambil kebijakan dengan pelaksana kebijakan pada level yang lebih rendah.

Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, bisa jadi substansi materi kebijakan publik tidak akan bisa dipahami dengan benar oleh pelaksana di lapangan. Dan hal ini berakibat pada bias informasi yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan publik itu sendiri.

Untuk mendalami fenomena komunikasi dalam proses implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan Kepada informan. Tentang siapakah yang pernah memberikan informasi / sosialisasi tentang kurikulum 2013 di sekolah-sekolah, berikut keterangan dari Kasie kurikulum SMA Provinsi Banten.

“Informasi tentang kurikulum 2013 pertama kali disampaikan melalui workshop di Anyer yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Ada beberapa kepala SMA yang diundang, jadi tidak semua diundang kesana. Nah, dari situ kemudian Kepala Sekolah menyampaikan kepada teman-teman guru di sekolah masing-masing tentang hal-hal yang diperoleh dari Anyer tadi ...” (Wawancara dengan Drs. Adang Abdurahman tanggal 21 Juli 2017).

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa proses komunikasi telah dijalin langsung oleh dinas pendidikan (sekarang telah berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Provinsi Banten, dengan mengundang sebagian dari sekolah-sekolah yang ada di daerah untuk disampaikan informasi tentang kurikulum 2013. Kepala sekolah yang diundang diharapkan dapat melaksanakan kurikulum 2013 di sekolahnya masing-masing. Dengan demikian sekolah yang kepala sekolahnya diundang dalam kegiatan workshop di tingkat provinsi mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang berkompeten.

“Saya memperoleh informasi tentang program kurikulum 2013 dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dinas pendidikan dan kebudayaan tahun 2013” (Wawancara dengan H.Mohammad Najih, S.Pd, M.Pd).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan mengadakan sosialisasi tentang kurikulum 2013, dengan narasumber yang berkompeten. Kemudian, apakah kepala sekolah dan atau pejabat dari dinas pendidikan dan kebudayaan (dalam hal ini pengawas) melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, dapat disimak dari jawaban Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Cikande berikut ini.

“Yang menyampaikan sosialisasi kepada kami di sekolah yaitu kepala sekolah dan pengawas yang memberikan sosialisasi tentang kurikulum 2013 di sekolah kami”
(Wawancara dengan Tri Gunadi, S.Pd, M.Pd tanggal 18 Juli 2017 dan Safiuddin, S.Pd, MM.Pd tanggal 20 Juli 2017).

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa penyampaian sosialisasi tentang kebijakan kurikulum di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande dilaksanakan kepala sekolah dan pengawas SMA. Sehingga guru-guru di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMAN 1 Cikande dapat mengetahui tentang kurikulum 2013 secara benar dan menyeluruh perlu disampaikan oleh orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai tentang kurikulum 2013.

Akan tetapi kelanjutannya Informasi dari kepala sekolah disampaikan hanya secara sekilas saja, disisipkan pada forum rapat-rapat pertemuan biasa, bukan pada forum khusus yang membahas tentang kurikulum 2013. Hal ini diperkuat oleh jawaban dari wakil kepala sekolah urusan kurikulum SMA Negeri 1 Cikande :

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Di sekolah kami yang pernah memberikan informasi atau sosialisasi tentang kurikulum 2013 adalah kepala sekolah. Informasi tersebut biasanya disisipkan pada rapat-rapat pembinaan dengan guru. Jadi tidak dalam rapat khusus, misalnya in house training tentang kurikulum 2013. Pernah juga pengawas sekolah, dalam hal ini pengawas pendidikan menengah, tetapi setahu saya hanya sekali memberikan informasi tentang kurikulum 2013 pada awal diberlakukannya, itupun hanya secara umum di depan dewan guru .”
(Wawancara dengan Safiuddin, S.Pd, MM.Pd).

Perlu diketahui bahwa kebanyakan sekolah mengagendakan rapat-rapat pertemuan dengan dewan guru secara rutin, biasanya tiap satu bulan minimal sekali. Dalam forum rapat tersebut dibicarakan berbagai masalah yang ada di lingkungan sekolahnya, termasuk digunakan sebagai forum sosialisasi jika ada kebijakan baru dari pemerintah atau dari sekolah itu sendiri. Secara insidental pengawas pendidikan menengah (atau sering disebut pengawas sekolah) datang ke sekolah-sekolah, untuk melakukan kegiatan supervisi dan monitoring.

Pihak sekolah dapat memanfaatkan kedatangan pengawas sekolah agar dapat mengkomunikasikan informasi tentang kebijakan-kebijakan pendidikan yang baru, termasuk kurikulum 2013. Namun sebagaimana jawaban dari informan diatas, ternyata informasi yang disampaikan kepada dewan guru oleh pengawas sekolah sangat terbatas dan secara umum.

Kemudian untuk mengetahui tindakan atau langkah yang ditempuh oleh pihak sekolah supaya mengetahui informasi yang lebih lengkap tentang kurikulum 2013 jika informasi yang didapat dari kepala sekolah dan pengawas sekolah sangat terbatas, dapat disimak dari jawaban guru di SMA Negeri 1 Cikande berikut ini.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“... sepertinya narasumber yang lain belum pernah datang atau diundang ke sini untuk menyampaikan masalah kurikulum. Jadi kami tahu tentang kurikulum 2013 ya dari kepala sekolah, sumber-sumber lain, misalnya buku-buku pedoman yang dikirim dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten atau provinsi dan juga dokumen kurikulum 2013 yang dimiliki oleh sekolah.” (Wawancara dengan , Agus Suyono, S.Pd tanggal 20 Juli 2017).

Dengan pertimbangan kurangnya informasi secara langsung melalui komunikasi dari pihak dinas pendidikan dan kebudayaan, maka untuk melengkapi informasi tentang kurikulum 2013 pihak sekolah mendasarkan diri pada buku-buku pedoman yang diberikan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi. Dengan demikian guru-guru mempelajari kurikulum 2013 dengan membaca sendiri dari buku-buku.

4.2.4.1.3 Metode komunikasi

Metode yang dipakai dalam proses komunikasi antara pejabat yang berkompeten dalam masalah kebijakan dengan staf atau bawahan memiliki peran terhadap keberhasilan suatu kebijakan publik.

Metode yang baik akan dapat menyampaikan pesan komunikasi dengan baik pula, demikian pula sebaliknya jika metode komunikasi yang digunakan kurang tepat, maka pesan-pesan yang akan disampaikan dalam komunikasi kurang mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Keterangan dari kepala sekolah SMA Negeri 1 Ciruas. memberikan gambaran sebagai berikut.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Dalam komunikasi tentang masalah kurikulum 2013 biasanya pihak dinas pendidikan dan kebudayaan hanya menggunakan metode ceramah saja. Kadang-kadang ada satu-dua pertanyaan dari peserta rapat. Tidak pernah menggunakan metode komunikasi yang lain, seperti diskusi, studi kasus, atau lainnya. Peserta rapat diberikan fotokopi ringkasan materi atau buku-buku yang berkaitan.” (Wawancara dengan H. Mohammad Najih, S.Pd, M.Pd tanggal 19 Juli 2017).

Metode komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi kurikulum 2013 oleh dinas pendidikan dan kebudayaan terhadap para kepala sekolah hanya menggunakan metode ceramah, kemudian muncul pertanyaan dari peserta rapat. Jadi proses komunikasi yang berlangsung sudah dua arah, dari pemberi pesan kepada penerima pesan dan juga sebaliknya. Kemudian untuk memperjelas pesan-pesan komunikasi kepada para peserta diberikan fotokopi ringkasan materi dan atau buku-buku yang relevan.

Untuk mengetahui metode komunikasi yang digunakan oleh para kepala sekolah dalam meneruskan informasi yang telah diperoleh dari dinas pendidikan dan kebudayaan kepada para guru di sekolahnya masing-masing, dapat dilihat dari keterangan perwakilan guru di SMA Negeri 1 Ciruas berikut ini.

“Tekniknya, ya ... hanya ceramah biasa, kadang diselingi dengan tanya jawab. Seingat saya sih tanya jawab tentang kurikulum 2013 sangat sedikit sekali atau mungkin tidak ada, entah karena memang sudah jelas atau memang guru-guru pada bingung, sehingga malah tidak mau bertanya.” (Wawancara dengan Asep Yanto, S.Pd tanggal 18 Juli 2017).

Metode komunikasi yang digunakan di sekolah oleh kepala sekolah ketika menyampaikan informasi tentang kurikulum 2013 sama dengan yang digunakan oleh pihak dinas pendidikan dan kebudayaan ketika

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

menyampaikannya kepada kepala sekolah, yaitu ceramah. Berarti metode komunikasi secara klasikal, dari satu orang pemberi pesan kepada banyak penerima pesan. Tetapi pertanyaan dari peserta hampir tidak pernah ada, dengan alasan sudah jelas atau mungkin sebaliknya. Jadi komunikasi yang terjadi hanya satu arah.

Keterangan lain juga diberikan oleh guru yang berbeda di SMA Negeri 1 Cikande, sebagai berikut :

“Teknik yang digunakan dalam penyampaian informasi dalam sosialisasi kurikulum 2013 hanya ceramah saja. Kadang - kadang ada pertanyaan dari peserta. Dan kegiatan ini biasanya diselipkan dalam acara rapat-rapat pembinaan biasa yang diadakan secara insidental. Di sekolah kami belum pernah diadakan kegiatan khusus yang isinya hanya membahas mengenai kurikulum 2013. ”
(Wawancara dengan Rahmat Urip tanggal 20 Juli 2017).

Jawaban tersebut memberi gambaran bahwa kepala sekolah tidak pernah menggunakan metode komunikasi yang lain selain ceramah. Metode inipun diadakan tidak secara khusus untuk membahas kurikulum 2013 saja, tetapi hanya disisipkan dengan kegiatan rapat yang juga membahas masalah lain selain kurikulum 2013. Ternyata sekolah tidak mengagendakan kegiatan yang secara khusus hanya membahas masalah kurikulum 2013.

4.2.4.1.4 Intensitas Komunikasi

Intensitas komunikasi sangat berperan terhadap keberhasilan sosialisasi suatu kebijakan. Untuk menjelaskan isi kebijakan beserta hal-hal yang berkaitan dengannya, diperlukan proses komunikasi yang sering dijalin antara pihak pejabat birokrasi dengan pelaksana kebijakan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Seberapa sering komunikasi dijalin antara pihak dinas pendidikan dan kebudayaan di tingkat kabupaten dengan pihak kepala sekolah, dan juga seberapa sering komunikasi antara pihak kepala sekolah dengan para guru mengenai masalah kurikulum 2013, ikut menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah.

Dalam hal intensitas komunikasi yang dijalin oleh dinas pendidikan dan kebudayaan dalam mensosialisasikan program kurikulum 2013 di sekolah-sekolah dapat disimak dari keterangan kepala sekolah SMA Negeri 1 Ciruas berikut ini.

“Proses komunikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang terhadap sekolah-sekolah tentang masalah kurikulum 2013 hanya dilakukan pada tahun awal pemberlakuan kurikulum 2013 saja, tepatnya pada tahun 2013. Itupun dilakukan dalam sebuah rapat yang relatif singkat, dengan mengundang para kepala sekolah atau yang mewakili. Nah, setelah tahun berikutnya dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tidak lagi menyampaikan masalah kurikulum 2013. jadi menurut saya, dalam hal ini komunikasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tidak maksimal.” (Wawancara dengan H. Mohamad Najih, S.Pd. M.Pd).

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa ternyata pihak dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten hanya melakukan komunikasi berupa sosialisasi kebijakan kurikulum 2013 pada awal tahun pemberlakuan kurikulum 2013, yaitu pada tahun 2013. Pada tahun - tahun selanjutnya tidak lagi dilakukan.

Proses komunikasi pun hanya melalui sebuah rapat yang relatif singkat, berarti tidak intensif membahas kebijakan kurikulum 2013. Sedangkan di sekolah sendiri, kepala sekolah ternyata juga kurang intensif dalam mengkomunikasikan kebijakan kurikulum 2013 ini. Hal ini

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

diterangkan oleh wakasek urusan kurikulum di SMA Negeri 1 Ciruas berikut ini.

“Dalam satu tahun terakhir sosialisasi tentang kurikulum 2013 di sekolah kami mungkin hanya sekali saja dari kepala sekolah sendiri. Tapi pada tahun-tahun sebelumnya tidak diadakan sosialisasi, informasi kurikulum 2013 hanya dilakukan sebagai informasi sisipan pada rapat dinas kenaikan kelas, jadi tidak terlaksana sesuai jadwal atau secara terencana dengan baik.” (Wawancara dengan Tri Gunadi, S.Pd M.Pd tanggal 18 Juli 2017)

Keterangan informan tersebut memberikan gambaran bahwa proses komunikasi yang dijalin oleh kepala sekolah dengan para guru di sekolahnya tidak intensif. Hal ini berlangsung tidak hanya pada satu tahun terakhir ini saja, tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya. Proses komunikasi untuk mensosialisasikan kebijakan kurikulum 2013 juga tidak terjadwal atau terencana secara baik.

4.2.4.1.5 Audiens / peserta komunikasi

Audiens atau peserta komunikasi ikut berperan dalam proses sosialisasi suatu kebijakan di sebuah institusi, termasuk di sekolah.

Proses komunikasi yang hanya melibatkan sebagian komponen atau karyawan institusi saja, tentu saja berbeda dampaknya jika dibandingkan dengan proses komunikasi yang melibatkan seluruh komponen atau karyawan.

Jika seluruh komponen atau staf dilibatkan untuk memperoleh informasi yang sama dari pihak pimpinan institusi, maka kesamaan pemahaman terhadap isi suatu kebijakan akan mudah dicapai. Bagaimana dengan kenyataan di sekolah - sekolah dalam hal kebijakan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kurikulum 2013, dapat disimak dari jawaban guru SMA Negeri 1 Ciruas :

“Yang hadir sebagai audiens dalam kegiatan sosialisasi adalah semua guru yang ada di sekolah ini, baik guru tetap maupun guru tidak tetap. Disamping itu juga karyawan, tetapi hanya diwakili oleh kepala tata usaha saja, sedangkan karyawan lain tidak ikut diundang dengan pertimbangan tidak berkaitan langsung dengan masalah kurikulum 2013. ” (Wawancara dengan Yusuf Effendi, S.Pd Tanggal 18 Juli 2017).

Jawaban tersebut menegaskan bahwa semua guru di sekolah, baik guru tetap maupun guru tidak tetap, dilibatkan dalam komunikasi untuk mensosialisasikan kebijakan kurikulum 2013. Tetapi sebagai bagian pendukung kegiatan administrasi sekolah, yaitu bagian tata usaha, tidak semua karyawan tata usaha dilibatkan dalam proses komunikasi tersebut. Tetapi hanya diwakili oleh seorang kepala tata usahanya saja. Bagaimana dengan komponen sekolah yang lain, yaitu komite sekolah dan siswa, dapat disimak dari jawaban guru di SMA Negeri 1 Cikande berikut ini.

“Yang jadi audiens atau peserta dalam kegiatan sosialisasi tentang kurikulum 2013, ya... hanya semua anggota dewan guru dan sebagian karyawan. Sedangkan siswa dan pengurus komite sekolah tidak ikut dilibatkan. Informasi kepada siswa disampaikan pada kegiatan upacara bendera secara sekilas saja.” (Wawancara dengan Agus Suyono, S.Pd tanggal 20 Juli 2017)

Deskripsi informan tersebut menggambarkan kondisi yang hampir sama dengan jawaban informan pertama, bahwa yang diundang dalam komunikasi untuk mensosialisasikan kurikulum 2013 hanya semua guru dan sebagian dari karyawan tata usaha saja. Pihak komite sekolah tidak dilibatkan atau ikut diundang, demikian pula halnya dengan siswa. Informasi tentang pemberlakuan kurikulum 2013 di sekolah kepada para siswa disampaikan ketika kegiatan upacara bendera, yang biasanya

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dilaksanakan tiap hari Senin. Itupun disampaikan hanya sekilas saja.

4.2.4.1.6 Materi dalam Komunikasi

Keberhasilan proses komunikasi suatu kebijakan ikut dipengaruhi oleh materi yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Jika materinya relevan, maka akan lebih mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan di lapangan dan sesuai dengan tujuan kebijakan, tetapi jika tidak relevan maka tentu akan menimbulkan pemahaman atau penafsiran yang keliru terhadap isi suatu kebijakan. Dengan demikian maka tujuan kebijakan akan tidak mudah tercapai karena pelaksanaan yang berbeda dengan isi kebijakan yang sebenarnya.

Berkaitan dengan hal itu, guru SMA Negeri 1 Cikande memberikan deskripsi tentang yang terjadi di sekolahnya berikut ini.

“Menurut penilaian saya sih, materi yang disampaikan dalam sosialisasi ada yang relevan dengan masalah yang berhubungan dengan kurikulum 2013, tetapi ada juga yang tidak relevan. Karena ya itu tadi pa ..., acara sosialisasi tersebut tidak diadakan secara khusus hanya membahas kurikulum 2013 saja, tetapi digabungkan dengan pembahasan agenda lain, jadi tidak terfokus.” (Wawancara dengan Rahmat Urip, S.Pd tanggal 20 Juli 2017)

Materi yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada para guru dan karyawan ternyata ada yang relevan, dan sebagian lagi tidak relevan. Hal ini terjadi akibat proses komunikasi untuk sosialisasi kebijakan kurikulum 2013 tidak dilaksanakan secara khusus, tetapi dicampurkan dengan agenda pembahasan masalah lain di sekolah.

Faktor tiadanya forum khusus untuk dipergunakan sebagai ajang komunikasi tentang kebijakan kurikulum 2013, mengakibatkan materi yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

disampaikan sebagian tidak relevan dengan kurikulum 2013, walaupun mungkin masalah tersebut penting bagi sekolah yang bersangkutan. Informasi yang tidak terfokus terhadap suatu permasalahan bisa mengakibatkan peserta kurang dapat memahami dengan baik, karena bercampur dengan informasi tentang masalah lain yang tidak berkaitan.

Ada hal lain yang ikut menentukan pemahaman materi yang terkait dengan kebijakan kurikulum 2013, yaitu tingkat kejelasan materi komunikasi. Tingkat kejelasan materi dalam proses komunikasi berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari komunikasi tersebut. Apabila materi yang disampaikan dalam komunikasi cukup jelas, maka pihak penerima pesan akan mudah menangkap pesan tersebut, dan menginterpretasikannya secara benar pula. Dengan demikian maka maksud dari pemberi pesan akan diterima sama oleh para penerima pesan.

Dalam memberikan penilaian terhadap tingkat kejelasan materi komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, dapat dilihat dari jawaban guru SMA Negeri 1 Ciruas berikut ini.

“Tingkat kejelasan materi yang disampaikan dalam sosialisasi tentang kurikulum 2013 cukup jelas, tetapi untuk beberapa bagian memang harus diakui kurang jelas, misalnya tentang hal-hal yang memungkinkan terjadinya beda penafsiran para guru dari tiap sekolah terhadap suatu ketentuan yang ada.” (Wawancara dengan Yusdi Irfan, S.Pd M.Pd tanggal 18 Juli 2017)

Untuk hal-hal yang memungkinkan terjadinya beda penafsiran para guru dari tiap sekolah terhadap suatu ketentuan yang ada, dapat dicontohkan menurut jawaban dari wakasek urusan kurikulum SMA Negeri 1 Ciruas berikut ini.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Memang dalam kebijakan tentang kurikulum 2013 dimungkinkan terjadinya beda penafsiran para guru dari tiap sekolah terhadap suatu ketentuan yang ada. Contohnya dalam hal penetapan ketuntasan belajar minimal, penghitungan nilai rapor, kriteria kenaikan kelas, penentuan penambahan jam pelajaran dalam seminggu, dan lain-lain ...” (Wawancara dengan guru Tri Gunadi, S.Pd M.Pd tanggal 18 Juli 2017)

Menurut keterangan informan tersebut, untuk hal-hal tertentu dalam kebijakan kurikulum 2013 dimungkinkan terjadinya penafsiran yang berbeda antar sekolah, antara lain dalam prosedur penentuan kriteria ketuntasan minimal, metode penghitungan nilai rapor (laporan hasil belajar), kriteria kenaikan kelas, dan penambahan jam pelajaran dalam seminggu. Menurut struktur kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran dalam setiap minggu adalah paling sedikit 42 jam pelajaran untuk kelas X dan untuk kelas XI dan XII menjadi sebanyak-banyaknya 44 jam pelajaran.

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang seharusnya dilaksanakan implementor suatu kebijakan dalam hal ini kebijakan kurikulum 2013, penulis melakukan wawancara dengan akademisi pendidikan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa :

“Komunikasi kebijakan ialah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kebijakan dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kebijakan tersebut. Tugas inti dari aparatur adalah mengkomunikasikan kebijakan dengan baik, supaya objek komunikasi lebih paham dan mengerti tentang maksud dan tujuan dari materi yang di komunikasikan. Pesan pesan yang disampaikan oleh aparatur kadangkala berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain, tetapi proses komunikasi dapat berjalan lancar apabila pesan pesan yang disampaikan oleh apartur tidak bertentangan atau saling mendukung satu sama lain” (Wawancara dengan DR. H. Masrupi, M.Pd tanggal 21 Juli 2017)

Dari hasil wawancara dengan akademisi pendidikan bahwa tugas inti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengkomunikasikan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kebijakan kurikulum 2013 dengan baik agar supaya implementor kebijakan kurikulum 2013 yaitu kepala sekolah dan guru lebih paham dan mengerti tentang maksud dan tujuan dari materi kurikulum 2013.

Penyaluran komunikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dalam Implementasi kebijakan kurikulum 2013 akan dapat menghasilkan suatu pelaksanaan yang baik apabila penyampaian informasi tersebut dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi akan sampai dengan baik kepada seluruh implementor kebijakan yaitu kepala sekolah dan guru di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande.

4.2.4.1.7. Kegiatan Monitoring dan Supervisi

Monitoring dan supervisi sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan, yang antara lain bertujuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan di daerah atau di sekolah-sekolah.

Kegiatan ini biasanya dilakukan secara berjenjang, misalnya dinas pendidikan dan kebudayaan melakukan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan di tingkat provinsi atau dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi.

dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi melakukan kegiatan monitoring dan supervisi di tingkat kabupaten, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten melakukan kegiatan monitoring dan supervisi di

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

sekolah - sekolah. Namun demikian bisa jadi dilakukan kegiatan monitoring dan supervisi tidak mengikuti hirarki sebagaimana disebutkan diatas misalnya pihak dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi melakukan kegiatan monitoring dan supervisi secara langsung di sekolah-sekolah.

Untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah ada kegiatan monitoring dan supervisi, dapat disimak dari keterangan kepala sekolah SMA Negeri 1 Ciruas berikut ini.

“Belum pernah. Sejak pertama kali kurikulum 2013 diberlakukan di sekolah kami sekitar empat tahun yang lalu belum pernah diadakan kegiatan monitoring dan supervisi dari pihak manapun. Baik itu dari dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, atau dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten. Jadi kami tidak tahu pada bagian mana yang perlu diperbaiki, dan bagian mana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, kalau kami membawa konsep kurikulum 2013 untuk diketahui dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, tidak ada upaya untuk meneliti isi kurikulum 2013, mereka yang berwenang langsung menandatangani lembar pengesahan yang sudah kami buat.(Wawancara dengan H. Mohamad Najih, S.Pd M.Pd tanggal 19 Juli 2017).

Menurut jawaban tersebut dapat diambil gambaran bahwa tidak ada kegiatan monitoring dan supervisi dari pihak dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi maupun dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah tersebut selama empat tahun terakhir ini sejak kebijakan tentang kurikulum 2013 diberlakukan.

Dengan demikian pihak sekolah tidak tahu bagian manakah pada kurikulum sekolahnya yang terdapat kesalahan atau kekurangan, karena salah satu manfaat adanya monitoring dan supervisi sebenarnya adalah untuk mengetahui adatidaknya kekeliruan dan atau kekurangan dalam

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

implementasi kebijakan di lapangan.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan di lapangan, diperlukan kegiatan monitoring dan supervisi untuk memantau dan mengevaluasi keterlaksanaannya di lapangan. Demikian halnya dengan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah, untuk memantau dan mengevaluasi apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan atau belum, juga diperlukan kegiatan tersebut. Untuk mengetahui pihak manakah yang telah melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi di sekolah-sekolah, Peneliti memperoleh keterangan dari kepala sekolah SMA Negeri 1 Cikande berikut ini.

“Petugas yang melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi ke sekolah adalah pengawas itupun dilaksanakan pada saat pengawas melakukan kegiatan supervisi, jadi bukan merupakan agenda khusus monitoring tentang kurikulum 2013” (wawancara dengan Mulyadi, S.Pd tanggal 20 Juli 2017).

Di sekolah tersebut, sejak diberlakukannya kurikulum 2013 Dua tahun yang lalu yang melakukan monitoring dan supervisi hanya pengawas SMA dan dilakukan sekaligus melaksanakan agenda supervisi pengawas secara umum, tidak ada fokus tentang materi kurikulum 2013.

Untuk mengetahui bagaimana monitoring dan evaluasi yang seharusnya dalam suatu kebijakan dalam hal ini kebijakan kurikulum 2013, penulis melakukan wawancara dengan akademisi pendidikan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa :

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Peran dan fungsi monev sangat penting... Terutama untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan benar-benar “on the track” sesuai tujuan implementasi kebijakan kurikulum 2013. Monitoring dapat disebut sebagai “*on going evaluation*,” yang dilakukan sementara kegiatan berlangsung untuk melakukan perbaikan “di tengah jalan” bila diperlukan. Sementara Evaluasi dimaksud adalah “*terminate evaluation*,” yang dilakukan pada akhir kebijakan untuk memastikan apakah pelaksanaan dan manfaat kebijakan sesuai tujuannya atau tidak. Lalu, hasilnya dapat dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan kebijakan berikutnya. (Wawancara dengan DR. H. Masrupi, M.Pd tanggal 21 Juli 2017)

Dari hasil wawancara dengan akademisi pendidikan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bahwa fungsi Monitoring sangat penting selalu berkaitan dengan supervisi, juga mempunyai hubungan erat dengan evaluasi program. UNESCO (1982) mengidentifikasi lima kaitan dan perbedaan antara monitoring dan evaluasi.

Pertama, fokus monitoring adalah pada kebijakan yang sedang dilaksanakan. Bukan pada konteks kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Sedangkan evaluasi sering dilakukan sejak perencanaan kebijakan.

Kedua, monitoring menitikberatkan pada aspek kuantitatif dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat menjadi bahan untuk kegiatan evaluasi. Evaluasi dapat melengkapi hasil monitoring dengan data tambahan yang diperlukan sesuai dengan tujuan evaluasi yang mengarah pada aspek kualitatif. Monitoring berhubungan dengan dimensi kuantitatif tentang efektivitas kebijakan seperti banyaknya output kebijakan, sedangkan evaluasi lebih berkaitan dengan dimensi kualitatif tentang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

efektivitas program seperti sejauhmana output sesuai dengan norma atau standar yang telah ditentukan.

Ketiga, monitoring mencakup usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung kebijakan, seperti faktor logistik, yang dapat membantu atau mempengaruhi penampilan kebijakan, sedangkan evaluasi mengarah pada upaya menyiapkan bahan masukan untuk pengambilan keputusan tentang ketepatan perbaikan peluasan atau pengembangan kebijakan.

Keempat, kontribusi yang dapat dimanfaatkan dengan segera dari hasil monitoring adalah untuk kepentingan pengelolaan kebijakan, sedangkan kontribusi evaluasi lebih terkait dengan pengambilan keputusan tentang penyusunan rancangan dan isi program.

Kelima, monitoring dan evaluasi merupakan proses yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Walaupun tekannya berbeda, keduanya mempunyai arah yang sama yaitu untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) membeberkan tiga hal yang menjadi poin monitoring dan evaluasi (monev) dalam kurikulum 2013. Pertama mengenai buku, kedua tentang proses pelaksanaan pembelajaran dan ketiga menyangkut kemampuan guru.

Evaluasi terhadap buku diperlukan agar terdapat perbaikan di periode berikutnya. Sebab buku dalam kurikulum bersifat model yang harus diidealkan dengan tujuan kurikulum. Sementara untuk guru, kementerian berharap memiliki rapor penilaian seluruh guru. Penilaian

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dapat diperoleh melalui pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan. Evaluasi juga akan mempersiapkan pendampingan terhadap para guru sedangkan tahap ketiga untuk kompetensi, para guru akan diukur rasionalitasnya terhadap kurikulum.

Ketiga poin monitoring dan evaluasi tersebut justru yang menjadi titik lemah dari Kementerian Pendidikan selama ini yang seperti tidak pernah peduli dengan situasi yang dialami oleh guru-guru di lapangan. Misalnya persoalan tentang penilaian. Selama ini, sistem evaluasi pendidikan kita adalah evaluasi yang sifatnya formatif. Evaluasi formatif menganggap penilaian pendidikan itu bagian dari pembelajaran itu sendiri, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan kemajuan, kekuatan, dan kelemahan pengalaman belajar siswa. Model evaluasi seperti ini hanya dapat dilakukan guru di dalam kelas dan hal itu dikarenakan guru yang berinteraksi secara langsung dengan siswa, sehingga mereka yang mengetahui bagaimana membantu siswa maju dalam proses belajar.

Evaluasi formatif membandingkan kemajuan siswa dengan tingkat kompetensi sebelumnya, tidak memperbandingkan kemajuan antar-peserta didik yang justru selama ini dipraktekkan, seperti penerapan Ujian Nasional (UN), misalnya Sistem evaluasi yang diterapkan dalam UN adalah bersifat sumatif, di mana model ini hanya menilai sejauh mana kualitas pembelajaran peserta didik setelah mengalami proses belajar dalam kurun waktu tertentu.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Fokus model ini adalah pada sejauh mana peserta didik menguasai materi, lantas diperbandingkan dengan peserta lain. Karena itu, muncullah berbagai macam pemeringkatan, seperti pemeringkatan antar siswa, antar sekolah, antar kabupaten dan antar provinsi. Padahal, meskipun dapat digunakan untuk pemeringkatan, model ini tidak memberikan informasi apa-apa tentang yang terjadi di kelas, bagaimana kualitas guru mengajar, ketersediaan dan akses siswa terhadap materi pembelajaran serta kualitas pendidikan. Karena itu, seandainya saja seorang siswa dapat mengerjakan soal matematika dalam UN dan memperoleh nilai 10, kita tidak dapat otomatis mengatakan bahwa guru yang mengajar di sekolah tersebut memang memiliki kompetensi tinggi, sarana dan prasarana lengkap, serta kualitas pendidikan yang sudah baik.

4.2.4.2 Isi Kebijakan Kurikulum 2013

Menurut Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Sahya Anggara kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

Isi kebijakan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 di sekolah yang berkaitan dengan isi kebijakan ada lah fenomena-fenomena berikut (1) Relevansi kurikulum 2013; (2) Kelengkapan dokumen kurikulum 2013 (3) Pengesahan dan perubahan dokumen kurikulum 2013.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.2.4.2.1 Relevansi Kurikulum 2013

Salah satu prinsip pengembangan kurikulum 2013 adalah relevansinya dengan kebutuhan siswa. Sekolah di masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang relatif berbeda satu sama lain. Sebuah sekolah yang berdiri di tengah - tengah masyarakat industri sudah barang tentu berbeda dalam mengakomodasi kebutuhan siswanya dibandingkan dengan sekolah yang berlokasi di tengah-tengah masyarakat pedesaan yang agraris, demikian pula sekolah di sebuah kota kecamatan yang terpencil, tentu berbeda dengan sekolah yang berlokasi di pusat sebuah kota besar.

Untuk mengetahui kesesuaian kurikulum 2013 dengan kebutuhan siswa, peneliti mencoba menanyakan pendapat Wakasek kurikulum SMA Negeri 1 Cikande berikut ini :

“kurikulum 2013 yang disusun di sekolah kami sebagian sudah relevan dengan kebutuhan siswa, tetapi kami akui memang belum sepenuhnya optimal. Jadi ya ... masih perlu dilakukan penyempurnaan terus menerus, pa ... Karena kebutuhan siswa kan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, jadi kurikulum sekolah juga harus ikut menyesuaikan.”
(Wawancara dengan Safiudin, S.Pd, MM.Pd tanggal 20 Juli 2017).

Berdasarkan keterangan dari Wakasek kurikulum SMA Negeri 1 Cikande dapat diungkapkan, bahwa sebagian isi kurikulum 2013 di sekolahnya sudah relevan dengan kebutuhan siswa, namun sebagian lainnya belum bisa mengakomodasi kebutuhan siswa sepenuhnya.

Hal ini berkaitan dengan terus berkembangnya perubahan zaman, yang tidak selalu dapat diikuti oleh sekolah dalam menyusun

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kurikulumnya. Jawaban yang lebih jelas dikemukakan oleh Wakasek kurikulum SMA Negeri 1 Ciruas, dengan memberikan contoh yang lebih realistik :

“Sudah, kurikulum 2013 yang ada relevan dengan kebutuhan siswa kami. Tetapi kami akui tentu masih perlu pengembangan lagi. Misalnya masalah KBM yang harus ditingkatkan lagi, peminatan dan lintas minat yang benar-benar memberi manfaat praktis bagi siswa setelah lulus, dan juga aspek pengembangan karakter yang diharapkan bisa membentuk karakter siswa yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kehidupan.” (Wawancara Tri Gunadi, S.Pd, M.Pd tanggal 18 Juli 2017).

Menurut penilaian informan tersebut, walaupun kurikulum 2013 yang disusun oleh sekolahnya sudah relevan dengan kebutuhan siswanya, tetapi masih diperlukan penyesuaian dan pengembangan lagi.

Ada tiga hal yang dinilai belum sesuai kebutuhan siswa. Pertama, masalah KBM (ketuntasan belajar minimal) tiap mata pelajaran. Karena sekolahnya sudah berstatus SKM (Sekolah Katagori Mandiri), maka standar KBM secara nasional sudah ditentukan minimal 2,65. Tetapi dalam kenyataannya hampir tiap mata pelajaran masih mematok KBM dibawa 2,65. Kedua, mata pelajaran peminatan dan lintas minat yang diharapkan benar-benar memberi manfaat praktis bagi siswa setelah lulus dari sekolah. Ketiga, adalah masalah penguatan karakter yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan kegiatan ekstrakurikuler diharapkan bisa membentuk karakter siswa yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kehidupan. Relevansi / kesesuaian kurikulum 2013 dengan pedoman yang ada.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Sistematika dan isi dari dokumen kurikulum 2013 yang disusun oleh sekolah disusun berdasarkan pedoman yang ada. Untuk beberapa bagian memang disesuaikan dengan kondisi sekolah, karakteristik peserta didik, dan faktor lingkungan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, maka sebagian besar informan di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande menyatakan dokumen kurikulum 2013 di sekolahnya disusun berdasarkan pada pedoman yang ada.

Informasi tambahan dari Staf Wakasek kurikulum SMA Negeri 1 Cikande tentang keterlaksanaan kurikulum 2013, memberikan keterangan sebagai berikut.

“Berdasarkan penilaian kami dan juga hasil monitoring dan supervisi dari pengawas sekolah beberapa waktu yang lalu, maka dokumen kurikulum 2013 di sekolah kami sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ada, tetapi pada beberapa bagian masih perlu revisi dan penyesuaian. Misalnya pada penyusunan KBM / ketuntasan belajar minimal, pengembangan silabus, RPP/ rencana pelaksanaan pembelajaran, dan pedoman penilaian.” (Wawancara dengan Dadan, S.Pd, tanggal 20 Juli 2017).

Sebagian besar dari dokumen kurikulum 2013 sudah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ada. Tetapi masih ada empat bagian yang masih perlu dilakukan penyesuaian. Pertama, dalam hal penyusunan kriteria ketuntasan minimal.

KBM mata pelajaran ditentukan untuk tiap kompetensi dasar, dan KBM satu semester merupakan rata-rata dari KBM kompetensi dasar pada semester yang bersangkutan. Penghitungan KBM dilakukan pada awal semester, bukan di tengah-tengah semester, dan hasilnya diberitahukan kepada siswa. Kedua, masalah pengembangan silabus.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Silabus yang disusun oleh guru jangan hanya menyalin apa adanya dari contoh yang sudah ada, tetapi benar-benar harus merupakan hasil pengembangan oleh guru yang bersangkutan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Ketiga, masalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP harus disusun tiap semester atau sebelum guru mengajar, bukan menyalin RPP tahun sebelumnya apalagi dari sekolah lain dan keempat, masalah pedoman penilaian.

Dalam penyusunan pedoman penilaian harus memperhatikan ketiga aspek penilaian, jangan menonjolkan salah satu aspek saja. Ketiga aspek tersebut adalah afektif (sikap), dan psikomotor (ketrampilan), kognitif (pengetahuan).

4.2.4.2.2 Kelengkapan Dokumen kurikulum 2013

Dokumen peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan kurikulum 2013 perlu dimiliki oleh SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande, supaya dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Semua informan yang ada di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande menyatakan bahwa dokumen yang dimiliki mereka cukup lengkap.

Diantara dokumen tersebut adalah UU Sisdiknas, beberapa Permendikbud, pedoman penyusunan dan pengembangan silabus, pedoman penyusunan bahan ajar, dan pedoman penilaian, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jawaban dari Wakasek Bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande adalah sebagai berikut.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Ada dan cukup lengkap termasuk dalam bentuk file komputer, kami peroleh kebanyakan dari download di internet.” (Wawancara dengan Tri Gunadi, S.Pd, M.Pd tanggal 18 Juli 2017)

“Ada, dan cukup lengkap. Dokumen-dokumen peraturan dan pedoman yang lain tentang penyusunan kurikulum 2013 dan lain-lain cukup lengkap.” (Wawancara dengan Safiudin, S.Pd, MM.Pd tanggal 20 Juli 2017)

Ternyata dokumen yang dimiliki oleh sekolah-sekolah cukup lengkap, bahkan tidak hanya dokumen tertulis/dalam bentuk cetakan (print out) saja, tetapi juga dalam bentuk file komputer (softcopy) yang umumnya diperoleh secara mudah dengan mengunduhnya dari situs di internet.

Berdasarkan ketentuan, SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande harus menyusun dokumen kurikulum yang terdiri dari Buku I dan Buku II. Buku I merupakan dokumen induk kurikulum satuan pendidikan yang menguraikan tentang pendahuluan, landasan pengembangan kurikulum, pengertian, tujuan, prinsip pengembangan kurikulum 2013, visi, misi, dan tujuan sekolah, standar kompetensi lulusan, struktur dan muatan kurikulum, penjurusan, kenaikan kelas, kelulusan, dan kalender pendidikan.

Buku II merupakan dokumen yang berisi kumpulan pengembangan silabus tiap mata pelajaran dan kumpulan rencana pelaksanaan pembelajaran tiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang bersangkutan. Keterangan wakasek bidang kurikulum SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande mengindikasikan bahwa SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande sudah memiliki dokumen kurikulum

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2013 yang lengkap, meliputi Buku I dan Buku II. Jawaban dari wakasek bidang kurikulum SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande diketengahkan berikut ini.

“Sudah ada semua. Buku I sudah ada, buku II juga sudah lengkap. Itu semua hasil penyusunan dari tim pengembang kurikulum dan semua guru-guru mapel yang ada.” (Wawancara dengan Tri Gunadi, S.Pd, M.Pd tanggal 18 Juli 2017)

“Dokumen kurikulum 2013 yang disusun sekolah kami sudah lengkap Buku I ada...Buku II juga ada pa, tapi memang masih terus dibenahi.” (Wawancara dengan Safiudin, S.Pd,MM.Pd tanggal 20 Juli 2017).

Sebagaimana sifat kurikulum 2013 yang perlu terus menerus disesuaikan dengan perkembangan zaman, maka dokumen kurikulum 2013 di sekolah, baik Buku I maupun Buku II, memang bukan merupakan dokumen yang bersifat statis. Jadi harus selalu dibenahi atau disempurnakan.

4.2.4.2.3 Pengesahan dan Perubahan Dokumen Kurikulum 2013

Pengesahan dokumen kurikulum 2013 yang telah selesai disusun oleh sekolah jenjang SMA/SMK sebelum diberlakukan atau digunakan di sekolah disahkan terlebih dahulu oleh kepala sekolah yang bersangkutan, kemudian disetujui oleh komite sekolah, dan diketahui oleh dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi. Prosedur ini ditempuh baik ketika pertama kali menyusun dokumen kurikulum 2013 maupun ketika dilakukan revisi atau perbaikan terhadap dokumen kurikulum 2013 pada tahun-tahun selanjutnya.

Untuk mengetahui apakah dokumen kurikulum 2013 yang sudah disusun oleh sekolah sudah disetujui oleh komite sekolah dan diketahui

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

oleh dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, peneliti menanyakannya kepada beberapa informan di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande.

“Pada awalnya Dokumen kurikulum 2013 kami tidak diketahui oleh komite sekolah, juga belum diketahui atau disahkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi. alasannya karena selama ini tidak ada perintah atau teguran dari atasan, ya kami jalan terus seperti biasa tetapi kemudian disempurnakan dengan adanya lembar diketahui oleh komite sekolah dan lembar pengesahan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, hal itu dilakukan setiap awal tahun pelajaran” (wawancara dengan Safiudin, S.Pd, MM.Pd tanggal 20 Juli 2017).

Menurut keterangannya bahwa dokumen kurikulum 2013 yang sudah disusun oleh sekolahnya tidak ditandatangani oleh komite sekolah sebagai tanda persetujuan, demikian juga tidak ditandatangani oleh dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi. Alasannya adalah karena tidak adanya perintah untuk melakukan hal itu, dan walaupun langkah itu memang keliru tidak ada teguran atau sanksi dari atasan, dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi. Namun pada perkembangannya komite diminta untuk mengetahui dokumen tersebut dan disahkan oleh dinas provinsi.

Hal ini sesuai dengan keterangan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang kurikulum SMA Negeri 1 Ciruas sebagai berikut ini.

“Pada awal tahun diberlakukannya, dokumen kurikulum 2013 sekolah kami sudah diketahui oleh komite sekolah, dan disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (Wawancara dengan Tri Gunadi, S.Pd, M.Pd tanggal 18 Juli 2017).

Dokumen kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Ciruas sudah ditandatangani oleh komite sekolah sebagai bukti atau tanda persetujuan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dan sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berbeda dengan jenjang SD dan SMP yang dokumen kurikulum 2013 setelah disetujui oleh komite sekolah masing-masing selanjutnya cukup ditandatangani oleh dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, maka untuk jenjang SMA/SMK setelah ditandatangani oleh komite sekolah tidak perlu ditandatangani oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten, tetapi langsung dimintakan persetujuan/pengesahan dari dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi.

Untuk mengetahui bagaimana isi kebijakan kurikulum 2013, penulis melakukan wawancara dengan akademisi pendidikan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa :

“Inti dari kurikulum 2013, ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif...kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran...Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik... Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik” (Wawancara dengan DR. H. Masrupi, M.Pd tanggal 21 Juli 2017)

Sebenarnya konsep mengenai kurikulum 2013 sudah pernah muncul dalam kurikulum 1975. Konsep proses pembelajaran yang mendorong agar siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar ini sebenarnya sudah diterapkan pada puluhan tahun silam dengan nama

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Alasan yang dikemukakan oleh pihak Kemendikbud mengenai kebijakan perubahan kurikulum 2013 juga tidak memiliki landasan kuat, bahkan terkesan hanya sekedar opini atau sudah menjadi rencana kerja. Tidak ada hasil riset tentang dampak dari KTSP yang membuatnya harus diganti, tentu menjadi pertanyaan bagi publik mengenai perubahan kurikulum ini.

Belajar dari pengalaman perubahan-perubahan kurikulum yang rutin dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah harusnya jangan sekedar mengkaji isi substansi dari sebuah kurikulum, namun kajian operasional penerapan sebuah kurikulum baru di sekolah - sekolah juga patut diperhatikan.

Ada tiga hal yang menyebabkan gagalnya perubahan kurikulum sebelumnya, yaitu kesiapan guru, kesiapan sekolah, dan kesiapan dokumen. Kesiapan guru merupakan faktor utama gagalnya kurikulum terdahulu. Ada baiknya pemerintah melakukan riset terlebih dahulu mengenai kesiapan guru-guru dan sekolah sebelum menerapkan kebijakan kurikulum baru agar apa yang telah direncanakan sebelumnya tidak menjadi hal yang sia-sia

4.2.4.3. Pembiayaan dan Sarana Prasarana Pendukung kurikulum 2013

Sumber dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasana. Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier dalam Sahya Anggara, Besarnya alokasi sumber daya finansial merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya keuangan adalah faktor faktor

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

krusial setiap program sosial. Tersedianya dana pada tingkat batas sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal (2014 : 259). Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dalam pelaksanaan pendidikan berupa peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Untuk keperluan pelaksanaan suatu kebijakan di suatu institusi sudah pasti dibutuhkan dukungan biaya yang cukup. Demikian juga banyak hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum di suatu sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Biaya yang diperlukan mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengembangan dan perawatan sarana prasarana, buku-buku, alat-alat peraga, media pembelajaran, sistem administrasi, komunikasi, pengadaan perangkat kurikulum, biaya pendidikan dan pelatihan bagi kepala sekolah, guru, dan karyawan, biaya kegiatan-kegiatan penunjang, penilaian, dan pelaporan. Dari sekian aspek tersebut andai kata terdapat satu atau beberapa yang tak didukung pembiayaan yang cukup maka akan menghambat pencapaian pelaksanaan kurikulum.

Untuk memperoleh gambaran tentang dukungan pembiayaan sekolah, peneliti mewawancarai kepala sekolah SMA Negeri 1 Ciruas.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Tentu saja sekolah sangat mendukung semua aspek pembiayaan untuk dapat berjalannya kurikulum di tempat kami. Hal ini mengingat kurikulum adalah jantungnya lembaga pendidikan sekolah, maka harus benar-benar dipikirkan pendanaannya. Kalau tidak, maka akan kacau. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sekolah bersikap setengah-setengah terhadap masalah pembiayaan kurikulum ...” (Wawancara dengan H. Mohammad Najih, S.Pd M.Pd).

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kurikulum adalah jantungnya lembaga pendidikan, termasuk di sekolah SMA. Maksudnya bahwa kegiatan utama atau inti suatu sekolah adalah bagaimana melaksanakan kurikulum untuk melayani peserta didik dalam mencapai cita-citanya. Jika pendanaan kurang, otomatis pelaksanaan kurikulum jadi terhambat, dan selanjutnya adalah turunnya kualitas pendidikan sekolah, dan akhirnya berujung pada turunnya citra sekolah di mata publik. Jadi kepala sekolah mendukung sepenuhnya pendanaan yang ditujukan bagi keterlaksanaan kurikulum di sekolahnya.

Sementara itu wakil kurikulum di SMA Negeri 1 Ciruas memberikan penjelasannya sebagai berikut.

“Menurut penilaian saya pihak sekolah sangat mendukung dari segi pembiayaan terhadap pelaksanaan kurikulum 2013. Hanya saja kendalanya adalah mengingat jumlah dan sumber pemasukan keuangan yang masih terbatas, maka jumlah biaya yang dikeluarkan juga masih terbatas. Tapi kalau dihitung dari prosentase secara keseluruhan sudah cukup besar, bahkan mayoritas penggunaan dana di sekolah kan untuk mendukung baik langsung atau tidak langsung bagi terlaksananya kurikulum.” (Wawancara Tri Gunadi, S.Pd M.Pd tanggal 19 Juli 2017)

Keterangan informan ini memberikan ilustrasi bahwa pihak sekolahnya sangat mendukung aspek pembiayaan pelaksanaan kurikulum 2013. Walaupun masih menghadapi keterbatasan jumlah dan sumber pemasukan anggaran sekolah, tetapi dalam hal prosentase penggunaan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

anggaran sebagian besar sudah diperuntukkan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi keperluan pelaksanaan kurikulum.

Dalam hal pembiayaan tiap sekolah dengan status yang sama memiliki sumber-sumber yang hampir sama. kepala sekolah SMA Negeri 1 Ciruas memberikan keterangannya berikut ini.

“Sumber pembiayaan bagi SMA negeri di Kabupaten Serang pada umumnya ya sama, diperoleh dari komite sekolah, melalui sumbangan orangtua siswa setiap bulan, yang besarnya berbeda tiap sekolah. Kemudian kami mendapat bantuan rutin dari APBD dari provinsi dan pemerintah pusat, tapi besarnya tidak sama tiap tahun.” (Wawancara H. Mohamad Najih, S.Pd M.Pd tanggal 19 Juli 2017).

Sumber pembiayaan bagi SMA negeri adalah dari anggaran komite sekolah, yang berasal dari sumbangan masyarakat melalui orangtua siswa. Besarnya sumbangan tiap siswa per bulan ditetapkan dalam musyawarah antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orangtua siswa pada awal tahun pelajaran.

Penggunaan anggaran ini diperuntukkan bagi keperluan operasional sekolah, pemeliharaan gedung dan sarana fisik lainnya, pengadaan barang dan jasa, honor guru dan karyawan yang berstatus bukan PNS, penilaian hasil belajar siswa, dan lain-lain. Kemudian sekolah negeri juga memperoleh bantuan rutin dari APBD provinsi setiap tahun.

Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Pemerintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi kurikulum 2013 kekurangan sumber daya pendukung, salah satu sumber penting adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti bahan ajar dan alat praktek yang digunakan dalam proses belajar di kelas, hal ini juga telah

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini tanpa digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dinyatakan oleh Bapak Kepala Seksi Bidang kurikulum SMA yang menyatakan bahwa :

“Sarana prasarana pendidikan menjadi salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu sarana prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Dinas pendidikan dan kebudayaan sudah menyampaikan himbauan ke tiap SMA untuk mempersiapkan dan memelihara sarana prasarana baik peralatan pendidikan, media pendidikan maupun fasilitas ruangan lainnya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar” (Wawancara dengan Drs. Adang Abdurahman tanggal 21 Juli 2017

Tingkat keterlaksanaan kurikulum di suatu sekolah ikut dipengaruhi oleh aspek kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki sekolah tersebut. Hal ini mengingat tuntutan agar kurikulum dapat dilaksanakan dengan optimal tentu saja perlu ditopang oleh keberadaan sarana prasarana yang memadai. Andaikata sarana prasarana di suatu sekolah sangat kurang, maka pelaksanaan kurikulum pun tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan observasi secara sekilas terhadap SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande, maka secara umum semuanya sudah memiliki sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kurikulum, tetapi dengan kualitas dan kuantitas yang agak berbeda. Untuk mengetahui keadaan sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Ciruas.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tabel 4.6
Data Sarana SMA Negeri 1 Ciruas

No	Nama Sarana Prasarana	Ada / Tidak Ada	Kondisi Baik/Rusak/Rusak Berat
1	R. BP/ BK	Ada	Baik
2	Gedung Serba Guna	Ada	Baik
3	Laboratorium Bahasa	Ada	Baik
4	Laboratorium IPA	Ada	Baik
5	Laboratorium Komputer	Ada	Baik
6	Ruang Kelas 30 Ruang	Ada	Baik
7	Masjid / Musholla	Ada	Baik
8	R. Audio Visual	Ada	Baik
9	R. GSG	Ada	Baik
10	R. Lab. Bahasa	Ada	Baik
11	R. Lab. Biologi	Ada	Baik
12	R. Lab. Fisika	Ada	Baik
13	R. Lab. Kimia	Ada	Baik
14	R. Osis	Ada	Baik
15	R. Perpustakaan	Ada	Baik
16	R. Rapat	Ada	Baik
17	Ruang Guru	Ada	Baik
19	Ruang Kepala Sekolah	Ada	Baik

Sumber: Data Sarana SMA Negeri 1 Ciruas 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Ciruas sudah lengkap dengan luas tanah 22.119 m² dan luas bangunan 3.500 m². Kelengkapan sarana prasarana dilakukan demi tercapainya daya serap kurikulum dan kelancaran proses belajar mengajar siswa didik. berikut keterangan dari Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Sebenarnya sarana prasarana sekolah kami sudah mencukupi. Kami memiliki ruangan kelas dan ruang kantor yang memadai, demikian juga laboratorium IPA, laboratorium komputer, koleksi buku-buku di perpustakaan dalam jumlah cukup, sejumlah alat-alat peraga dan media pembelajaran. Kondisinya cukup bagus. Sementara itu lingkungan sekolah juga cukup nyaman untuk kegiatan pembelajaran siswa.”

(Wawancara dengan Asep Hidayat, S.Pd, M.Pd tanggal 18 Juli 2017)

Gambaran yang diberikan oleh informan tersebut memperlihatkan bahwa Sarana prasarana sekolah sudah mencukupi. Kebutuhan dasar bagi sebuah sekolah, antara lain seperti ruang kelas, ruang perkantoran, laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, dan alat-alat peraga pendidikan, sudah tersedia.

Jika semua kebutuhan dasar sarana tersebut tersedia dengan kondisi cukup bagus, maka pelaksanaan kurikulum di sekolah menjadi lebih mudah. Kondisi sebaliknya akan mengakibatkan kesulitan mengaplikasikan kurikulum di sekolah karena adanya hambatan yang sangat berarti.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tabel 4.7
Data Sarana SMA Negeri 1 Cikande

No	Nama Sarana Prasarana	Ada / Tidak Ada	Kondisi Baik/Rusak/Rusak Berat
1.	Ruang Kepala Sekolah	Ada	Baik
2.	Ruang Guru	Ada	Baik
3.	Laboratorium IPA	Ada	Rusak
4.	Lab. Bahasa	Tidak Ada	-
5.	Lab. Komputer	Ada	Baik
6.	Perpustakaan	Ada	Baik
7.	Mushalla	Ada	Baik
8.	Lapangan Basket	Ada	Baik
9.	Tempat Parkir	Ada	Baik
10.	Pagar	Ada	Baik
11.	Aula/Ruang Serbaguna	Ada	Baik
12.	Stadion Mini Terbuka	Ada	Baik
13.	Ruang OSIS/ekskul	Ada	Baik
14.	Ruang Koperasi	Ada	Baik
15.	KM/WC Guru	Ada	Baik
16.	KM/WC Peserta didik	Ada	Baik
17.	Menara air	Ada	Baik
18.	Taman dan lapangan	Ada	Baik
19.	Pintu gerbang	Ada	Baik
20.	Pos Keamanan	Ada	Baik
21.	Ruang Kelas/Teori 20 Ruang	Ada	Baik

Sumber: Data Sarana SMA Negeri 1 Cikande 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Cikande kurang lengkap dengan luas tanah 9.850 m² dan luas bangunan 1.934 m². Sementara keadaan bangunan ruang lab IPA yang ada di SMA Negeri 1 Cikande dalam keadaan kurang baik dan lab bahasa tidak ada. Kelengkapan sarana prasaran dilakukan demi tercapainya daya serap kurikulum dan kelancaran proses belajar mengajar siswa didik.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Untuk memberikan gambaran sarana prasarana di SMA Negeri 1

Cikande, peneliti mewawancarai wakasek bidang sarana dan prasarana, yang memberikan keterangannya sebagaimana berikut ini.

“Begini pa, mungkin kondisi sarana prasarana kami baru sekitar 80% yang sudah dikatakan Mendukung diberlakukannya kurikulum 2013, hanya dalam hal ICT memang belum terpenuhi seluruhnya mengingat berbagai kendala yang dihadapi pihak sekolah, khususnya masalah dana dan sumberdaya manusianya... maksudnya untuk membangun sebuah sistem ICT yang bagus kan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Di samping itu tenaga professional yang mengelola sistem ICT kebetulan kami baru memiliki satu orang, padahal idealnya ada 5 orang...apalagi tahun ini sekolah sudah harus melaksanakan UNBK ”(Wawancara dengan Agus Suyono, S.Pd tanggal 20 Juli 2017)

Pengakuan informan tersebut mengindikasikan dukungan sarana prasarana sekolah belum sepenuhnya terpenuhi untuk dapat mendukung terlaksananya kurikulum 2013 dengan optimal, hambatan utama yang dihadapi adalah masalah ICT (information and communication technology, teknologi informasi dan komunikasi), dengan alasan dua faktor. Pertama adalah masalah dana, mengingat untuk dapat membangun sebuah sistem ICT yang bagus diperlukan dana yang tidak sedikit. Dan yang kedua adalah masalah dukungan sumberdaya manusia, dalam hal ini tenaga yang mengurus masalah ICT belum cukup jumlahnya dan belum sebanding dengan kebutuhan.

Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan dan sarana prasarana pendukung kurikulum 2013, penulis melakukan wawancara dengan akademisi pendidikan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa :

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“ Fungsi biaya di sekolah pada dasarnya untuk menunjang pembiayaan sekolah juga penyediaan sarana prasarana, seperti tanah, bangunan, laboratorium, perpustakaan, media belajar, operasional pengajaran, pelayanan administratif....Biaya pendidikan adalah seluruh dana baik langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber pemerintah, masyarakat, orang tua yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan, masyarakat dan orang tua sebagai pengguna jasa pendidikan turut bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan dengan cara berpartisipasi dalam mengupayakan dana pendidikan...dan muaranya adalah peningkatan mutu pendidikan” (Wawancara dengan DR. H Masrupi, M.Pd tanggal 21 Juli 2017

Dari hasil dengan akademisi pendidikan Universitas Sultan Agung Tirtayasa Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dalam setiap upaya pencapaian mutu pendidikan. biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yaitu semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.

Sekurang-kurangnya ada empat hal yang bisa diperbaiki guna meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Pertama, berhubungan dengan akses dan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Dalam kaitan ini pemerintah harus dapat menyediakan infrastruktur jalan dan transportasi yang memadai agar anak dapat bersekolah dengan nyaman.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Hal tersebut dapat terlihat pada kasus anak-anak di Banten yang harus menantang maut menyeberangi jembatan yang runtuh di atas arus Sungai Ciberang yang deras agar bisa sekolah, tak boleh lagi terjadi. UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak dan negara dalam hal ini berkewajiban memenuhi hak itu.

Kedua, program pendidikan dasar gratis memang dari segi kuantitas dapat dikatakan berhasil karena angka partisipasi siswa SD hampir mencapai 100 persen, tetapi tidak dari segi kualitas. Badan Pusat Statistik (2015) mencatat, 13 persen siswa SD tidak menyelesaikan pendidikan. UNESCO, dalam Global Monitoring Report 2015 juga melaporkan, 80 persen dari murid kelas IV SD di Indonesia masih memiliki kemampuan membaca di bawah standar internasional. Ketiga, privatisasi dalam bidang pendidikan walau diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintah telah memperlebar jurang pencapaian prestasi antara anak dari keluarga berkecukupan dan anak dari keluarga tak mampu.

Salah satu contoh dapat dilihat dari dominasi siswa dan siswi dari sekolah swasta yang meraih prestasi di ajang olimpiade ataupun kompetisi bergengsi lain. Ketimpangan ini dapat terjadi karena sekolah swasta dengan uang sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah negeri, mempunyai anggaran lebih besar untuk terus memperbaharui infrastruktur dan fasilitasnya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Sekolah swasta juga memiliki daya tarik lebih kuat bagi calon guru dengan kompetensi yang tinggi. Selain gaji yang lebih tinggi, lingkungan kerja pun lebih baik.

4.2.4.4. *Standart Operating Procedure* (SOP) Kurikulum 2013

Menurut Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier dalam Leo Agustino semakin mampu suatu peraturan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut (2016 : 148) *Standart Operating Procedure* (SOP) yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum 2013 sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Pusat. Artinya *Standart Operating Procedure* (SOP) sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah.

Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kebijakan kurikulum 2013. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan *Standart Operating Procedure* (SOP).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Menurut Drs. Adang Abdurahman selaku kepala seksi bidang kurikulum SMA,

“pada pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 yang bertujuan untuk memperbaiki pembangunan pendidikan di Kabupaten Serang.... kami sudah melaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang berupa teknis atau juknis pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI” (Wawancara tanggal 21 Juli 2017).

Kegiatan pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 secara garis besar dengan melalui persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya temuan peneliti mengenai adanya SOP atau juknis yang merupakan pedoman pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013, Pedoman Pemberian Bantuan Implementasi kurikulum Tahun 2013 yang merupakan pedoman pemberian dana diklat implementasi kurikulum 2013, SOP Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendampingan kurikulum Sekolah Menengah Atas Berbasis Sekolah Tahun 2016

Gambar 4.3
SOP Pemberian Bantuan Implementasi Kurikulum 2013



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Gambar 4.4
SOP Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendampingan
Kurikulum Sekolah Menengah Atas Berbasis Sekolah 2016



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Serang telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja. *Standar Operational Prosedur* (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya prosedur - prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.2.3. Faktor yang Berpengaruh diluar Kebijakan

Menurut Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier dalam Leo Agustinus hakikat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran dalam Impelementasi kebijakan, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik dilapangan (2016 : 149).

Faktor yang berpengaruh dari luar dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 adalah komite sekolah mengemban empat peran dan fungsi sebagai berikut, (1) pemberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengawas, dan (4) mediator. Keempat peran komite sekolah tersebut bukan peran yang berdiri sendiri, melainkan peran yang sering terkait antara peran satu dengan peran yang lainnya.

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), komite sekolah memiliki peran sebagai *advisor agency*, badan yang memberikan pertimbangan kepada sekolah. Idealnya, sekolah harus meminta pertimbangan kepada komite sekolah dalam merumuskan kebijakan, program.
2. Pemberi dukungan (*supproting agency*), komite sekolah memiliki peran sebagai *supporting agency*, badan yang memberikan dukungan berupa dana, tenaga, dan pikiran.
3. Melakukan pengawasan (*controlling agency*), komite sekolah memiliki peran sebagai *controlling agency*, badan yang melaksanakan pengawasan sosial kepada sekolah.
4. Mediator, komite sekolah memiliki peran sebagai mediator antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan menjadi kunci keberhasilan upaya peningkatan pendidikan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan kebijakan kurikulum 2013 adalah partisipasi masyarakat dan komite sekolah sangat diperlukan dalam pembuatan berbagai keputusan. Dengan demikian komite sekolah dapat lebih memahami, mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan sekolah.

Di Kabupaten Serang keberadaan komite sekolah sudah ada pada tiap SMA, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Pembentukan komite sekolah ini sebenarnya dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan organisasi sebelumnya, yaitu BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan), yang pada waktu itu dinilai hanya semacam lembaga pemberi legitimasi atas berbagai kebijakan yang diambil pihak sekolah.

Peran komite sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 antara lain sebagai mitra sekolah dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Termasuk dalam hal penyusunan program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja sekolah, peran komite sekolah ini diberi porsi yang cukup besar. Namun ketika diajukan pertanyaan kepada pihak sekolah tentang keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan anggaran, komite SMAN 1 Cikande memberikan jawabannya sebagai berikut.

“Pihak komite sekolah tidak ikut serta dalam penyusunan anggaran sekolah. Paling-paling sebatas pada waktu awal tahun pelajaran, kami minta persetujuan dengan mengajukan proposal kegiatan atau RKAS. Biasanya ketua komite sekolah hanya membubuhkan tanda tangan saja sebagai tanda persetujuan.” (Wawancara dengan Mumu Muhtadi tanggal 20 Juli 2017)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pihak komite sekolah tidak dilibatkan dalam kegiatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Mekanisme yang ditempuh pihak sekolah adalah menyusun sendiri RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), kemudian sebelum dimintakan pengesahan dari dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari komite sekolah melalui rapat orang tua murid.

Untuk mengetahui alasan tidak dilibatkannya komite sekolah ini peneliti ajukan pertanyaan kepada kepala sekolah SMAN 1 Ciruas.

“Ya, pihak komite sekolah kami libatkan tapi memang sebatas dalam penyusunan program kerja saja. Sedangkan detail penyusunan anggaran sekolah terus terang tidak, karena itu terlalu teknis. Tetapi selanjutnya sebelum dimintakan persetujuan dari dinas pendidikan kan perlu dibaca dan diperiksa dulu oleh komite sekolah, sebelum ditandatangani.” (Wawancara dengan H. Mohamad Najih, S.Pd M.Pd tanggal 19 Juli 2017)

Alasan atau pertimbangannya adalah karena detail penyusunan RKAS adalah pekerjaan yang terlalu teknis, maka tidak memungkinkan untuk melibatkan komite sekolah. Pengurus komite sekolah biasanya terdiri dari orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan tertentu di kantor pemerintah, swasta, perusahaan, atau wiraswasta, yang tidak punya cukup kesempatan untuk membicarakan masalah teknis di sekolah setiap waktu.

Peneliti menanyakan kebenaran keterangan dari informan tersebut diatas kepada salah seorang anggota komite sekolah di sebuah SMAN 1 Ciruas.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Memang betul pa, kami hanya dilibatkan dlm penyusunan program saja, untuk detilnya tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penyusunan RKAS. Hal ini mengingat waktu yang kami miliki untuk itu tidak ada karena kesibukan di tempat kerja masing-masing. Jadi kami percayakan saja kepada sekolah. Namun demikian kami tetap meminta pihak sekolah menyerahkan kepada kami draf program kerja sekolah dan juga RKAS, supaya kami bisa ikut memantau kegiatan-kegiatan di sekolah.” (Wawancara dengan Sahertian tanggal 19 Juli 2017)

Memang benar adanya, bahwa dengan alasan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pengurus komite sekolah, maka mereka tidak ikut terlibat langsung dalam penyusunan RKAS. Namun demikian pihak komite sekolah tetap meminta rancangan program kerja sekolah dan RKAS untuk keperluan pemantauan kegiatan.

Sekolah dalam penyusunan kurikulum 2013 hendaknya melibatkan beberapa unsur yang ada di sekolah, termasuk di dalamnya adalah komite sekolah. Komite sekolah adalah mitra kerja sekolah dalam merencanakan berbagai kegiatan di sekolah, termasuk dalam kegiatan perencanaan kurikulum.

Dalam kaitan ini komite sekolah dianggap sebagai perwakilan dari unsur masyarakat, orangtua peserta didik, dan juga tokoh yang peduli dengan pendidikan, di lingkungan sekolah. Dengan demikian diharapkan aspirasi dan kepentingan mereka dapat terwadahi dalam kurikulum di sekolah.

Untuk mengetahui apakah dalam penyusunan kurikulum 2013 di sekolah telah melibatkan unsur komite sekolah, berikut keterangan dari komite sekolah SMAN 1 Ciruas :

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Tidak sama sekali. Pihak komite sekolah sepertinya tidak mungkin untuk dilibatkan dalam penyusunan kurikulum 2013, walaupun aturannya demikian. Hal ini mengingat beberapa pertimbangan, seperti kesibukan masing - masing personil komite, juga kemampuan dan kompetensi di bidang kurikulum sepertinya tidak memungkinkan.” (Wawancara dengan Suhartian tanggal 19/07/2017)

Komite sekolah tidak dilibatkan dalam penyusunan kurikulum 2013, alasannya walaupun memang aturannya mengharuskan komite sekolah ikut dilibatkan, namun personel komite sekolah memiliki kesibukan masing-masing dengan pekerjaannya, di samping itu faktor kemampuan dan kompetensi komite sekolah yang tidak menguasai masalah kurikulum.

Pertimbangan keterbatasan waktu yang dimiliki personel komite sekolah dan kurang menguasainya masalah kurikulum dijadikan alasan untuk tidak melibatkan unsur komite sekolah. Namun demikian memang setelah kurikulum 2013 selesai disusun oleh pihak sekolah, sebelum dimintakan pengesahan dari pihak dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, terlebih dahulu diserahkan kepada ketua komite sekolah untuk mendapatkan tandatangan persetujuan.

Sementara pengurus komite sekolah di SMA Negeri 1 Cikande sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui atau membaca naskah kurikulum tersebut. Peneliti mencoba menanyakan kepada ketua komite sekolah di SMA Negeri 1 Cikande. memberikan keterangan sebagai berikut.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Untuk masalah penyusunan kurikulum sekolah, seingat saya komite sekolah tidak pernah diundang atau diberitahu ada kegiatan penyusunan kurikulum. Memang terus terang andaikata kami diundang juga kurang paham dengan masalah itu pak,..... Itu kan yang lebih menguasai guru-guru di sekolah. Jadi pada prinsipnya komite sekolah tidak apa-apa, tinggal mendukung saja kegiatan sekolah.” (Wawancara dengan H Mumu Muhtadi tanggal 20 Juli 2017).

Dalam kegiatan penyusunan kurikulum 2013 pihak komite sekolah merasa tidak pernah mendapat undangan atau pemberitahuan dari pihak sekolah. Tetapi andaikata dilibatkan pun komite sekolah merasa kurang menguasai masalah kurikulum, karena itu bukan bidangnya. Yang lebih menguasai adalah para guru di sekolah. Namun demikian komite sekolah tidak merasa keberatan tidak dilibatkan dalam kegiatan penyusunan kurikulum 2013, karena yang utama adalah komite sekolah tetap mendukung program sekolah.

Untuk mengetahui bagaimana seharusnya faktor yang berpengaruh diluar kebijakan terhadap implementasi kurikulum 2013 sikap yang seharusnya dilaksanakan implementor suatu kebijakan dalam hal ini kebijakan kurikulum 2013, penulis melakukan wawancara dengan akademisi pendidikan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa.

“Tidak seharusnya dalam pengambilan keputusan sekolah tidak mengajak serta komite sekolah, karena komite sekolah adalah mitra sekolah bahkan disekolah dinegara yang pendidikannya sudah maju dalam mengambil suatu keputusan sekolah harus mendapat persetujuan bukan hanya dari komite saja tetapi harus melibatkan pihak lain seperti praktisi pendidikan, dewan pendidikan bahkan NGO” (Wawancara dengan DR H Masrupi, M.Pd)

Dari wawancara dengan akademisi pendidikan bahwa Keterlibatan komite sekolah, kelompok lain yang terlibat dalam mendukung

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

implementasi kebijakan kurikulum 203 termasuk kepala sekolah dan guru agar dapat melakukan kerjasama yang baik merupakan hal yang penting.

Kerjasama seperti ini akan dapat mewujudkan implementasi kebijakan kurikulum 2013 yang transparan dan teratur.

Kenyataan yang terjadi selama ini, komite sekolah masih dilihat sebelah mata karena fungsi dan kewenangannya masih jauh dari harapan, dan belum maksimal. Salah satu fungsi dan kewenangan komite sekolah yang jauh dari harapan adalah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (kepala sekolah, guru, masyarakat, pemerintah) dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu.

Sering kali terjadi kesalahpahaman bahwa pendidikan hanyalah tugas sekolah dan pemerintah, sedangkan masyarakat tidak pernah merasa memiliki lembaga pendidikan. Masyarakat tidak pernah merasa bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar, padahal institusi pendidikan merupakan milik bersama, kewajiban bersama dan tanggung jawab bersama yang harus dipikul secara bersama-sama. Salah satu fungsi dari komite sekolah adalah sebagai mitra kerja lembaga pendidikan, bukan lawan yang harus ditakuti namun merupakan kawan yang harus dirangkul, sehingga segala masalah yang dihadapi lembaga pendidikan dapat diselesaikan dengan baik dan bijak.

Membangun pola kerja sama yang baik antara komite sekolah dengan guru sudah merupakan keharusan dan menjadi komitmen antara pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat sekitar.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.3. Pembahasan Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Atas Kabupaten Serang .

Pada *subpoint* ini peneliti akan membahas terkait hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan kurikulum 2013 di Kabupaten Serang Studi Multi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ciruas dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang yang terdapat pada *subpoint* sebelumnya, dengan menyesuakannya dengan teori-teori yang berada di dalam literatur model implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier.

4.3.1 Karakteristik Masalah

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Kecenderungan perilaku atau karakteristik profesionalisme dan kompetensi pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah profesionalisme dan kompetensi pelaksana.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Kabupaten Serang cukup baik. Pelaksana kebijakan dalam hal ini mendukung untuk melaksanakan kebijakan kurikulum 2013 untuk membangun pendidikan di kabupaten Serang.

Adanya perubahan kurikulum ini pihak kepala sekolah mendukung positif dan sebagian guru yang melaksanakan kurikulum 2013 pun

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

menyambut dengan antusias seperti mengikuti dengan antusias segala kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berhubungan dengan tercapainya pelaksanaan kurikulum 2013 dan dengan cekatan guru menerapkan apa yang sudah mereka pahami dari pelatihan yang mereka dapatkan. Antusias terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 juga dapat dilihat dari komitmen guru sebagai mediator siswa di sekolah menjadi lebih berinovasi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di kabupaten Serang, akan tetapi tidak semua guru menyambut antusias implementasi kebijakan kurikulum 2013 dikarenakan keterbatasan penguasaan teknologi komputer terutama untuk guru yang sudah berusia lanjut dan menjelang pensiun.

Dinas pendidikan dan kebudayaan selaku perpanjangan tangan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan bekerjasama dengan LPMP selalu siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum pengganti kurikulum 2006 yang dilakukan pemerintah dengan niatan untuk memperbaiki sistem pendidikan.

Dalam hal ini agar pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 berjalan seperti yang diharapkan, sesuai dengan intruksi dari pusat dinas pendidikan dan kebudayaan bertanggung jawab mempersiapkan kepala sekolah dan guru untuk memahami dan melaksanakan kurikulum 2013 pada tingkat satuan pendidikan dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan kurikulum 2103 kepada instansi terkait serta melaksanakan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pembinaan atau pelatihan yang bekerjasama dengan LPMP kepada sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013.

Namun, permasalahan yang terjadi sampai saat ini menimbulkan pertanyaan yang besar tentang kebijakan kurikulum 2013 yang kurangnya perencanaan yang matang. Sebaiknya implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan setelah tercapainya kesiapan dan kompetensi guru-guru di sekolah. Kesiapan guru sangat penting dalam pengimplementasian kurikulum 2013, karena guru sebagai penentu keberhasilan kurikulum 2013 yang diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap berbagai kemungkinan terjadinya perubahan. Maka dari itu perlu adanya persiapan yang matang dari pemerintah dalam setiap sistem yang diperlukan untuk pelaksanaan kurikulum 2013.

Berdasarkan hal diatas, peneliti menyimpulkan jika para implementor bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Demikian pula apabila tingkah laku atau perspektif - perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Namun ketika suatu kebijakan diterapkan maka harus adanya perencanaan yang matang dari pembuat kebijakan dan harus serius menyikapi permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan kurikulum 2013. Karena Implikasi yang akan terjadi dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 kedepannya jika hal tersebut dibiarkan, akan menjadi sebuah tradisi aparat pelaksana

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

yang tidak baik dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan.

Dari segi kepemimpinan kepala sekolah juga semuanya cukup baik, sehingga kondusif untuk pelaksanaan suatu kebijakan, termasuk kebijakan tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013.

Berdasarkan hasil penelitian di muka juga diketahui bahwa tidak ada guru di SMA N 1 Cikande Kabupaten Serang yang pernah terlibat dalam kegiatan pengembangan kurikulum di tingkat Kabupaten apalagi di tingkat Provinsi dan Nasional. Pengalaman sebagian guru hanya sebatas sebagai anggota pengembangan kurikulum di sekolahnya masing-masing.

Hal ini berarti perlunya kepedulian dan perhatian dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk melibatkan guru-guru yang potensial di SMA Negeri 1 Cikande supaya dilibatkan dalam kegiatan pengembangan kurikulum.

Tingkat penguasaan guru terhadap materi kurikulum 2013 kurang merata, hanya 80% dari mereka yang cukup baik, Kemampuan guru dalam melakukan tugas pengembangan silabus perlu ditingkatkan, dan juga perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa perbuatan menyalin apa adanya dari contoh silabus yang sudah ada perlu dihindari.

Demikian juga perlunya peningkatan kemampuan guru dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang baik, sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolahnya masing-masing.

Di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande sudah ada tim pengembangan kurikulum 2013. Tim ini diangkat berdasarkan SK kepala

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, beberapa guru yang dipandang memiliki kemampuan di bidang pengembangan kurikulum dan komite sekolah. Namun dari hasil penelitian juga diketahui, bahwa beberapa SK kepala sekolah tentang pengangkatan tim pengembang kurikulum 2013 tidak dilengkapi dengan uraian tugas (job description) yang jelas, sehingga dalam menjalankan tugas hanya berdasarkan petunjuk lisan dari kepala sekolah atau waka kurikulum saja.

4.3.2 Daya Dukung Kebijakan

Proses penyampaian Informasi kebijakan kurikulum 2013 dilakukan oleh pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat, hal tersebut dilakukan agar kebijakan kurikulum 2013 dapat tertransformasikan secara tepat di tiap tingkat satuan pendidikan. Penyampain informasi tersebut dilakukan pada saat rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan diaolog yang difasilitasi oleh LPMP serta dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dan dari sekolah itu sendiri (*In House Training*). Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan dan penjelasan secara jelas kepada kepala sekolah dan guru - guru di Kabupaten Serang sebagai pelaksana kebijakan kurikulum 2013.

Relevansi kurikulum 2013 yang disusun oleh sekolah dengan kebutuhan siswa sudah sesuai, tetapi sebagaimana sifat kurikulum 2013 yang dikembangkan mengikuti perkembangan masyarakat dan jaman, tentu perlu terus disesuaikan setiap tahun. Di SMA Negeri 1 Ciruas dan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SMA Negeri 1 Cikande sudah memiliki dokumen tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kebijakan kurikulum 2013.

Dokumen tersebut terdiri dari dokumen cetak/tertulis, dan juga berupa file/softcopy. Dokumen umumnya diperoleh dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dan juga provinsi, sedangkan yang berupa file diperoleh dengan cara mengunduh dari internet.

SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande sudah menyusun dokumen kurikulum 2013 secara lengkap, yang terdiri dari buku/dokumen I, yang merupakan deskripsi teknis kurikulum sekolah, mulai dari latar belakang hingga kalender pendidikan sekolah. Sedangkan buku/dokumen II terdiri dari pengembangan silabus tiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, dan kumpulan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) seluruh mata pelajaran.

Hampir semua dokumen kurikulum 2013 yang disusun sekolah sudah disetujui dan ditandatangani oleh komite sekolah dan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, tetapi masih ada sekolah yang belum seperti itu, artinya baru disahkan oleh kepala sekolahnya saja. Hal ini terjadi karena tidak pernah ada teguran dari dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi terhadap sekolah yang bersangkutan, mengingat tidak pernah ada petugas yang datang untuk melakukan supervisi dan monitoring terhadap kurikulum 2013 di sekolah tersebut.

Revisi atau perbaikan terhadap dokumen kurikulum 2013 pada prinsipnya dapat dilakukan setiap tahun pelajaran, bahkan setiap saat

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

manakala ditemukan kekurangan.

Pelatihan merupakan pemberitahuan secara langsung yang ditujukan untuk para tenaga pengajar yang diselenggarakan mulai dari Pelatihan Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota.

Adanya pelatihan tentang kurikulum 2013 yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018 ini diharapkan setiap peserta pelatihan nantinya memiliki beberapa kompetensi. Salah satu kompetensi tersebut adalah mampu melaksanakan pembelajaran berbasis pendekatan *scientific* (mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta), tematik dan terintegrasi dengan tetap memperhatikan karakteristik peserta didik baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, maupun intelektual.

Setelah mengikuti pelatihan, guru-guru tersebut bertugas untuk menjelaskan kembali hasil pelatihan yang diterima kepada guru-guru yang lain agar para guru yang belum mendapatkan pelatihan juga dapat memahami inti perubahan kurikulum 2013 serta dapat mencermati secara bersama-sama perbedaan dari kurikulum sebelumnya.

Pelatihan mengenai kurikulum 2013 dilakukan di Kabupaten Serang sendiri dengan difasilitasi dari LPMP, pelatihan tersebut dilakukan selama 5 hari diikuti oleh Kepala Sekolah dan guru dengan pemateri yang berasal dari pusat.

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi kurikulum 2013 kekurangan sumber daya pendukung, salah satu sumber penting adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

bahan ajar dan alat praktek yang digunakan dalam proses belajar di kelas. sarana prasarana pendidikan menjadi salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Oleh karena itu saran prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang belum terpenuhi dengan baik. kecuali pada sisi dukungan sarana ICT (information and communication technology) yang baru mencapai angka sekitar 80%.

4.3.3 Faktor yang Berpengaruh diluar Kebijakan

Sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan kebijakan kurikulum 2013 adalah partisipasi masyarakat dan komite sekolah sangat diperlukan dalam pembuatan berbagai keputusan. Dengan demikian komite sekolah dapat lebih memahami, mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan sekolah.

Dari hasil penelitian pihak komite sekolah, sangat mendukung, walaupun tidak dilibatkan dalam penyusunan detil anggaran sekolah keadaan ini diakibatkan karena faktor keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para personel komite sekolah yang rata-rata memiliki kesibukan di bidang pekerjaannya masing-masing. Biasanya komite sekolah dilibatkan dalam penyusunan rencana anggaran sekolah secara garis besar saja,

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

terutama menyangkut program sekolah yang besar dan yang bersifat penting/skala prioritas. Demikian juga dalam penyusunan dokumen kurikulum 2013, walaupun komite sekolah mendukung sepenuhnya, tetapi mereka tidak terlibat langsung secara detil dalam penyusunannya.

Tabel 4.8
 Persamaan dan Perbedaan Essensial
 Implementasi Kebijakan Kurikulum Sekolah Menengah Atas
 Kabupaten Serang di SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande

No	Aspek	SMA Negeri 1 Ciruas	SMA Negeri 1 Cikade
1	Karakteristik Masalah		
	1. Sikap pelaksana kebijakan kurikulum 2013		
	a. Kepala sekolah	Mendukung terhadap implementasi kebijakan kurikulum 2013	Mendukung terhadap implementasi kebijakan kurikulum 2013
	b. Guru	Sebagian besar mendukung terhadap implementasi kebijakan kurikulum 2013, tetapi sebaliknya untuk guru yang berusia lanjut dan menjelang pensiun memperlihatkan tidak mendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013	Sebagian besar mendukung terhadap implementasi kebijakan kurikulum 2013, tetapi sebaliknya untuk guru yang berusia lanjut dan menjelang pensiun memperlihatkan tidak mendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

No	Aspek	SMA Negeri 1 Ciruas	SMA Negeri 1 Cikade
2.	Karakteristik profesionalisme dan kompetensi pelaksana implementasi kebijakan		
	a. Kepala sekolah		
	1) Kualifikasi pendidikan, masa kerja sebagai kepala sekolah dan masa kerja sebagai guru	Kualifikasi pendidikan S2, masa kerja sebagai kepala sekolah 16 tahun dan masa kerja sebagai guru 8 tahun	Kualifikasi pendidikan S1, masa kerja sebagai kepala sekolah 13 tahun dan masa kerja sebagai guru 14 tahun
	2) Kepemimpinan	Demokratis, tidak otoriter, kooperatif, terbuka dan dalam pergaulannya tidak terlalu mengambil jarak dan bersifat kekeluargaan	Demokratis, tidak otoriter, kooperatif, terbuka dan dalam pergaulannya tidak terlalu mengambil jarak dan bersifat kekeluargaan
	b. Guru		
	1) Rasio guru	1 : 20	1 : 24
	2) Kualifikasi pendidikan	85 % S1 dan 15 % S2	95 % S1 dan 5 % S2
	3) Bersertifikat pendidikan	57 %	32 %
	4) Pengalaman guru dalam pengembangan kurikulum	memiliki pengalaman dalam pengembangan kurikulum di luar sekolahnya sendiri, terutama ditingkat kabupaten banyak dari mereka yang menjabat sebagai ketua MGMP atau pengurus MGMP tingkat kabupaten.	umumnya hanya memiliki pengalaman dalam pengembangan kurikulum di sekolahnya sendiri.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

No	Aspek	SMA Negeri 1 Ciruas	SMA Negeri 1 Cikade
5)	Pengalaman guru dalam sosialisasi kurikulum 2013	Menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi kurikulum 2013, yang diselenggarakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat kabupaten dan di sekolah	tidak pernah menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi kurikulum 2013, tetapi kalau terlibat sebagai peserta.
6)	Tingkat penguasaan guru terhadap kurikulum 2013	Tingkat penguasaan terhadap materi kurikulum 2013 belum mencapai angka ideal 100%. Masih ada sekitar 10% guru yang kurang menguasai kurikulum 2013	Penguasaan guru terhadap materi kurikulum 2013 masih sangat kurang
7)	Tingkat penguasaan guru dalam pengembangan silabus kurikulum 2013	sebagian besar guru sudah mengembangkan silabus kurikulum 2013	Belum dilaksanakan dengan semestinya oleh sebagian besar guru
8)	Tingkat penguasaan guru dalam program pembelajaran kurikulum 2013	semua guru memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran	sekitar 90% menyusun program pembelajaran kurikulum 2013, dan 10% guru tidak menyusun program pembelajaran kurikulum 2013

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

No	Aspek	SMA Negeri 1 Ciruas	SMA Negeri 1 Cikade
	c. Tim pengembang kurikulum 2013	Dalam surat keputusan kepala sekolah tentang pengangkatan tim pengembang pada sudah ada uraian tugas (job description) yang jelas dari masing-masing anggota tim.	Kepala sekolah hanya menerbitkan SK (surat keputusan) saja yang berisi susunan keanggotaan tim, di dalamnya tidak ada uraian tugas (job description) yang jelas dari masing-masing anggota tim.
2.	Daya Dukung Kebijakan		
	a. Kejelasan komunikasi dan tujuan		
	1) Media komunikasi	berupa audio visual dan fotokopi makalah yang dibagikan kepada para guru	berupa audio visual dan fotokopi makalah yang dibagikan kepada para guru
	2) Pelaku komunikasi	kepala sekolah dan pengawas SMA	kepala sekolah dan pengawas SMA
	3) Metode komunikasi	ceramah biasa, kadang diselingi dengan tanya jawab	ceramah biasa, kadang diselingi dengan tanya jawab
	4) Intensitas komunikasi	hanya sekali saja dari kepala sekolah dalam satu tahun	hanya sekali saja dari kepala sekolah dalam satu tahun
	5) Audiens komunikasi	semua guru yang ada di sekolah ini, baik guru tetap maupun guru tidak tetap, karyawan, tetapi hanya diwakili oleh kepala tata usaha saja	semua guru yang ada di sekolah ini, baik guru tetap maupun guru tidak tetap, karyawan tetapi hanya diwakili oleh kepala tata usaha saja
	6) Materi komunikasi	Tingkat kejelasan materi yang disampaikan dalam sosialisasi tentang kurikulum 2013 cukup jelas.	ada yang relevan dengan masalah yang berhubungan dengan kurikulum 2013, tetapi ada juga yang tidak relevan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

No	Aspek	SMA Negeri 1 Cirus	SMA Negeri 1 Cikade
	7) Monitoring dan supervisi	tidak ada kegiatan monitoring dan supervisi dari pihak dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi maupun dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten terhadap pelaksanaan kurikulum 2013	hanya pengawas SMA dan dilakukan sekaligus melaksanakan agenda supervisi pengawas secara umum, tidak ada fokus tentang materi kurikulum 2013
	b. Isi kebijakan kurikulum 2013		
	1) Relevansi kebijakan kurikulum 2013	kurikulum 2013 yang disusun sudah relevan dengan kebutuhan siswanya tetapi masih diperlukan penyesuaian dan pengembangan lagi	isi kurikulum 2013 sudah relevan dengan kebutuhan siswa, namun sebagian lainnya belum bisa mengakomodasi kebutuhan siswa sepenuhnya
	2) Kelengkapan dokumen kurikulum 2013	Ada dan cukup lengkap termasuk dalam bentuk file komputer, kami peroleh kebanyakan dari download di internet	Ada dan cukup lengkap. Dokumen-dokumen peraturan dan pedoman yang lain tentang penyusunan kurikulum 2013 cukup lengkap

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

No	Aspek	SMA Negeri 1 Ciruas	SMA Negeri 1 Cikade
	3) Pengesahan dan perubahan dokumen kurikulum 2013	Pada awal tahun diberlakukannya, dokumen kurikulum 2013 sudah diketahui oleh komite sekolah, dan disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	Pada awalnya dokumen kurikulum 2013 kami tidak diketahui oleh komite sekolah, juga belum diketahui atau disahkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi. tetapi kemudian disempurnakan dengan adanya lembar diketahui komite sekolah dan disahkan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi
	c. Pembiayaan dan Sarana prasarana pendukung kurikulum 2013	mendukung semua aspek pembiayaan untuk dapat berjalannya kurikulum 2013. Sarana prasarana sudah mencukupi kebutuhan dasar bagi sebuah sekolah.	mendukung semua aspek pembiayaan untuk dapat berjalannya kurikulum 2013. Sarana prasarana belum sepenuhnya terpenuhi untuk dapat mendukung terlaksananya kurikulum 2013 dengan optimal
3.	Faktor yang berpengaruh dari luar		
	a. Komite sekolah dalam penyusunan anggaran	dilibatkan tapi sebatas dalam penyusunan program kerja saja. Sedangkan detil penyusunan anggaran sekolah tidak	tidak ikut serta dalam penyusunan anggaran sekolah. tetapi diminta persetujuan dalam RKAS.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

No	Aspek	SMA Negeri 1 Ciruas	SMA Negeri 1 Cikade
	b. Komite sekolah dalam penyusunan kurikulum 2013	Pihak komite sekolah tidak dilibatkan dalam penyusunan kurikulum 2013, dengan beberapa pertimbangan, seperti kesibukan masing - masing personil komite, juga kemampuan dan kompetensi di bidang kurikulum.	tidak pernah mendapat undangan atau pemberitahuan dari pihak sekolah. Tetapi andaikata dilibatkan pun komite sekolah merasa kurang menguasai masalah kurikulum dan komite sekolah tetap mendukung program sekolah

Sumber : Peneliti 2017



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB V

PENUTUP

5.1 . Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keterlaksanaan / Implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Ciruas Kabupaten Serang, masih menemui hambatan atau kendala terutama pada aspek kriteria profesionalisme dan kompetensi pelaksana implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat penguasaan guru terhadap kurikulum 2013 belum mencapai angka ideal 100%, masih ada sekitar 10% guru yang kurang menguasai kurikulum 2013. Selanjutnya pada aspek komunikasi yang kurang intensif, sehingga menyebabkan lemahnya pemahaman terhadap materi kurikulum 2013 secara utuh di kalangan guru di sekolah dan monitoring dan supervisi dikarenakan tidak ada kegiatan monitoring dan supervisi dari pihak dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi maupun dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten terhadap pelaksanaan kurikulum 2013.
2. Implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang, masih menemui hambatan atau kendala terutama pada aspek kriteria profesionalisme dan kompetensi pelaksana implementasi kebijakan kurikulum 2013 berupa tingkat penguasaan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

guru terhadap kurikulum 2013 masih kurang, tingkat penguasaan guru dalam pengembangan silabus kurikulum 2013 belum dilaksanakan dengan semestinya oleh sebagian besar guru, tingkat penguasaan guru dalam program pembelajaran kurikulum 2013 sekitar 90% menyusun program pembelajaran kurikulum 2013 dan 10% guru tidak menyusun program pembelajaran kurikulum 2013.

Pada aspek komunikasi yang kurang intensif, sehingga menyebabkan lemahnya pemahaman terhadap materi kurikulum 2013 secara utuh di kalangan guru di sekolah. monitoring dan supervisi dikarenakan tidak ada kegiatan monitoring dan supervisi dari pihak dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi maupun dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten terhadap pelaksanaan kurikulum 2013. Selanjutnya pada aspek daya dukung kebijakan sarana prasarana belum sepenuhnya terpenuhi untuk dapat mendukung terlaksananya kurikulum 2013 dengan optimal

3. Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri yang ada di Kabupaten Serang masih menemui hambatan atau kendala yang dialami oleh pihak sekolah meliputi tiga aspek, yaitu: (a) masih rendahnya kriteria profesionalisme dan kompetensi pelaksana implementasi kebijakan kurikulum terutama kemampuan guru dalam pengembangan silabus dan penyusunan RPP (b) komunikasi yang kurang intensif, sehingga menyebabkan lemahnya pemahaman terhadap materi kurikulum 2013 secara utuh di kalangan guru di sekolah; (c) lemahnya aspek supervisi dan monitoring, menyebabkan pihak sekolah tidak tahu

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pada bagian mana dalam dokumen Kurikulum 2013 dan pelaksanaannya yang masih perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan.

5.2. Saran-saran

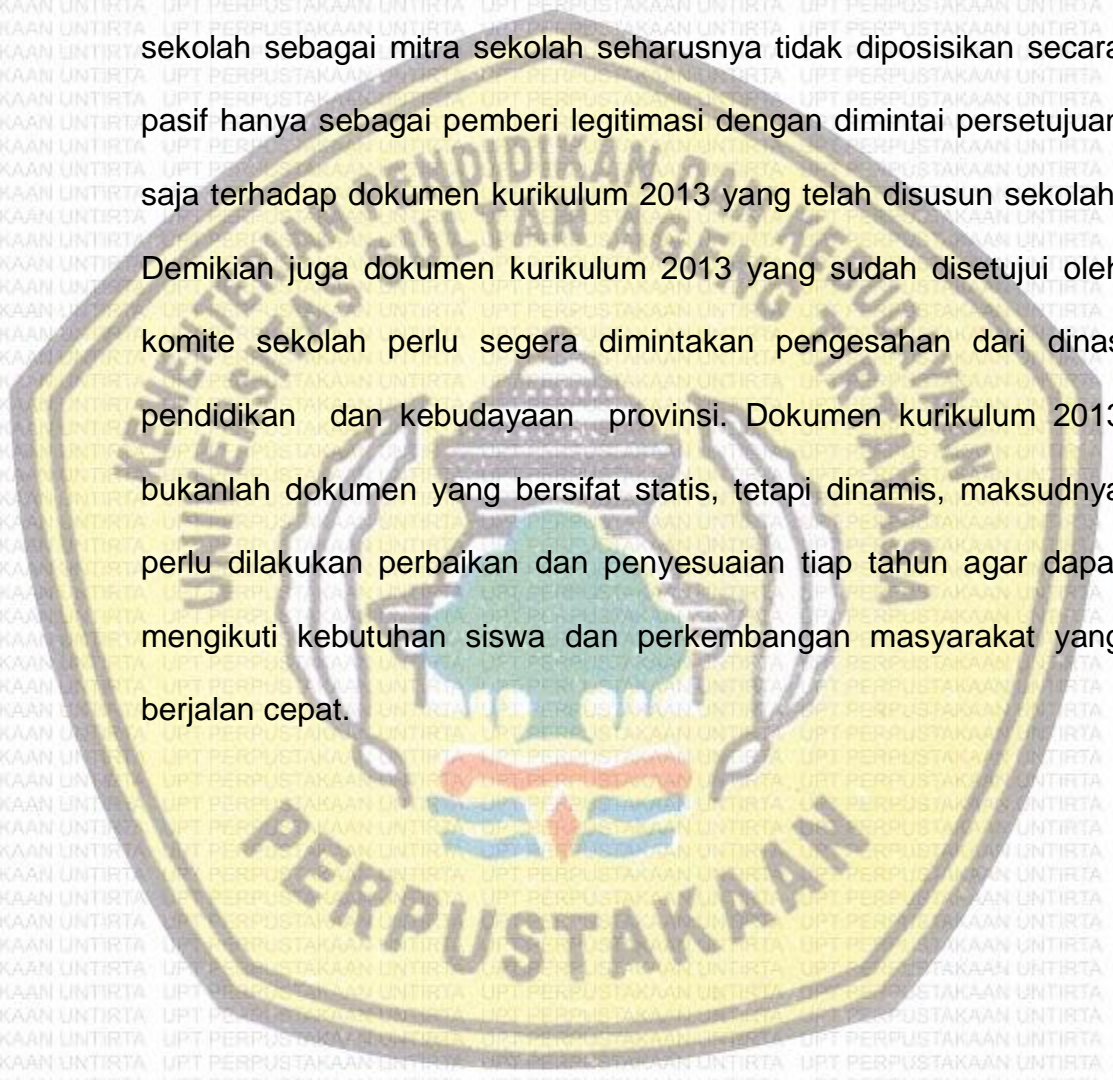
Berdasarkan temuan di lapangan, maka perkenankanlah peneliti menyampaikan beberapa saran untuk beberapa pihak terkait dengan harapan bisa dijadikan sebagai bahan introspeksi dan pertimbangan untuk upaya perbaikan pada masa mendatang.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten perlu meningkatkan intensitas komunikasi dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan program kurikulum 2013, sehingga dapat diketahui hambatan dan ketidaksesuaian antara ketentuan dengan pelaksanaan di sekolah. Selama ini kegiatan supervisi dan monitoring baru dilakukan oleh pengawas dalam kegiatan kepengawasan secara rutin. Hal semacam ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika pihak dinas pendidikan dan kebudayaan melakukan fungsi kepengawasan secara baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, maka perlu ditekankan pentingnya upaya peningkatan kualitas, frekuensi, dan pemerataan kegiatan pendidikan dan pelatihan, workshop, dan kegiatan lain yang sejenis, dalam bidang pengembangan kurikulum, pengembangan silabus, penyusunan perangkat pembelajaran, teknik penilaian, dan lain-lain, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas guru di sekolah.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2. Pihak sekolah dalam proses penyusunan dokumen kurikulum 2013 harus berpedoman pada ketentuan yang ada, disamping melibatkan unsur keterwakilan guru dan siswa sebagai warga sekolah juga perlu melibatkan komite sekolah secara aktif dan proporsional. Komite sekolah sebagai mitra sekolah seharusnya tidak diposisikan secara pasif hanya sebagai pemberi legitimasi dengan dimintai persetujuan saja terhadap dokumen kurikulum 2013 yang telah disusun sekolah. Demikian juga dokumen kurikulum 2013 yang sudah disetujui oleh komite sekolah perlu segera dimintakan pengesahan dari dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi. Dokumen kurikulum 2013 bukanlah dokumen yang bersifat statis, tetapi dinamis, maksudnya perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian tiap tahun agar dapat mengikuti kebutuhan siswa dan perkembangan masyarakat yang berjalan cepat.



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfa Beta
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, Jakarta PT. Rineka cipta.
- Baxter, Pamela. Susan Jack.2008. "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers"*The Qualitative Report* Volume 13 Number 4 (December)
- Dharma, Satria et.al. (2009). *Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional*. Jakarta : PT Grasindo.
- Dunn, William (2009). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Terjemahan.
- Hidayat, Sholeh. 2013. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Islamy. Irfan (2014) *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniasih, Imas & Sani, Berlin. (2014). *Implementasi Kurikulum 2013 Konsep & Penerapan*. Surabaya: Kata Pena
- Moleong, Lexy J 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Munir, Abdullah, (2010) *Pendidikan Karakter - Membangun Karakter Anak Jejak Dari Rumah*, Yogyakarta, Bintang Pustaka Abadi.
- Mulyasa, E. (2013). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi* Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
- Mustopadidjaja, A.R. (2003) *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Duta Pertiwi Foundation
- Nasution, S (2008). *Berbagai pendekatan dalam Proses Belajar Mangajar*. Jakarta: Biana Aksara.
- Neuman, Lawrence. W.2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Eds.7. Penerjemah: Edina T. Sofia. Jakarta: PT.Indeks.
- Raharjo, S. B. 2014. *Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 16, No. 3, Mei 2014. Jakarta: Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional.
- Riant Nugroho. (2011) *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Ritzer, G. 2004. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (edisi kelima), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Rohman, Arif Wiyono, Teguh, 2010, *Education Policy in Decentralization Era*. Yogyakarta Pustaka Pelajar,

Rohmanudin. 2014. *Pemahaman Guru tentang Kurikulum 2013 SMK dan Implementasinya pada SMK Program Keahlian Teknik Mesin (Studi Kasus pada SMK Negeri 1 Kertosono)*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: UM.

Samodra Wibawa dkk. 2005. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sariono. 2014. Kurikulum 2013: *Kurikulum Generasi Emas. Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya*.

Solichin A.W. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta

Wattimena Reza A.A, 2008 *Filsafat dan Sains*, Jakarta: Grasindo.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Konsep*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yin, Robert K. 2003. *Case Study Research Design and Method*. California: Sage Publications

Sumber Lain :

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2013

Dokumen Kurikulum 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas 2045, *Paparan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan . Semarang, 21 September 2013.

Baraya Pos Edisi 05Juni 2013

citizendaily, edisi Selasa 24 Mei 2016.

Retrieved from <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia> (online)

Retrieved from Pikiran rakyat.com. 2016. *Nilai Rerata UN SMA 2016 Turun, Kejujuran Bertambah*. (online) (<http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/05/09/nilai-rerata-un-sma-2016-turun-kejujuran-bertambah-368657>)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Retrieved from Pendidikan indonesia.com.2015. *Potret Dunia Pendidikan Indonesia* (online) (<http://www.pendidikanindonesia.com/2015/01/potret-dunia-pendidikan-di-indonesia.html>)

Konvensi Pendidikan Nasional Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016: Studi Hasil Hasil Asesmen Internasional PISA 2012

Retrieved from <http://www.enolsatoe.org/content/view/15/33/>. Diakses pada 23 Maret 2017 pukul 17.00 WIB

Retrieved from <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/04/22/oos18d414-mendiknas-dorong-penguatan-pendidikan-karakter-dimasukkan-ke-pelatihan-kurikulum-2013>. Diakses tanggal 29 April 2017 pada pukul 10.15 WIB

Retrieved from <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia> (online) diakses pada tanggal 05 Maret 2017 Pukul 20.55 WIB



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



LAMPIRAN

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/ diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PETIKAN HASIL WAWANCARA
dengan
KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 CIRUAS

Hasil wawancara ini digunakan dalam menggali informasi di lapangan kepada narasumber yang mengetahui dan memahami serta memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan mendasar tentang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Serang khususnya bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Ciruas Kabupaten Serang.

Fokus masalah : Implementasi Kebijakan Kurikulum

1. Seharusnya kepala sekolah mendukung kebijakan dari pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan tentang implemetansi kebijakan kurikulum 2013, bagaimana sikap bapak terhadap implemetansi kebijakan kurikulum 2013.

kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan, karena itu kurikulum 2013 dirancang agar siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik demi menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, saya selaku kepala sekolah mendukung penuh pelaksanaan kurikulum 2013 disekolah yang saya pimpin

2. Sebagai implementor kebijakan kurikulum 2013 guru disekolah bapak, patuhan kebijakan tersebut. Tugas guru adalah mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajar dan untuk hal tersebut sudah seharusnya menyusun program pembelajaran. bagaimana dengan guru di sekolah yang bapak pimpin.

Semua guru di sekolah kami menyusun perangkat pembelajaran pada awal semester, jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Tetapi kalau melihat kualitas perangkat pembelajaran yang disusun guru memang bervariasi, tetapi tetap dengan acuan utama tetap yang dikeluarkan oleh BSNP.

3. Metode Komunikasi seperti apa yang digunakan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan dalam menyampaikan implementasi kebijakan kurikulum 2013.

Dalam komunikasi tentang masalah kurikulum 2013 biasanya pihak dinas pendidikan hanya menggunakan metode ceramah saja. Kadang-kadang ada satu-dua pertanyaan dari peserta rapat. Tidak pernah menggunakan metode komunikasi yang lain, seperti diskusi,

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

studi kasus, atau lainnya. Peserta rapat diberikan fotokopi ringkasan materi atau buku-buku yang berkaitan

4. Seharusnya dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai perwakilan kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan rutin mengkomunikasikan implementasi kebijakan kurikulum ini baik dengan kepala sekolah atau pun guru sebagai implementor kebijakan, seberapa intenskah dinas pendidikan dan kebudayaan melaksanakan hal tersebut.

Proses komunikasi dari dinas pendidikan Kabupaten Serang terhadap sekolah-sekolah tentang masalah kurikulum 2013 hanya dilakukan pada tahun awal pemberlakuan kurikulum 2013 saja, tepatnya pada tahun 2013. Itupun dilakukan dalam sebuah rapat yang relatif singkat, dengan mengundang para kepala sekolah atau yang mewakili. Nah, setelah tahun berikutnya dinas pendidikan kabupaten tidak lagi menyampaikan masalah kurikulum 2013. Jadi menurut saya, dalam hal ini komunikasi dari dinas pendidikan kabupaten tidak maksimal.

5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan seharusnya pihak dinas pendidikan dan kebudayaan melaksanakan monitoring, seberapa seringkah dinas pendidikan dan kebudayaan melaksanakan monitoring pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri Ciruas

Belum pernah. Sejak pertama kali kurikulum 2013 diberlakukan di sekolah kami sekitar empat tahun yang lalu belum pernah diadakan kegiatan monitoring dan supervisi dari pihak manapun. Baik itu dari dinas pendidikan provinsi, atau dinas pendidikan Kabupaten. Jadi kami tidak tahu pada bagian mana yang perlu diperbaiki, dan bagian mana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, kalau kami membawa konsep kurikulum 2013 untuk diketahui Dinas Pendidikan Provinsi, tidak ada upaya untuk meneliti isi kurikulum 2013, mereka yang berwenang langsung menandatangani lembar pengesahan yang sudah kami buat.

6. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu dibutuhkan pendanaan yang besar begitu juga dengan implementasi kebijakan kurikulum 2013, bagaimana dengan sekolah yang bapak pimpin.

Tentu saja sekolah sangat mendukung semua aspek pembiayaan untuk dapat berjalannya kurikulum di tempat kami. Hal ini mengingat kurikulum adalah jantungnya lembaga pendidikan sekolah, maka harus benar-benar dipikirkan pendanaannya. Kalau tidak, maka akan kacau. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sekolah bersikap setengah-setengah terhadap masalah pembiayaan kurikulum

PERINGATAN !!!

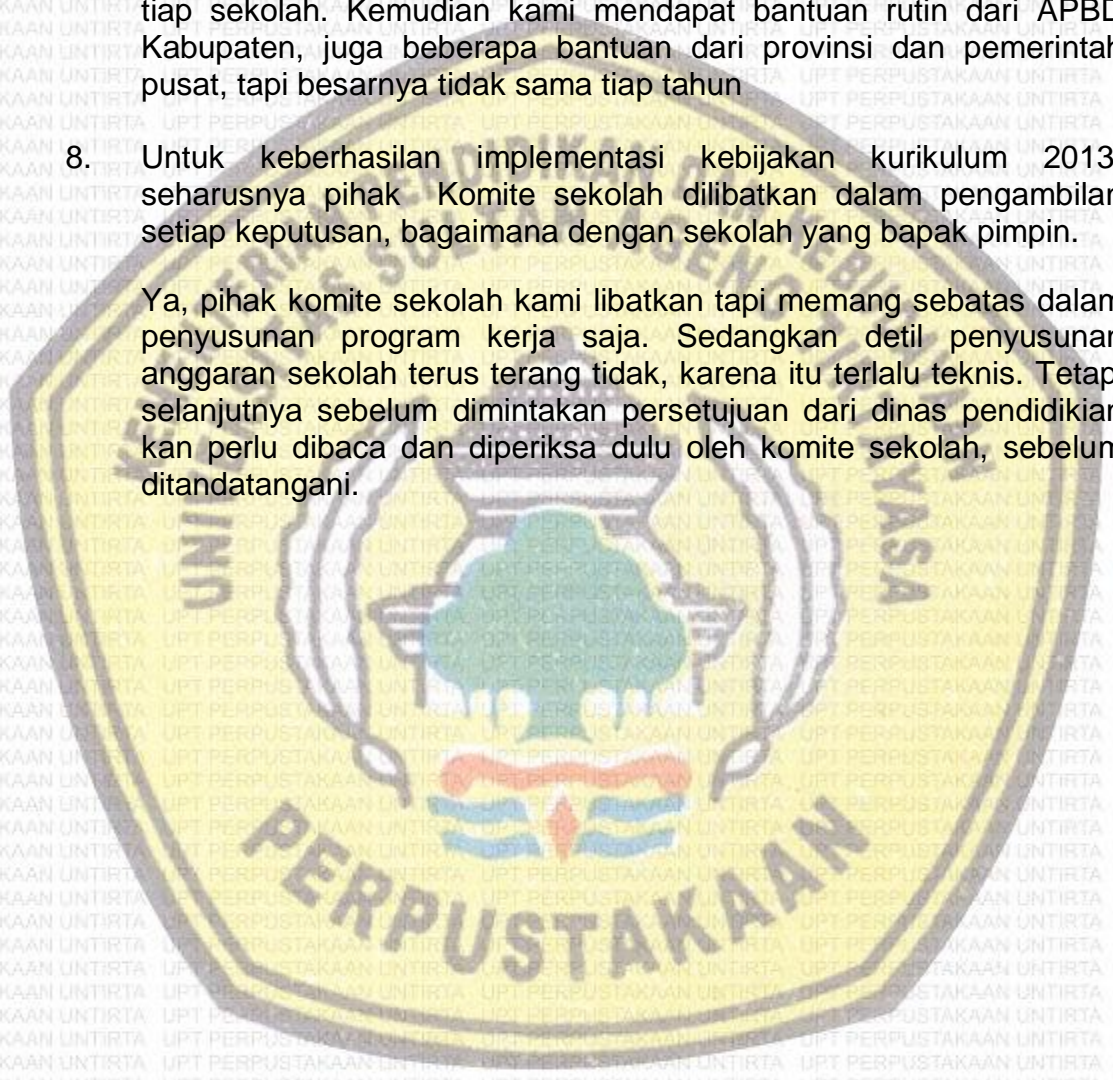
1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

7. Darimana Sumber dana yang seharusnya digunakan dalam pendanaan implementasi kebijakan kurikulum 2013 di sekolah yang bapak pimpin.

Sumber pembiayaan bagi SMA negeri di Kabupaten Serang pada umumnya ya sama, diperoleh dari komite sekolah, melalui sumbangan orangtua siswa setiap bulan, yang besarnya berbeda tiap sekolah. Kemudian kami mendapat bantuan rutin dari APBD Kabupaten, juga beberapa bantuan dari provinsi dan pemerintah pusat, tapi besarnya tidak sama tiap tahun

8. Untuk keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum 2013, seharusnya pihak Komite sekolah dilibatkan dalam pengambilan setiap keputusan, bagaimana dengan sekolah yang bapak pimpin.

Ya, pihak komite sekolah kami libatkan tapi memang sebatas dalam penyusunan program kerja saja. Sedangkan detil penyusunan anggaran sekolah terus terang tidak, karena itu terlalu teknis. Tetapi selanjutnya sebelum dimintakan persetujuan dari dinas pendidikan kan perlu dibaca dan diperiksa dulu oleh komite sekolah, sebelum ditandatangani.



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PETIKAN HASIL WAWANCARA
dengan
KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 CIKANDE

Hasil wawancara ini digunakan dalam menggali informasi di lapangan kepada narasumber yang mengetahui dan memahami serta memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan mendasar tentang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Serang khususnya bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang.

Fokus masalah : Implementasi Kebijakan Kurikulum

1. Seharusnya kepala sekolah mendukung kebijakan dari pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan tentang implemementasi kebijakan kurikulum 2013, bagaimana sikap bapak terhadap implemementasi kebijakan kurikulum 2013.

Tentu saja setiap keputusan yang dibuat oleh pusat menimbulkan dampak bagi kami warga sekolah karena kita berada dalam satu sistem dengan pemerintahan pusat. Kita tidak mungkin tidak melaksanakan apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat karena kita berpikir ini adalah keputusan yang terbaik dalam rangka mempersiapkan masa depan anak-anak kita.

2. Sebagai implementor kebijakan kurikulum 2013 guru disekolah bapak, patuhan kebijakan tersebut. Tugas guru adalah mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajar dan untuk hal tersebut sudah seharusnya mengembangkan silabus pembelajaran. bagaimana dengan guru di sekolah yang bapak pimpin.

Kalau mau jujur ya ... sebagian besar guru belum dapat melakukan kegiatan pengembangan silabus sebagaimana mestinya. Saya lihat ketika awal semester para guru mengajukan silabus kepada kepala sekolah ya masih tidak jauh berbeda dengan contoh silabus dari pusat, atau masih mengkopi dari MGMP. Padahal kondisi SMA Negeri 1 Ciruas dan SMA Negeri 1 Cikande berbeda, jadi ya silabus mestinya berbeda tiap sekolah

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3. Sebagai implementor kebijakan kurikulum 2013 guru di sekolah bapak, patuhan kebijakan tersebut. Tugas guru adalah mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajar dan untuk hal tersebut sudah seharusnya menyusun program pembelajaran. bagaimana dengan guru di sekolah yang bapak pimpin.

Kepatuhan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran di sekolah kami pada tahun terakhir ini sekitar 90%, maksudnya 10% diantara guru yang ada tidak menyusunnya. Biasanya kepala sekolah kami membuat daftar guru yang membuat dan yang tidak membuat perangkat pembelajaran dan kemudian guru tersebut dipanggil satu persatu untuk dicari penyebab ketidak patuhan guru tersebut.

4. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan seharusnya pihak dinas pendidikan dan kebudayaan melaksanakan monitoring, seberapa seringkah dinas pendidikan dan kebudayaan melaksanakan monitoring pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri Cikande

Petugas yang melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi ke sekolah adalah Pengawas itupun dilaksanakan pada saat pengawas melakukan kegiatan supervisi, jadi bukan merupakan agenda khusus monitoring tentang kurikulum 2013.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PETIKAN HASIL WAWANCARA
dengan
WAKIL KEPALA SEKOLAH URUSAN KURIKULUM
SMA NEGERI 1 CIRUAS

Hasil wawancara ini digunakan dalam menggali informasi di lapangan kepada narasumber yang mengetahui dan memahami serta memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan mendasar tentang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Serang khususnya bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Ciruas Kabupaten Serang.

Fokus masalah : Implementasi Kebijakan Kurikulum

1. Seharusnya wakil kepala sekolah mendukung kementerian pendidikan dan kebudayaan tentang implemetasi kebijakan kurikulum 2013, bagaimana sikap bapak terhadap implemetasi kebijakan kurikulum 2013.

Ya, tentu saja pa... Saya sangat mendukung, demikian juga teman-teman guru yang lain juga selama ini mendukung semuanya, tidak ada yang keberatan. Kan sudah peraturannya begitu. Asalkan ditinjau terus sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Dengan melibatkan Tim Pengembang. Jangan sampai kurikulum 2013 itu dari awal sampai seterusnya tidak mengalami perubahan dan perkembangan kan tujuan dari kurikulum 2013 adalah persiapan untuk generasi emas bangsa Indonesia.

2. Sebagai implementor kebijakan kurikulum 2013 guru di SMA Negeri 1 Ciruas, kepatuhan guru terhadap kebijakan tersebut. Dalam kurikulum 2013 guru dapat mengembangkan kurikulum, bagaimana penguasaan guru terhadap kurikulum 203 di SMA Negeri Ciruas

Tingkat penguasaan para guru di sekolah kami terhadap kurikulum 2013 ya kira-kira baru 90% saja. Sisanya masih kurang menguasai, dilihat dari keseharian dalam menjalankan tugas sebagai guru sering mengalami hambatan atau kesulitan. Hambatan yang paling menonjol misalnya guru masih terlalu berperan sentral di kelas karena siswa tidak bisa diarahkan untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3. Sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum tentu bapak terlibat dalam tim pengembang kurikulum di SMAN 1 Ciruas, bagaimana tim pengembang kurikulum di SMAN 1 Ciruas.

Dalam susunan TPK 3 tahun terakhir tidak ada uraian tugas yang jelas dari tim pengembang. Dalam surat keputusan kepala sekolah tentang pengangkatan tim pengembang hanya disebutkan susunan tim saja, tapi tidak ada uraian tugas yang jelas dari masing-masing anggota tim. Barulah pada tahun 2017 ini ada uraian tugas nya.

4. Media Komunikasi seperti apa yang digunakan oleh kepala sekolah dalam menyampaikan implementasi kebijakan kurikulum 2013.

Media komunikasi yang digunakan adalah disamping berupa audio visual, berupa mikrofon dan speaker ruangan, juga multimedia, misalnya menggunakan laptop dan proyektor untuk lebih memperjelas komunikasi yang disampaikan. Disamping itu juga ada fotokopi makalah yang dibagikan kepada para guru.

5. Siapakah yang menyampaikan sosialisasi implementasi kebijakan kurikulum di SMAN 1 Ciruas.

Yang menyampaikan sosialisasi kepada kami di sekolah yaitu kepala sekolah dan pengawas yang memberikan sosialisasi tentang kurikulum 2013 di sekolah kami

6. Seharusnya kepala sekolah sebagai pimpinan implentor kebijakan kurikulum 2013 dengan rutin mengkomunikasikan implementasi kebijakan kurikulum ini baik dengan guru, seberapa intenskah kepala sekolah melaksanakan hal tersebut.

Dalam satu tahun terakhir sosialisasi tentang kurikulum 2013 di sekolah kami mungkin hanya sekali saja dari kepala sekolah sendiri. Tapi pada tahun tahun sebelumnya tidak diadakan sosialisasi, informasi kurikulum 2013 hanya dilakukan sebagai informasi sisipan pada rapat dinas kenaikan kelas, jadi tidak terlaksana sesuai jadwal atau secara terencana dengan baik.

7. Bagaimana dengan kesesuaian materi yang disampaikan dalam kurikulum 2013 menurut bapak.

Memang dalam kebijakan tentang kurikulum 2013 dimungkinkan terjadinya beda penafsiran para guru dari tiap sekolah terhadap suatu ketentuan yang ada. Contohnya dalam hal penetapan ketuntasan belajar minimal, penghitungan nilai rapor, kriteria kenaikan kelas, penentuan penambahan jam pelajaran dalam seminggu, dan lain-lain.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

8. Salah satu prinsip pengembangan kurikulum 2013 adalah relevansinya dengan kebutuhan siswa, apakah pengembangan kurikulum yang disusun sudah mengakomodir hal tersebut.

Sudah. kurikulum 2013 yang ada relevan dengan kebutuhan siswa kami. Tetapi kami akui tentu masih perlu pengembangan lagi. Misalnya masalah KBM yang harus ditingkatkan lagi, peminatan dan lintas minat yang benar-benar memberi manfaat praktis bagi siswa setelah lulus, dan juga aspek pengembangan karakter yang diharapkan bisa membentuk karakter siswa yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kehidupan).

9. Apakah SMAN 1 Ciruas mempunyai dokumen peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan kurikulum 2013.

Ada dan cukup lengkap termasuk dalam bentuk file komputer, kami peroleh kebanyakan dari download di internet

10. Berdasarkan ketentuan, dokumen kurikulum harus terdiri dari Buku I dan Buku II, bagaimana dengan dokumen kurikulum SMA Negeri 1 Ciruas.

Sudah ada semua. Buku I sudah ada, buku II juga sudah lengkap. Itu semua hasil penyusunan dari tim pengembang kurikulum dan semua guru-guru mapel yang ada.

11. Apakah dokumen kurikulum 2013 yang telah selesai disusun oleh sekolah sebelum diberlakukan atau digunakan di sekolah disahkan terlebih dahulu oleh kepala sekolah, disetujui oleh komite sekolah, dan diketahui oleh Dinas Pendidikan.

Pada tahun ketiga diberlakukannya, Dokumen kurikulum 2013 sekolah kami sudah diketahui oleh Komite Sekolah, dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten

12. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu dibutuhkan pendanaan yang besar begitu juga dengan implementasi kebijakan kurikulum 2013, bagaimana dengan dukungan pembiayaan di SMAN 1 Ciruas.

Menurut penilaian saya pihak sekolah sangat mendukung dari segi pembiayaan terhadap pelaksanaan kurikulum 2013. Hanya saja kendalanya adalah mengingat jumlah dan sumber pemasukan keuangan yang masih terbatas, maka jumlah biaya yang dikeluarkan juga masih terbatas. Tapi kalau dihitung dari prosentase secara keseluruhan sudah cukup besar, bahkan mayoritas penggunaan dana di sekolah kan untuk mendukung baik langsung atau tidak langsung bagi terlaksananya kurikulum.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PETIKAN HASIL WAWANCARA
dengan
WAKIL KEPALA SEKOLAH URUSAN KURIKULUM
SMA NEGERI 1 CIKANDE

Hasil wawancara ini digunakan dalam menggali informasi di lapangan kepada narasumber yang mengetahui dan memahami serta memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan mendasar tentang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Serang khususnya bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang.

Fokus masalah : Implementasi Kebijakan Kurikulum

1. Seharusnya wakil kepala sekolah urusan mendukung kementerian pendidikan dan kebudayaan tentang implemetasi kebijakan kurikulum 2013, bagaimana sikap bapak terhadap implemetasi kebijakan kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 sangat bagus pa...karena membawa siswa-siswa menuju jenjang globalisasi...jadi kalau kita memang mau setara dengan pendisikan diluar dalam hal ini pendidikan diluar negeri, semestinya kita mengikuti kurikulum 2013 karena memang menurut pengalaman saya sebagai guru, kurikulum itu diubah dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan pendidikan dan juga menyangkut output itu sendiri.

2. Sebagai implementor kebijakan kurikulum 2013 guru di SMA Negeri 1 Cikande, patuhan terhadap kebijakan tersebut. Dalam kurikulum 2013 guru dapat mengembangkan kurikulum, apakah bapak pernah terlibat dalam pengembangan kurikulum 2013 dan tingkat apa.

Pernah, tapi hanya di tingkat sekolah sendiri setelah berlakunya kurikulum 2013 sekarang ini. Kan saya sebagai waka kurikulum, tentu saja yang bertanggungjawab dengan adanya program pengembangan kurikulum di sekolah saya. dalam melakukan pekerjaan tersebut saya dibantu oleh seorang asisten kurikulum.

3. Sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum tentu bapak terlibat dalam tim pengembang kurikulum di SMAN 1 Cikande, bagaimana tim pengembang kurikulum di SMAN 1 Cikande.

Tidak ada tentang hal itu. Kami hanya menerima SK/ surat keputusan kepala sekolah tentang susunan tim pengembang kurikulum, tetapi tidak ada pembagian tugas yang jelas dan terperinci dari masing-masing anggota yang ada. Jadi dalam pelaksanaannya ya disesuaikan saja dengan kebutuhan situasional.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4. Sebagai implementor kebijakan kurikulum 2013 guru di SMA Negeri 1 Ciruas, penguasaan terhadap kebijakan tersebut. Dalam kurikulum 2013 guru dapat mengembangkan kurikulum, bagaimana Tingkat penguasaan guru terhadap kurikulum 2013 di SMA Negeri Cikande

Menurut penilaian saya tingkat penguasaan guru di sekolah saya masih sangat kurang. Masih sering terjadi beda penafsiran diantara para guru terhadap suatu pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis kurikulum. Misalnya dalam hal sistematika RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) dan tata cara penuangan gagasan pembelajaran yang kreatif, penentuan KBM (ketuntasan belajar minimal), cara penilaian dan lain-lain.

5. Media Komunikasi seperti apa yang digunakan oleh kepala sekolah dalam menyampaikan implementasi kebijakan kurikulum 2013.

Media komunikasi yang digunakan adalah disamping berupa audio visual, berupa mikrofon dan speaker ruangan, juga multimedia, misalnya menggunakan laptop dan proyektor untuk lebih memperjelas komunikasi yang disampaikan. Disamping itu juga ada fotokopi makalah yang dibagikan kepada para guru.

6. Siapakah yang menyampaikan sosialisai implementasi kebijakan kurikulum di SMAN 1 Ciruas.

Di sekolah kami yang pernah memberikan informasi atau sosialisai tentang kurikulum 2013 adalah kepala sekolah. Informasi tersebut biasanya disisipkan pada rapat-rapat pembinaan dengan guru. Jadi tidak dalam rapat khusus, misalnya in house training tentang kurikulum 2013. Pernah juga pengawas sekolah, dalam hal ini pengawas pendidikan menengah, tetapi setahu saya hanya sekali memberikan informasi tentang kurikulum 2013 pada awal diberlakukannya, itupun hanya secara umum di depan dewan guru.

7. Salah satu prinsip pengembangan kurikulum 2013 adalah relevansinya dengan kebutuhan siswa, apakah pengembangan kurikulum yang disusun sudah mengakomodir hal tersebut.

Kurikulum 2013 yang disusun di sekolah kami sebagian sudah relevan dengan kebutuhan siswa, tetapi kami akui memang belum sepenuhnya optimal. Jadi ya ... masih perlu dilakukan penyempurnaan terus menerus, pa ... Karena kebutuhan siswa kan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, jadi kurikulum sekolah juga harus ikut menyesuaikan..

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

8. Apakah SMAN 1 Cikande mempunyai dokumen peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan kurikulum 2013

Ada, dan cukup lengkap. Dokumen-dokumen peraturan dan pedoman yang lain tentang penyusunan kurikulum 2013 dan lain-lain cukup lengkap.

9. Berdasarkan ketentuan, dokumen kurikulum harus terdiri dari Buku I dan Buku II, bagaimana dengan dokumen kurikulum SMA Negeri 1 Cikande.

Dokumen kurikulum 2013 yang disusun sekolah kami sudah lengkap Buku I ada...Buku II juga ada pa, tapi memang masih terus dibenahi

10. Apakah dokumen kurikulum 2013 yang telah selesai disusun oleh sekolah sebelum diberlakukan atau digunakan di sekolah disahkan terlebih dahulu oleh kepala sekolah, disetujui oleh komite sekolah, dan diketahui oleh Dinas Pendidikan.

Pada awalnya Dokumen kurikulum 2013 kami tidak diketahui oleh komite sekolah, juga belum diketahui atau disahkan oleh dinas pendidikan provinsi. Alasannya karena selama ini tidak ada perintah atau teguran dari atasan, ya kami jalan terus seperti biasa.” Tetapi kemudian disempurnakan dengan adanya lembar diketahui oleh Komite Sekolah dan lembar Pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, hal itu dilakukan setiap awal tahun pelajaran.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PETIKAN HASIL WAWANCARA
dengan
DEWAN GURU SMA NEGERI 1 CIRUAS

Hasil wawancara ini digunakan dalam menggali informasi di lapangan kepada narasumber yang mengetahui dan memahami serta memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan mendasar tentang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Serang khususnya bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Ciruas Kabupaten Serang.

Fokus masalah : Implementasi Kebijakan Kurikulum

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap implelementasi kebijakan kurikulum 2013.

Kurikulum ini lebih bagus dari kurikulum sebelumnya karena lebih mengutamakan siswa dan siswa lebih aktif dari guru (Pendapat 1)

Kurikulum 2013 itu kurikulum yang baik. Standar Isi dan Standar Proses bagus, model pembelajaran pun dapat membuat siswa menjadi lebih aktif. Dari segi positifnya Kurikulum 2013 memiliki teknik penilaian yang bagus karena semua aspek dinilai yaitu aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Namun, Kurikulum 2013 juga memiliki segi negatif karena aspek yang dinilai lebih banyak maka administrasinya juga lebih banyak dan menyulitkan pihak guru apalagi untuk guru yang sudah tua.seperti saya (Pendapat 2)

2. Bagaimana dengan Sosialisasi kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Ya ada, tapi tidak sepenuhnya, artinya hanya setengah-setengah. Sepertinya kebijakan tentang kurikulum 2013 ini diluncurkan begitu saja tanpa adanya pembimbingan dan sosialisasi yang cukup, masing-masing sekolah dilepaskan begitu saja. Contohnya, mestinya semua atau sebagian besar guru diikuti dalam workshop tentang kurikulum, bukan sistem perwakilan. Memang pernah beberapa kali dilaksanakan, tapi pelaksanaan tidak pernah optimal, terlalu singkat. Atau sengaja disingkat waktunya. Narasumber kurang menguasai betul materi yang diberikan, sehingga kurang bisa dipahami. Peserta harusnya dari tiap mapel dengan waktu dan tempat yang cukup.

3. Bagaimana dengan Kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Cikande

Kepala Sekolah proaktif, guru dipandang sebagai tim, jadi terlalu tidak antara guru dengan kepala sekolah,....sifatnya sangat terbuka

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4. Sebagai guru tentu bapak terlibat dalam pengembang kurikulum di SMAN 1 Ciruas, bagaimana pengembang kurikulum di SMAN 1 Ciruas.

Saya hanya terlibat dalam kegiatan pengembangan kurikulum di sekolah sendiri. Jadi tidak pernah di tingkat kabupaten, apalagi di tingkat provinsi. Dan setahu saya ya... banyak guru di sekolah kami yang dilibatkan dalam pengembangan kurikulum di luar sekolah karena banyak yang jadi ketua MGMP Kabupaten Serang.

5. Metode Komunikasi seperti apa yang digunakan oleh kepala sekolah dalam menyampaikan implementasi kebijakan kurikulum 2013.

Tekniknya, ya ... hanya ceramah biasa, kadang diselingi dengan tanya jawab. Seingat saya sih tanya jawab tentang kurikulum 2013 sangat sedikit sekali atau mungkin tidak ada, entah karena memang sudah jelas atau memang guru-guru pada bingung, sehingga malah tidak mau bertanya.

6. Dalam menyampaikan implementasi kebijakan kurikulum 2013 oleh kepala sekolah dihadiri oleh siapa saja

Yang hadir sebagai audiens dalam kegiatan sosialisasi adalah semua guru yang ada di sekolah ini, baik guru tetap maupun guru tidak tetap. Disamping itu juga karyawan, tetapi hanya diwakili oleh kepala tata usaha saja, sedangkan karyawan lain tidak ikut diundang dengan pertimbangan tidak berkaitan langsung dengan masalah kurikulum 2013.

6. Bagaimana dengan Materi implementasi kebijakan kurikulum 2013 yang disampaikan oleh kepala sekolah.

Tingkat kejelasan materi yang disampaikan dalam sosialisasi tentang kurikulum 2013 cukup jelas, tetapi untuk beberapa bagian memang harus diakui kurang jelas, misalnya tentang hal-hal yang memungkinkan terjadinya beda penafsiran para guru dari tiap sekolah terhadap suatu ketentuan yang ada.

7. Bagaimana dengan kelengkapan sarana prasarana pendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMAN 1 Ciruas

Sebenarnya sarana prasarana sekolah kami sudah mencukupi. Kami memiliki ruangan kelas dan ruang kantor yang memadai, demikian juga laboratorium IPA, laboratorium komputer, koleksi buku-buku di perpustakaan dalam jumlah cukup, sejumlah alat-alat peraga dan media pembelajaran. Kondisinya cukup bagus. Sementara itu lingkungan sekolah juga cukup nyaman untuk kegiatan pembelajaran siswa."

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PETIKAN HASIL WAWANCARA
dengan
DEWAN GURU SMA NEGERI 1 CIKANDE

Hasil wawancara ini digunakan dalam menggali informasi di lapangan kepada narasumber yang mengetahui dan memahami serta memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan mendasar tentang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Serang khususnya bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang.

Fokus masalah : Implementasi Kebijakan Kurikulum

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap implemmentasi kebijakan kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 ini sangat baik karena memacu siswa untuk lebih kreatif. Apabila dilaksanakan dengan baik saya yakin pendidikan di Indonesia akan mampu bersaing dengan pendidikan diluar negeri. (Pendapat 1)

Tentang kurikulum 2013, sebenarnya tidak berbeda dengan kurikulum yang lama (kurikulum 2006) yang sudah kami gunakan selama ini, yang sedikit membedakan adalah kurikulum baru dalam hal ini kurikulum 2013 lebih menekankan kepada pemanfaatan teknologi, dan kami memahami itu, hanya saja guru-guru yang ada disekolah ini terutama yang sudah sepuh seperti saya ini tidak mengerti penggunaan komputer atau alat peraga elektronik lainnya karena sejak dulu sudah mengajar secara manual jadi mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi. (Pendapat 2)

2. Bagaimana dengan Sosialisasi kurikulum 2013

Menurut penilaian kami, pihak dinas pendidikan kurang mendukung diberlakukannya kurikulum 2013. Hal ini jika dilihat dari indikator sedikitnya kegiatan tentang sosialisasi kurikulum 2013 dan sejenisnya yang melibatkan para guru di sekolah. Kalaupun ada kegiatan sosialisasi atau workshop yang diundang paling hanya perwakilan dari beberapa mata pelajaran saja, padahal jumlah guru kan banyak.

3. Bagaimana dengan Kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Cikande

Kepemimpinan kepala sekolah terbuka dan menempatkan guru sebagai mitra kerja, tidak otoriter gitu pak.....tapi untuk hal-hal tertentu dan dalam keadaan tertentu kadang-kadang agak otoriter, tapi itu jika keadaan mendesak sekali,.....contohnya dalam hal kedisiplinan guru.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4. Sebagai guru tentu bapak terlibat dalam pengembangan kurikulum di SMAN 1 Cikande , bagaimana pengembangan kurikulum di SMAN 1 Cikande.

Saya membuat perangkat dan pengembangan kurikulum hanya untuk mata pelajaran sendiri melalui MGMP tingkat kabupaten, sehingga sedikit banyak saya meniru sekolah lain (dalam arti menyesuaikan). Untuk tingkat sekolah hanya dilakukan oleh waka urusan kurikulum.

5. Apakah bapak pernah terlibat dalam sosialisasi kurikulum 2013 dan dalam kapasitas apa

Saya belum pernah menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi tentang kurikulum 2013, maklum kemampuan tidak ada, atau kesempatannya yang memang tidak ada... Tapi kalau sebagai peserta sosialisasi pernah sekali ketika awal diberlakukannya kurikulum 2013 tahun 2014 dengan nara sumber kepala sekolah dan pengawas:

6. Sebagai implementor kebijakan kurikulum 2013 guru di SMA Negeri 1 Cikande, penguasaan terhadap kebijakan tersebut. Dalam kurikulum 2013 guru dapat mengembangkan kurikulum, bagaimana Tingkat penguasaan guru terhadap kurikulum 2013 di SMA Negeri Cikande

Menurut penilaian saya tingkat penguasaan guru di sekolah saya masih sangat kurang. Masih sering terjadi beda penafsiran diantara para guru terhadap suatu pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis kurikulum. Misalnya dalam hal sistematika RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) dan tata cara penuangan gagasan pembelajaran yang kreatif, penentuan KBM (ketuntasan belajar minimal), cara penilaian dan lain-lain.

7. Sebagai implementor kebijakan kurikulum 2013 guru di SMA Negeri 1 Cikande , apakah bapak melaksanakan pengembangan silabus dalam proses pembelajaran di SMAN 1 Cikande.

Alasan sebagian teman guru tidak melakukan pengembangan silabus antara lain karena keterbatasan kemampuan. Jadi guru merasa kurang mampu melakukan pekerjaan itu. Ada juga yang beralasan tidak memiliki waktu, atau karena merasa silabus yang dibuat oleh MGMP sudah cukup bagus untuk dipakai di sekolah, jadi tidak perlu diubah-ubah lagi...

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

8. Apakah di SMAN 1 Cikande dibentuk tim pengembang kurikulum, dan bagaimana tim pengembang kurikulum yang ada di SMAN 1 Cikande

Tim pengembangan kurikulum 2013 ada, tetapi dalam pelaksanaannya Tim Pengembang tidak bekerja. Jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum kurikulum 2013 ya langsung atau secara otomatis dilaksanakan oleh wakil kepala sekolah urusan kurikulum.” (Wawancara dengan Oom Soma tanggal 20 Juli 2017)

9. Siapakah yang menyampaikan sosialisasi implementasi kebijakan kurikulum di SMAN 1 Cikande.

“... sepertinya narasumber yang lain belum pernah datang atau diundang ke sini untuk menyampaikan masalah kurikulum. Jadi kami tahu tentang KURIKULUM 2013 ya dari kepala sekolah, sumber-sumber lain, misalnya buku-buku pedoman yang dikirim dari dinas pendidikan kabupaten atau provinsi dan juga dokumen KURIKULUM 2013 yang dimiliki oleh sekolah .”

10. Metode Komunikasi seperti apa yang digunakan oleh kepala sekolah dalam menyampaikan implementasi kebijakan kurikulum 2013.

Teknik yang digunakan dalam penyampaian informasi dalam sosialisasi kurikulum 2013 hanya ceramah saja. Kadang-kadang ada pertanyaan dari peserta. Dan kegiatan ini biasanya diselipkan dalam acara rapat-rapat pembinaan biasa yang diadakan secara insidental. Di sekolah kami belum pernah diadakan kegiatan khusus yang isinya hanya membahas mengenai kurikulum 2013.

11. Dalam menyampaikan implementasi kebijakan kurikulum 2013 oleh kepala sekolah dihadiri oleh siapa saja

Yang jadi audiens atau peserta dalam kegiatan sosialisasi tentang kurikulum 2013, ya... hanya semua anggota dewan guru dan sebagian karyawan. Sedangkan siswa dan pengurus komite sekolah tidak ikut dilibatkan. Informasi kepada siswa disampaikan pada kegiatan upacara bendera secara sekilas saja.

12. Bagaimana dengan Materi implementasi kebijakan kurikulum 2013 yang disampaikan oleh kepala sekolah.

Menurut penilaian saya sih, materi yang disampaikan dalam sosialisasi ada yang relevan dengan masalah yang berhubungan dengan kurikulum 2013, tetapi ada juga yang tidak relevan. Karena ya itu tadi pa ..., acara sosialisasi tersebut tidak diadakan secara

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

khusus hanya membahas kurikulum 2013 saja, tetapi digabungkandengan pembahasan agenda lain, jadi tidak terfokus.

13. Salah satu prinsip pengembangan kurikulum 2013 adalah relevansinya dengan kebutuhan siswa, apakah pengembangan kurikulum yang disusun sudah mengakomodir hal tersebut.

Berdasarkan penilaian kami dan juga hasil monitoring dan supervisi dari pengawas sekolah beberapa waktu yang lalu, maka dokumen kurikulum 2013 di sekolah kami sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ada, tetapi pada beberapa bagian masih perlu revisi dan penyesuaian. Misalnya pada penyusunan KBM / kriteria ketuntasan minimal, pengembangan silabus, RPP/ rencana pelaksanaan pembelajaran, dan pedoman penilaian.

14. Bagaimana dengan kelengkapan sarana prasarana pendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMAN 1 Cikande.

Begini pa, mungkin kondisi sarana prasarana kami baru sekitar 80% yang sudah dikatakan Mendukung diberlakukannya kurikulum 2013, hanya dalam hal ICT memang belum terpenuhi seluruhnya mengingat berbagai kendala yang dihadapi pihak sekolah, khususnya masalah dana dan sumberdaya manusianya... maksudnya untuk membangun sebuah sistem ICT yang bagus kan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Di samping itu tenaga professional yang mengelola sistem ICT kebetulan kami baru memiliki satu orang, padahal idealnya ada 5 orang...apalagi tahun ini sekolah sudah harus melaksanakan UNBK.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PETIKAN HASIL WAWANCARA
dengan
KASIE KURIKULUM SMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

Hasil wawancara ini digunakan dalam menggali informasi di lapangan kepada narasumber yang mengetahui dan memahami serta memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan mendasar tentang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Serang khususnya bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMA Negeri yang ada di Kabupaten Serang.

Fokus masalah : Implementasi Kebijakan Kurikulum

1. Seharusnya kepala sekolah mendukung kebijakan dari pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan tentang implemetasi kebijakan kurikulum 2013, bagaimana sikap bapak terhadap implemetasi kebijakan kurikulum 2013

“ Ya walaupun kami baru diserahi tugas membina SMA dari tahun 2017 karena sebelumnya kewenangan untuk pembinaan SMA ada ditingkat kabupaten/kota tapi sudah seharusnya kami dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk selalu siap mendukung setiap kebijakan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan seperti halnya kebijakan kurikulum 2013 ini Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan LPMP selalu siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013, kurikulum ini merupakan kurikulum pengganti kurikulum 2006 yang dilakukan pemerintah dengan niatan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan” (Wawancara dengan Drs. Adang Abdurahman tanggal 21 Juli 2017).

2. Seharusnya dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai perwakilan kementerian pendidikan dan kebudayaan mendukung implementasi kebijakan kurikulum ini baik dengan kepala sekolah atau pun guru sebagai implementor kebijakan, Bagaiakanakah bentuk dukungan dinas pendidikan dan kebudayaan melaksanakan hal tersebut.

Dalam hal pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah, termasuk di SMA Negeri, tentu saja pihak Dinas Pendidikan sangat mendukung. Karena disini peran kami sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan kurikulum 2013 di tingkat wilayah provinsi. Yang kami lakukan misalnya mulai dari sosialisasi dan pelatihan....seperti saat inipun pa,....kami sedang melaksanakan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

bimtek kurikulum 2013 dari tanggal 17 sampai 22 Juli 2017 dengan tema kita sukseskan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan,..... kami juga menugaskan kepala sekolah pada workshop kurikulum tingkat provinsi, dan juga melalui pengawas mengadakan supervisi atau monitoring terhadap pelaksanaan KURIKULUM 2013 di sekolah” (Wawancara dengan SL 1 Nov 2011).

3. Seharusnya dinas pendidikan dan kebudayaan dalam menyampaikan informasi tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013, kapan pertama kali informasi itu disampaikan kepada implementor kebijakan kurikulum 2013 di sekolah

Informasi tentang kurikulum 2013 pertama kali disampaikan melalui workshop di Anyer yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten. Ada beberapa kepala SMA yang diundang, jadi tidak semua diundang kesana. Nah, dari situ kemudian Kepala Sekolah menyampaikan kepada teman-teman guru di sekolah masing-masing tentang hal-hal yang diperoleh dari Anyer tadi.

4. Bagaimana dengan peran dinas pendidikan dan kebudayaan terhadap kelengkapan sarana prasarana pendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013.

Sarana prasarana pendidikan menjadi salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu sarana prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyampaikan himbuan ke tiap SMA untuk mempersiapkan dan memelihara sarana prasarana baik peralatan pendidikan, media pendidikan maupun fasilitas ruangan lainnya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar” (Wawancara dengan Drs. Adang Abdurahman tanggal 21 Juli 2017

5. Seharusnya dalam implementasi kebijakan didukung dengan standar operasional prosedur, bagaimana dengan implementasi kurikulum di provinsi Banten

Pada pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 yang bertujuan untuk memperbaiki pembangunan pendidikan di Kabupaten Serang..... saya sudah dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang berupa teknis atau juknis pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PETIKAN HASIL WAWANCARA
dengan
AKADEMISI PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG TIRTAYASA

Hasil wawancara ini digunakan dalam menggali informasi di lapangan kepada narasumber yang mengetahui dan memahami serta memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan mendasar tentang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Serang khususnya bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMA Negeri yang ada di Kabupaten Serang.

1. Bagaimana seharusnya sikap implimenter kebijakan kurikulum 2013.

Tentu saja untuk memberikan pendidikan yang bermutu tidak semudah membalikkan telapak tangan, seperti yang terjadi di Indonesia. Sumberdaya manusia masih menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan. Masalah sumberdaya manusia, ternyata memiliki korelasi positif dengan masalah pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu masalah klasik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dimana mutu pendidikan yang ada pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan menengah belum bisa menunjukkan hasil yang maksimal, dengan adanya kebijakan kurikulum 2013 ini harus didukung oleh pihak baik dari dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala sekolah, guru bahkan komite sekolah semua harus berperan aktif .

2. Karakter Profesionalisme dan kompetensi Pelaksana Kebijakan Kurikulum 2013 memegang peranan dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan di lapangan, bagaimana karakter profesionalisme dan kompetensi pelaksana kebijakan agar menghasilkan peningkatan pada implementasi kebijakan kurikulum 2013 tersebut

Peningkatan profesionalisme guru sebenarnya ditentukan oleh seorang guru itu sendiri.....Apakah seorang guru tersebut ingin menjadi seorang guru yang profesional atau tidak..... Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang guru jika ingin meningkatkan profesionalismenya...pertama dia harus memahami standart tuntutan profesinya...yangkedua...mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan...ketiga ada... organisasi profesi kemudian mampu mengembangkan etos kerja yang baik...serta mempunyai inovasi atau mengembangkan kreativitas terutama memanfaatkan tekhnologi komunikasi dan informasi.. kalau mengenai kompetensi, di Indonesia telah ditetapkan sembilan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai instructional leader, yaitu harus memiliki kepribadian ideal...menguasai landasan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pendidikan... menguasai bahan pengajaran...mempunyai kemampuan menyusun program pengajaran...mempunyai kemampuan menilai hasil dan proses belajar mengajar...mempunyai kemampuan menyelenggarakan program bimbingan, kemudian memiliki kemampuan menyelenggarakan administrasi sekolah...memiliki kemampuan bekerja sama dengan teman sejawat dan masyarakat serta memiliki kemampuan menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran...ya...semacam PTK.

3. Dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013, faktor komunikasi sangatlah penting menurut bapak bagaimana seharusnya komunikasi dalam suatu kebijakan.

Komunikasi kebijakan ialah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kebijakan dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kebijakan tersebut. Tugas inti dari aparatur adalah mengkomunikasikan kebijakan dengan baik, supaya objek komunikasi lebih paham dan mengerti tentang maksud dan tujuan dari materi yang di komunikasikan. Pesan pesan yang disampaikan oleh aparatur kadangkala berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain, tetapi proses komunikasi dapat berjalan lancar apabila pesan pesan yang disampaikan oleh apartur tidak bertentangan atau saling mendukung satu sama lain

4. Dalam Pelaksanaan implementasi kebijakan kurikulum 2013 diperlukan monitoring dan evaluasi, bagaimana peran monitoring dan evaluasi dalam kebijakan tersebut

Peran dan fungsi monev sangat penting... Terutama untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan benar-benar "on the track" sesuai tujuan implementasi kebijakan kurikulum 2013. Monitoring dapat disebut sebagai "*on going evaluation*," yang dilakukan sementara kegiatan berlangsung untuk melakukan perbaikan "di tengah jalan" bila diperlukan. Sementara Evaluasi dimaksud adalah "*terminate evaluation*," yang dilakukan pada akhir kebijakan untuk memastikan apakah pelaksanaan dan manfaat kebijakan sesuai tujuannya atau tidak. Lalu, hasilnya dapat dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan kebijakan berikutnya.

5. Isi kebijakan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam implementasi suatu kebijakan, bagaimana isi kebijakan kurikulum 2013.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Inti dari Kurikulum 2013, ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif...Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran...Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik... Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik

6. Pembiayaan dan sarana prasana merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Bagaimana pembiayaan dan sarana prasana dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013

Fungsi biaya di sekolah pada dasarnya untuk menunjang pembiayaan sekolah juga penyediaan sarana prasarana, seperti tanah, bangunan, laboratorium, perpustakaan, media belajar, operasional pengajaran, pelayanan administratif....Biaya pendidikan adalah seluruh dana baik langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber pemerintah, masyarakat, orang tua yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan, masyarakat dan orang tua sebagai pengguna jasa pendidikan turut bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan dengan cara berpartisipasi dalam mengupayakan dana pendidikan...dan muaranya adalah peeningkatan mutu pendidikan” (Wawancara dengan DR. H Masrupi, M.Pd tanggal 21 Juli 2017

7. Apa yang seharusnya dilaksanakan impletor kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan yang melibatkan faktor yang mempengaruhi dari luar kebijakan.

Tidak seharusnya dalam pengambilan keputusan sekolah tidak mengajak serta komite sekolah, karena komite sekolah adalah mitra sekolah bahkan disekolah dinegara yang pendidikannya sudah maju dalam mengambil suatu keputusan sekolah harusmendapat persetujuan bukan hanya dari komite saja tetapi harus melibatkan pihak lain seperti praktisi pendidikan, dewan pendidikan bahkan NGO.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

**PETIKAN HASIL WAWANCARA
dengan
KOMITE SEKOLAH SMAN 1 CIKANDE**

Hasil wawancara ini digunakan dalam menggali informasi di lapangan kepada narasumber yang mengetahui dan memahami serta memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan mendasar tentang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Serang khususnya bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Cikande Kabupaten Serang.

1. Apakah pihak komite sekolah terlibat dalam pembuatan program sekolah dalam hal pembiayaan sekolah

Pihak komite sekolah tidak ikut serta dalam penyusunan anggaran sekolah. Paling-paling sebatas pada waktu awal tahun pelajaran, kami minta persetujuan dengan mengajukan proposal kegiatan atau RKAS. Biasanya ketua komite sekolah hanya membubuhkan tanda tangan saja sebagai tanda persetujuan.

2. Apakah pihak komite sekolah terlibat dalam pembuatan program sekolah dalam pengembangan kurikulum

Untuk masalah penyusunan kurikulum sekolah, seingat saya komite sekolah tidak pernah diundang atau diberitahu ada kegiatan penyusunan kurikulum. Memang terus terang andaikata kami diundang juga kurang paham dengan masalah itu pak,..... Itu kan yang lebih menguasai guru-guru di sekolah. Jadi pada prinsipnya komite sekolah tidak apa-apa, tinggal mendukung saja kegiatan sekolah.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PETIKAN HASIL WAWANCARA
dengan
KOMITE SEKOLAH SMAN 1 CIRUAS

Hasil wawancara ini digunakan dalam menggali informasi di lapangan kepada narasumber yang mengetahui dan memahami serta memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan mendasar tentang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Serang khususnya bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Ciruas Kabupaten Serang.

1. Apakah pihak komite sekolah terlibat dalam pembuatan program sekolah dalam hal pembiayaan sekolah

Memang betul pa, kami hanya dilibatkan dlm penyusunan program saja, untuk detilnya tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penyusunan RKAS. Hal ini mengingat waktu yang kami miliki untuk itu tidak ada karena kesibukan di tempat kerja masing-masing. Jadi kami percayakan saja kepada sekolah. Namun demikian kami tetap meminta pihak sekolah menyerahkan kepada kami draf program kerja sekolah dan juga RKAS, supaya kami bisa ikut memantau kegiatan-kegiatan di sekolah.

2. Apakah pihak komite sekolah terlibat dalam pembuatan program sekolah dalam pengembangan kurikulum

Tidak sama sekali. Pihak komite sekolah sepertinya tidak mungkin untuk dilibatkan dalam penyusunan kurikulum 2013, walaupun aturannya demikian. Hal ini mengingat beberapa pertimbangan, seperti kesibukan masing-masing personil komite, juga kemampuan dan kompetensi di bidang kurikulum sepertinya tidak memungkinkan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

RIWAYAT HIDUP



Nurul Mustiqo, lahir di Tangerang, 19 April 1977.

Penulis telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD)

Negeri Kragilan 2 tahun 1989. Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kragilan

tahun 1992. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Negeri 1 Ciruas tahun 1995.

S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Jurusan Sosiologi

Universitas Lampung (Unila) tahun 2003 dan menyandang gelar Sarjana

Sosial (S.Sos), serta S2 Program Studi Magister Administrasi Publik di

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2015.

Sekarang aktivitas yang dijalani adalah Pengajar Mata Pelajaran Sosiologi

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMAN 1 Kragilan Kabupaten

Serang Provinsi Banten. Penulis dapat dihubungi melalui email :

nurul_mustiqo@yahoo.co.id.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.